



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KAMPAR TAHUN 2023



**PENJABAT BUPATI KAMPAR
HAMBALI, SE.,MBA., MH**

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kampar.....	6
1.3 Data Umum Daerah.....	8
1. Data Geografis Wilayah.....	9
2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	14
3. Jumlah PNS.....	20
4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	22
5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	24
6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	26
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	28
2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah	29
2.1.1 Pendapatan Daerah	29
2.1.2 Belanja Daerah	37
2.1.3 Pembiayaan Daerah	43
2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023	46
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	49
3.1 Capaian Program dan Kegiatan	49
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	284
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	298
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	329
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	329
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	339
BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN	340
BAB VI PENUTUP	343

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2023 dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2023 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Kampar demi ***"Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradab Menuju Masyarakat Sejahtera"***

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkinang, 28 Maret 2024

PENJABAT BUPATI KAMPAR,



HAMBALI, SE.,MBA., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2023 dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2023 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Kampar demi ***“Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradab Menuju Masyarakat Sejahtera”***

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkinang, 28 Maret 2024
PENJABAT BUPATI KAMPAR,

HAMBALI, SE.,MBA., MH

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat. Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya

menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun 2023 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2023.

1.1 DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2024 (Berita Dacrah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9 tahun 2022).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 21);

1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN KAMPAR

A. Visi Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan Visi Kabupaten Kampar, yaitu ;

TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2025

Penjabaran Visi tersebut sebagai berikut :

↳ PUSAT AGRIBISNIS

- a. Mewujudkan penataan kepemilikan lahan serta pengembangan SDM dan teknologi dalam pembangunan agro industri dan agro bisnis.
- b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasana daerah sebagai pusat agribisnis.
- c. Terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional.

↳ BERBUDAYA

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai Kabupaten Kampar yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
- b. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong.
- c. Memasyarakatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik.

↳ SEJAHTERA

- a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat
- b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai.

- c. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang berbasis kerakyatan.

↪ **AGAMIS**

- a. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama.
- b. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama.
- c. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan.

A. Misi Kabupaten Kampar

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan meliputi :

- 1) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.
- 2) Membangun sumberdaya manusia yang handal mampu menguasai IPTEK yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan antar lapisan kelompok masyarakat.
- 5) Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.
- 6) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembangan potensi dan sumberdaya daerah
- 8) Mengembangkan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah.
- 9) Mengembangkan dan menggerakkan sumber investasi untuk pengelolaan potensi sumberdaya daerah.

- 10) Mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi daerah.
- 11) Mengembangkan pariwisata yang bernuansa kultural dan agamis
- 12) Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan di masyarakat

1.3 DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah ± 30.569,56 Km² dengan pusat pemerintahan di Bangkinang.

Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318 /VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

Pada Tahun 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (*induk*), Kabupaten Pelalawan (*pemekaran*), dan Kabupaten Rokan Hulu (*pemekaran*) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam. Hingga saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 Desa serta 8 kelurahan.

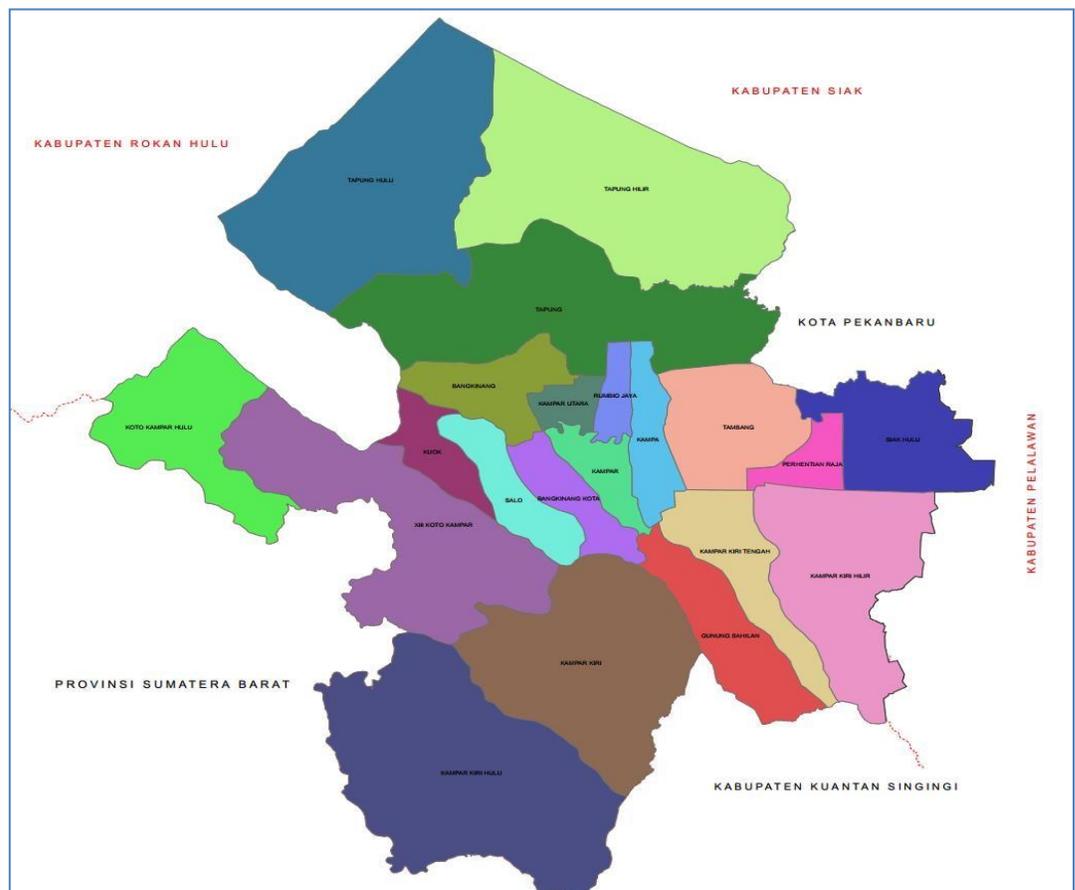
1. Data Geografis Wilayah

1] *Batas administrasi dan Luas wilayah*

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai dengan 101° 14'30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Prov Sumatera Barat;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2017 Skala 1 : 50.000 di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat 4 (empat) batang sungai besar, yaitu :

- Sungai Kampar Kanan yang panjangnya \pm 182,9 km, dengan kedalaman rata-rata 7 – 10 m dan dengan lebar rata-rata 143 meter. Sungai kampar Kanan ini melewati Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Tambang dan Kecamatan Siak Hulu ;
- Sungai Kampar Kiri yang panjangnya \pm 115,8 km, dengan kedalaman rata-rata 2 - 6 m yang melewati Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri;
- Sungai Tapung Kanan yang panjangnya \pm 94,5 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m, melintasi kecamatan Tapung Hulu, Tapung dan Kecamatan Tapung Hilir.
- Sungai Tapung Kiri yang panjangnya \pm 115,5 km dengan kedalaman rata-rata 2 – 8 m, melintasi kecamatan Tapung.

Empat sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, kegiatan budi daya perikanan, maupun sebagai sumber energi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Koto Panjang).

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua Satuan Wilayah Sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari kedua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit

Barisan yang secara batasan administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi tiga Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Tapung, Kampar Kanan, dan Kampar Kiri.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28km² atau \pm 11,62 % dari luas wilayah Provinsi Riau [94.561,60 km²]. Dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km² [12,10%], diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.301,25 km² [11,53%] dan Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15 km² [10,36%]. Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km² [0,68%] diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km² [0,71%] dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km² [0,99%].

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	91.533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	33.059	2,9	-	11
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	59.797	5,3	-	9
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73.240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Kuok	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Petapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Kota Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	17.718	1,6	2	2
14	Bangkinang	Muara Uwai	25.350	2,2	2	7
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Sungai Pinang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	11.154	1,0	-	5
Jumlah			1.128.928	100,00	8	242

Sumber data : Kampar dalam Angka

2] Topografi

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%.

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22°C – 33°C, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tufmasam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. **Grup Kubah Gambut.** Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut;
2. **Grup Aluvial.** Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut;

3. **Dataran Tuf Masam.** Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut;
4. **Dataran.** Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain;
5. **Perbukitan,** terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50-300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam;
6. **Pegunungan dan Plato.** Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/ patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terbagi menjadi sebelas 11 (sebelas) jenis penggunaan yaitu lahan sawah, Lahan bukan pertanian, Tegal Kebun, Ladang Huma, padang rumput, Rawa, Kolam, Lahan sementara tidddak digunakan, Hutan Negara dan Hutan Rakyat, Perkebunan dan Lahan Lain-lain. Jenis penggunaan lahan terbesar adalah lahan bukan pertanian dengan luasan sebesar 325.093 ha atau 28,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan sawah dengan jumlah luasan sebesar 3.390 ha atau sekitar 0,30 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2022

No	JenisPenggunaanLahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Lahan Sawah	4.542	0,40
2	Lahan Bukan Pertanian	325.093	28,80
3	Tegal Kebun	91.770	8,13
4	Ladang Huma	15.655	1,39
5	Padang Rumput	3.390	0,30
6	Rawa	-	-
7	Kolam	-	-
8	Sementara Tidak Diusahakan	88.594	7,85
9	Hutan Negara dan Hutan Rakyat	125.252	11,09
10	Perkebunan	449.691	39,83
11	Lain-lain	24.291	2,21
	Jumlah	1.128.928	100,00

Sumber : Kampar dalam Angka 2023

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2023 sebanyak 860.379 jiwa, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	URAIAN	TAHUN 2023	%
1	Jumlah penduduk	860.379	100
2	Kepala Keluarga	259.442	
3	Penduduk berdasarkan Jenis kelamin:		
	- Laki-laki	439.148	51.04
	- Perempuan	421.231	48.96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2023

Tabel 2.2
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	LUAS	KEPADATAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN				
		n(Jiwa)	n(Jiwa)				
1	BANGKINANG KOTA	19.550	19.535	39.085	177,18	220,59	2,21
2	KAMPAR	27.120	26.510	53.630	136,28	393,53	2,19
3	TAMBANG	46.041	44.756	90.797	371,94	244,12	8,09
4	XIII KOTO KAMPAR	12.658	11.988	24.646	732,40	33,65	1,71
5	KUOK	13.663	13.153	26.816	151,41	177,11	3,37
6	SIK HULU	48.869	46.920	95.789	689,80	138,86	5,77
7	KAMPAR KIRI	18.633	17.619	36.252	915,33	39,61	5,47
8	KAMPAR KIRI HILIR	7.479	7.087	14.566	759,74	19,17	4,99
9	KAMPAR KIRI HULU	5.925	5.516	11.441	1.301,25	8,79	2,50
10	TAPUNG	54.562	51.892	106.454	1.365,97	77,93	4,91
11	TAPUNG HILIR	30.460	29.159	59.619	1.013,56	58,82	2,48
12	TAPUNG HULU	42.276	39.775	82.051	1.169,15	70,18	0,30
13	SALO	14.053	13.395	27.448	207,83	132,07	2,74
14	RUMBIO JAYA	9.760	9.391	19.151	76,92	248,97	3,14
15	BANGKINANG	18.237	17.630	35.867	253,50	141,49	2,81
16	PERHENTIAN RAJA	10.492	10.015	20.507	111,54	183,85	3,34
17	KAMPA	12.785	12.454	25.239	173,08	145,82	3,77
18	KAMPAR UTARA	9.994	9.658	19.652	79,84	246,14	3,16
19	KAMPAR KIRI TENGAH	14.892	14.189	29.081	330,59	87,97	2,56
20	GUNUNG SAHILAN	11.188	10.564	21.752	597,97	36,38	5,18
21	KOTO KAMPAR HULU	10.511	10.025	20.536	674,00	30,47	1,22
	KAB. KAB. KAMPAR	439.148	421.231	860.379	11.289,28	76,21	3,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2023

- Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2023 sebesar 76 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kampar yaitu 393 jiwa/ Km², diikuti dengan kecamatan Kecamatan Rumbio Jaya 248 jiwa/ Km² dan Kampar Utara yaitu 246 jiwa/km² sedangkan kerapatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 8 jiwa/ Km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 19 jiwa/ Km² dan Koto Kampar Hulu yaitu 30 jiwa/ Km².
- Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapung yaitu 106.454 jiwa (12,37 %) diikuti Kecamatan Siak Hulu yaitu 95.789 jiwa (11,13 %) dan Kecamatan Tapung Hulu yaitu 82.051 jiwa (9,54 %), sementara itu penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 11.441 jiwa (1,33 %) diikuti oleh Kampar Kiri Hilir yaitu 14.566 (1,69%) dan Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 19.151 jiwa (2,23 %). Sementara untuk laju pertumbuhan pendudukan berada di Kecamatan Tambang yaitu sebesar 8,09%, diikuti oleh Kecamatan Siak Hulu 5,77% dan Kecamatan Kampar Kiri 5,47%.

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	%
1	BANGKINANG KOTA	11.667	4,54
2	KAMPAR	16.294	6,33
3	TAMBANG	26.557	9,94
4	XIII KOTO KAMPAR	7.616	2,96
5	KUOK	8.172	3,15
6	SIK HULU	28.485	10,93
7	KAMPAR KIRI	10.986	4,28
8	KAMPAR KIRI HILIR	4.425	1,68
9	KAMPAR KIRI HULU	3.536	1,37
10	TAPUNG	31.982	12,18
11	TAPUNG HILIR	17.862	6,91
12	TAPUNG HULU	24.264	9,39
13	SALO	8.173	3,16
14	RUMBIO JAYA	6.269	2,46
15	BANGKINANG	10.654	4,13
16	PERHENTIAN RAJA	6.320	2,45
17	KAMPA	7.643	2,94
18	KAMPAR UTARA	6.029	2,39
19	KAMPAR KIRI TENGAH	9.137	3,54
20	GUNUNG SAHILAN	6.702	2,60
21	KOTO KAMPAR HULU	6.669	2,66
	TOTAL	259.442	

Sumber : DISDUKPENCAPIL Kampar tahun 2023

Jumlah Kepala Keluarga terbanyak Tahun 2023 berada pada Kecamatan Tapung dan Siak Hulu, masing-masing 31.982 KK (12,18 %) dan 28.485 KK (10,93 %), sedangkan jumlah Kepala keluarga yang paling sedikit berada pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kampar Kiri Hilir masing-masing 3.536 KK (1,37 %) dan 4.425 (1,68 %).

Tabel 2.4
Pertambahan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

KODE	NAMA_KAB	2022	2023	PERTAMBAHAN	%
140101	BANGKINANG KOTA	39.024	39.085	61	0,16
140102	KAMPAR	53.199	53.630	431	0,81
140103	TAMBANG	86.359	90.797	4.438	5,14
140104	XIII KOTO KAMPAR	24.395	24.646	251	1,03
140105	KUOK	26.429	26.816	387	1,46
140106	SIAK HULU	93.898	95.789	1.891	2,01
140107	KAMPAR KIRI	35.564	36.252	688	1,93
140108	KAMPAR KIRI HILIR	14.099	14.566	467	3,31
140109	KAMPAR KIRI HULU	11.367	11.441	74	0,65
140110	TAPUNG	104.169	106.454	2.285	2,19
140111	TAPUNG HILIR	59.436	59.619	183	0,31
140112	TAPUNG HULU	81.418	82.051	633	0,78
140113	SALO	27.094	27.448	354	1,31
140114	RUMBIO JAYA	19.118	19.151	33	0,17
140115	BANGKINANG	35.708	35.867	159	0,45
140116	PERHENTIAN RAJA	20.268	20.507	239	1,18
140117	KAMPA	24.964	25.239	275	1,10
140118	KAMPAR UTARA	19.552	19.652	100	0,51
140119	KAMPAR KIRI TENGAH	28.857	29.081	224	0,78
140120	GUNUNG SAHILAN	21.565	21.752	187	0,87
140121	KOTO KAMPAR HULU	20.753	20.536	-217	-1,05
1401	KAB. KAMPAR	849.258	860.379	13.143	1,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2023 sebanyak 13.143 jiwa (1,55%) dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2022. Pertambahan penduduk terbanyak pada tahun 2023 terdapat pada Kecamatan Tambang sebanyak 4.438 jiwa /tahun (5,14%), Kecamatan Kecamatan Tapung 2.285 jiwa /tahun (2,19%) dan Kecamatan Siak Hulu yaitu sebesar 1.891 jiwa/tahun (2,01%). Disamping adanya pertambahan penduduk terdapat pula Kecamatan dengan jumlah penduduk berkurang yaitu pada Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan berkurangnya penduduk sebanyak 217 jiwa dibanding jumlah penduduk pada tahun 2022.

Tinggi jumlah pertambahan penduduk pada Kecamatan Tambang, Siak Hulu dan Tapung disebabkan karena 3 kecamatan ini adalah kecamatan penyangga yang berbatas langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, sebaliknya 3 kecamatan yang rendah pertambahan penduduknya yaitu Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kota Kampar Hulu, merupakan kecamatan yang terluar dari Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Kabupaten lain dan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Menurut Kelompok Umur Usia Non Produktif dan Produktif Tahun 2023

NO.	USIA NON PRODUKTIF DAN PRODUKTIF	JENIS KELAMIN		PENDUDUK n(JIWA)	PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
		n(JIWA)	n(JIWA)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	127.074	118.323	245.397	28,52
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	295.223	286.100	581.323	67,57
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	16.851	16.808	33.659	3,91
4.	JUMLAH	439.148	421.231	860.379	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak Kabupaten Kampar adalah penduduk berusia produktif 15-64 Tahun sebanyak sebanyak 581.323 jiwa (67,57%) diikuti oleh kelompok umur Usia Muda 00-14 Tahun sebanyak 245.397 (28,52%) dan Usia Tua /Non Produktif > 65 tahun sebanyak 33.659 jiwa(3,91%).

3. Jumlah PNS

Jumlah PNS Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah PNS pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan jenis Kelamin Per 31 Desember 2023

Tabel 3.1

NO	NAMA OPD	DATA ASN PER JABATAN DAN KELAMIN									Grand Total
		Jabatan Fungsional			Jabatan Pelaksana			Jabatan Struktural			
	JENIS KELAMIN		Jabatan Fungsional Total	F	M	Jabatan Pelaksana Total	F	M	Jabatan Struktural Total		
	F	M									
	Grand Total	2780	1379	4159	249	438	687	88	264	352	5198
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	4	5	9	4	4	8	3	3	6	23
2	BADAN KESBANG DAN POLITIK	2	3	5	2	2	4	1	3	4	13
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0	1	11	12	2	4	6	18
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	1	2	6	7	13	4	5	9	24
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	2	3	4	3	7		9	9	19
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	4	7	7	9	16	1	3	4	27
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	1	3	1	6	7		2	2	12
8	DINAS KESEHATAN	364	73	437	33	18	51	2	7	9	497
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	4	8	2	3	5	2	5	7	20
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	2	5	7	5	2	7	1	2	3	17
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	4	6	1	5	6	1	3	4	16
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3	5	8		4	4		4	4	16
13	DINAS PU & PENATAAN RUANG	1	3	4	8	33	41	1	9	10	55
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			0	1	2	3	2	7	9	12
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4	4	3	4	7	2	3	5	16
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	5	6	6	6	12	1	3	4	22
17	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1851	947	2798	38	74	112	7	26	33	2943
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND ANAK	8	1	9	3	1	4	5		5	18
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	2	5	7	2	6	8	1	3	4	19
20	DINAS PERHUBUNGAN			0	2	4	6	2	6	8	14

21	DINAS PERIKANAN	2	4	6	6	4	10	1	6	7	23
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1	4	5	6	5	11	3	4	7	23
23	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		8	8	8	22	30	2	4	6	44
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7	3	10	2	2	4	3	2	5	19
25	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	34	27	61	8	13	21	2	3	5	87
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		3	3	4	7	11	1	6	7	21
27	DINAS SOSIAL	2	6	8		2	2	2	4	6	16
28	FITRAH AISYIYAH RANTING SELAT AUR	1		1			0			0	1
29	INSPEKTORAT	15	16	31	3	6	9		3	3	43
30	KECAMATAN BANGKINANG			0	1	3	4	1	1	2	6
31	KEC. BANGKINANG KOTA			0	1	2	3	1	3	4	7
32	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN			0		1	1		3	3	4
33	KECAMATAN KAMPA			0	1	1	2	2	1	3	5
34	KECAMATAN KAMPAR			0	1	4	5	1	4	5	10
35	KECAMATAN KAMPAR KIRI			0	2	2	4	1	1	2	6
36	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR			0		1	1			0	1
37	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			0		1	1	1	3	4	5
38	KEC. KAMPAR KIRI TENGAH			0	1	1	2	2	1	3	5
39	KECAMATAN KAMPAR UTARA			0			0	2	2	4	4
40	KEC. KOTO KAMPAR HULU			0		1	1	1	2	3	4
41	KECAMATAN KUOK			0		2	2	1	2	3	5
42	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA			0	1	4	5	2	1	3	8
43	KECAMATAN RUMBIO JAYA			0		3	3		4	4	7
44	KECAMATAN SALO			0		2	2		2	2	4
45	KECAMATAN SIAK HULU			0	3	7	10	2	4	6	16
46	KECAMATAN TAMBANG			0	1	5	6	1	3	4	10
47	KECAMATAN TAPUNG			0		1	1	1	3	4	5
48	KECAMATAN TAPUNG HILIR			0		1	1		2	2	3
49	KECAMATAN TAPUNG HULU			0		1	1		2	2	3
50	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR			0			0		1	1	1
51	KELURAHAN AIR TIRIS			0	1		1		2	2	3
52	KELURAHAN BANGKINANG KOTA			0		1	1	1	1	2	3
53	KELURAHAN BATU BERSURAT			0			0			0	0
54	KELURAHAN LANGGINI			0			0		1	1	1
55	KELURAHAN LIPAT KAIN			0		1	1		1	1	2
56	KELURAHAN PASIR SIALANG			0			0	2	1	3	3
57	KELURAHAN PULAU			0			0			0	0
58	KELURAHAN SUNGAI PAGAR			0			0		1	1	1
59	PEMERINTAH KAB. KAMPAR	348	196	544	20	53	73	6	41	47	664

60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	110	25	135	13	12	25	4	3	7	167
61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			0		11	11		12	12	23
62	SEKRETARIAT DAERAH	7	14	21	30	37	67	1	14	15	103
63	SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	3	8	11			0	11
64	SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK			0	3	2	5	1		1	6
65	SEKRETARIAT DPRD	2	1	3	1	5	6	2	3	5	14

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah total PNS di Kabupaten Kampar sebanyak 5.198 PNS dengan persentase jumlah PNS Perempuan sebesar 3.117 PNS (59,97 %) dan persentase jumlah PNS Laki-laki sebesar 2.081 PNS (40,03 %). Jumlah jabatan fungsional sebanyak 4.159 PNS (80,01%), jumlah Jabatan Pelaksana sebanyak 687 PNS (13,22%) dan jabatan Struktural sebanyak 352 PNS (6,77%).

4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.805.811.127.502,00	2.734.876.258.479,08	97,47	2.427.503.585.552,71
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.540.731.945,00	298.626.546.416,08	104,58	260.416.048.442,71
1	Pajak Daerah	156.820.690.967,00	153.800.441.758,00	98,07	142.366.052.600,00
2	Retribusi Daerah	13.505.450.000,00	12.315.324.270,00	91,19	8.892.742.152,31
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815,00	36.299.309.804,00	155,97	23.550.128.300,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	91.941.282.163,00	96.211.470.584,08	104,64	85.607.125.390,40
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.518.170.395.557,00	2.434.129.025.789,00	96,66	2.165.922.257.436,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.270.991.417,00	2.133.570.161.640,00	96,05	1.985.226.332.189,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	296.899.404.140,00	300.558.864.149,00	101,23	180.695.925.247,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	1.165.279.674,00
1	Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	1.165.279.674,00

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.734.876.258.479,08 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 2.427.503.585.552,71, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 307.372.672.926,37 (12,66%).

Untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dari target anggaran sebesar Rp. 285.540.731.945,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 298.626.546.416,08 (104,58%). Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 260.416.048.442,71, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 38.210.497.973,37 (14,67%). Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 10,92%.

Untuk Pendapatan Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar 96,66%, dari target anggaran sebesar Rp. 2.518.170.395.557 terealisasi Rp. 2.434.129.025.789. Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.165.922.257.436 realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 268.206.768.353 (12,38%). Persentase kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 89 %.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 2.120.686.274. Jika diperbandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.165.279.674 realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 955.406.600 (81,99%). Persentase kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,08 %.

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Adapun anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2022
5.	BELANJA DAERAH	2.826.856.579.502,00	2.619.025.543.128,00	92,65	2.480.592.185.573,96
5.1.	BELANJA OPERASI	2.047.129.480.192,00	1.900.679.270.818,50	92,85	1.818.618.607.702,14
5.1.01	Belanja Pegawai	1.020.218.954.429,00	936.493.691.039,00	91,79	963.391.408.176,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.545.958.029,00	849.536.454.848,45	93,30	787.240.777.384,22
5.1.04	Belanja Subsidi	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18	436.450.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	103.269.017.734,00	102.175.874.903,05	98,94	47.872.957.141,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.545.550.000,00	12.351.250.028,00	98,45	19.677.015.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	384.479.758.418,00	324.501.838.936,50	84,40	281.509.813.581,82
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.228.102.376,00	54.234.848.889,50	91,57	80.023.194.214,82
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.376.516.079,00	55.491.835.674,00	82,36	64.626.802.305,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	242.693.872.952,00	200.185.637.334,00	82,48	127.694.277.285,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.821.693.011,00	13.242.462.641,00	95,81	8.660.421.281,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	239.295.000,00	229.310.468,00	95,83	0,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	393.799.121.092,00	393.777.787.791,00	99,99	379.617.643.340,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.813.266.012,00	16.808.319.340,00	99,97	10.423.785.747,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376.985.855.080,00	376.969.468.451,00	100,00	369.193.857.593,00

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah untuk

Tahun Anggaran 2023 sebesar 92,65 % yaitu Rp. 2.619.025.543.128,00 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.826.856.579.502,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 yaitu Rp. 2.480.592.185.573,96, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 138.433.357.554,04 (5,58%).

Belanja Operasi pada tahun 2023 terealisasi 92,85%, dari anggaran sebesar Rp. 2.047.129.480.192,00, terealisasi sebesar Rp. 1.900.679.270.818,50. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 yaitu Rp. 818.618.607.702,14, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 82.060.663.116,36 (4,51%).

Belanja Modal pada tahun 2023 terealisasi 84,40%, dari anggaran sebesar Rp. 384.479.758.418,00, terealisasi sebesar Rp. 324.501.838.936,50,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 yaitu Rp. 281.509.813.581,82, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.992.025.354,68 (15,27%).

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 terealisasi 4,60%, dari anggaran sebesar Rp. 448.219.800,00, terealisasi sebesar Rp. 66.645.582,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 yaitu Rp. 846.120.950,00 realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 779.475.368,00 (-92,12%). Belanja Tidak terduga digunakan untuk mengintervensi kegiatan yang sifatnya insidental yang memerlukan penanganan secara khusus dan mendesak. Salah satunya adalah mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok yang disebabkan adanya inflasi, namun pada tahun 2023 fluktuasi harga kebutuhan barang pokok di Kabupaten Kampar cenderung stabil.

Belanja Transfer pada tahun 2023 terealisasi 99,99%, dari anggaran sebesar Rp. 393.799.121.092,00, terealisasi sebesar Rp. 393.777.787.791,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2022 yaitu Rp. 379.617.643.340,00 realisasi belanja Transfer di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.160.144.451,00 (3,73%).

6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2022
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,4	74.859.762.812,21
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,4	74.859.762.812,21
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,4	74.859.762.812,21
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2022 sebesar 103,4%, dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp. 21.045.452.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.771.162.790,96. Bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan Tahun 2022 yaitu Rp. 74.859.762.812,21, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2023 menurun sebesar 53.088.600.021,25 (-70,92%).

2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan

perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

Asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2023 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diprediksi sekitar 5,6% akan mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terganggu akibat pandemi Covid-19, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Riau tahun 2023 diprediksikan meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 2,05% dan pada saat yang sama diprediksikan PAD akan tumbuh sebesar 2,76%;
3. Porsi belanja APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;

6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,05% yang diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 0,20%;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh;
9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2023 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

2.1.1 Pendapatan Daerah

2.1.1.1 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah.

Dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka efisiensi dan efektifitas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan, tuntutan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya kebijakan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah diarahkan pula dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan diwujudkan dengan program kegiatan tahunan daerah melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen anggaran berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Plafond dan Prioritas Anggaran (PPA) dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar TA 2023.

Asumsi dasar APBN 2023 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2023. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah dengan asumsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,21-3,46%;
2. Menurunkan angka Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,76-4,04%;
3. Rasio Gini sebesar 0,267;
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 73,90;
5. Menekan angka Tingkat Kemiskinan 7,51%

Selanjutnya asumsi ini menjadikan APBD berpengaruh terhadap arah, tujuan dan prioritas pembangunan perekonomian daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah.
2. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama penyusunan APBD sehingga APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
3. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBD merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Investor dapat lebih fokus dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBD.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
- 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2022.
- 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku serta pembayaran melalui layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
- 7) Mengembangkan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
- 9) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10) Sehubungan telah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar sedang melakukan proses penyusunan revisi terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengacu pada UU HKPD dimaksud, dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) jenis Peraturan Daerah.
- b.** Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Pemerintah/Kementerian terkait.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
 - 7) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.

- 8) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait Alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.
- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan : Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

2.1.1.2 Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah melalui beberapa perubahan atas Peraturan Daerah dan penerbitan Peraturan Daerah baru. Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah dituntut agar mampu melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (Publik Services). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan yang

dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah.

Adanya penurunan Pendapatan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kampar tentu tidak akan berdiam diri atau puas sampai disini saja, melainkan terus berupaya menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah, karena barometer keberhasilan otonomi daerah itu dapat dilihat dari kemandirian daerah dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber pendapatan baru untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Memperhatikan hal tersebut diatas, kedepan diharapkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga PAD dapat meningkat perannya untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2023 mengalami Peningkatan dari target APBD murni tahun 2023 yaitu dari Rp.2.525.387.965.574,00,- menjadi Rp. 2.683.478.121.715,00 terjadi penambahan sebesar Rp.158.090.156.141,00 atau naik 6.26 persen. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.525.387.965.574	2.683.478.121.715	158.090.156.141	6,26
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.735.827.642	277.186.807.367	-1.549.020.275	-1,00
4.1.01.	Pajak Daerah	154.143.211.242	156.820.690.967	-2.677.479.725	-1,74
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.989.450.000	11.505.450.000	-2.484.000.000	-17,76
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815	23.273.308.815	0	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585	85.587.357.585	-1.742.500.000	-2,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.244.552.137.932	2.404.191.314.348	159.639.176.416	7,11
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.050.984,00	2.103.794.738,41	51.743.754	2,52
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.501.153.932	300.396.575.932	107.895.422.000	56,05
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0,00

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2023

2.1.1.3 Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah.

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah.

❖ Permasalahannya :

- a) Potensi Sumber PAD sangat terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan strategi serta pemetaan potensi PAD.
- b) Masih belum optimalnya pendataan dan pemungutan seluruh potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- c) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam membayar kewajibannya.
- d) Masih belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Dana Perimbangan.

➤ Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

❖ Permasalahannya :

- a) Distribusi dan realisasi dana dari pemerintah pusat sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
- b) Adanya perubahan kebijakan yang mendasar berupa perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan Kabupaten Kampar.
- c) Khusus penerimaan pendapatan dari Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi sangat tergantung dari :
 - Jumlah sumur minyak yang beroperasi.
 - Realisasi penjualan hasil produksi atau lifting Migas.
 - Cost Recovery (Pengembalian biaya operasi).
 - Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP)
 - Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap US Dolar (US\$).
 - Faktor Pengurang Penerimaan Migas.

- Dana Alokasi Umum (DAU).
 - ❖ Permasalahannya :
 - a) Kurangnya akurasi data yang terkait dengan variabel-variabel dalam perhitungan dan perumusan antara lain :
 - Jumlah Penduduk tahun terakhir.
 - Luas Wilayah.
 - Jumlah Gaji Pegawai Sipil Daerah.
 - Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
 - Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
 - b) Belum terkoordinasinya penyampaian data ke Pemerintah pusat.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - ❖ Permasalahannya :

Kriteria teknis program / kegiatan ditentukan oleh Kementerian teknis terkait, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan dengan keadaan daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Bagi Hasil Pajak Propinsi.
 - ❖ Permasalahannya :
 - a) Lambatnya penyusunan jumlah estimasi target bagi hasil Provinsi untuk Kab/Kota, sehingga memperlambat dalam penyusunan target pendapatan.
 - b) Bagi hasil pajak tidak semuanya dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
 - Dana Penyesuaian.
 - ❖ Permasalahannya :
 - a) Keterlambatan mempersiapkan Peraturan dan Penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat.
 - b) Belum diperolehnya jumlah dana dan waktu yang pasti terkait penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat.

2.1.2 Belanja Daerah

2.1.2.1 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah.

Perencanaan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2023 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) Perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory yang merupakan kewajiban daerah;
- 2) Perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya perubahan SILPA;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.
- 6) Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020.

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD tahun 2023 yang telah dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan :
 - a. untuk penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum sesuai dengan petunjuk teknis bidang DAK;

- b. untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/I/2023 tentang Penetapan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk belanja gaji guru bantu propinsi, untuk anggaran belanja kecamatan, untuk belanja rumah layak huni, peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan;
- c. penyesuaian untuk pembayaran belanja iuran BPJS yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah yang perlu dilakukan pergeseran Antar objek belanja.

2) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja kegiatan yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah.

- 2. Pengalokasian belanja untuk dukungan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang dilaksanakan pada tahun 2024 berupa belanja hibah sebesar 40 % dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar,
- 3. Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kampar tahun 2023;
- 4. Pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggarannya prioritas lainnya;
- 5. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran belanja pada kegiatan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
- 6. Pengalokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SiLPA.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya. Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

2.1.2.2 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah sebagai pagu tertinggi yang dialokasikan untuk menunjang setiap kegiatan yang telah direncanakan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.	BELANJA DAERAH	2.546.433.417.574	2.704.523.573.715	158.090.156.141
5.1.	BELANJA OPERASI	1.931.753.904.282	1.987.789.175.623	56.035.271.341
5.2.	BELANJA MODAL	221.747.618.500	324.354.283.500	102.606.665.000
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.200	6.448.220.000	(551.780.200)
5.4.	BELANJA TRANSFER	385.931.894.592	385.931.894.592	0

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2023

Dari tabel dijelaskan terlihat perubahan belanja sebagai berikut:

1) *Belanja Operasi*

Belanja operasi bertambah sebesar Rp. 56.035.271.341. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) *Belanja modal*

Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp. 102.606.665.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3) *Belanja Tidak Terduga*

Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp. 551.780.200 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) *Belanja transfer*

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada perubahan APBD tahun 2023 tidak ada perubahan belanja transfer.

2.1.2.3 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja daerah adalah terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD dan terjadinya pengurangan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pemotongan lebih bayar oleh pemerintah pusat terhadap Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi, sedangkan jumlah kebutuhan belanja dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, disamping itu masih terdapat kesalahan dalam penulisan/input kode rekening sehingga perlu adanya revisi/pergeseran kode rekening dalam rangka penyesuaian kode rekening yang berakibat pelaksanaan program dan kegiatan tertunda sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Perubahan APBD.

2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023

dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

2.1.3.1 Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

2.1.3.2 Perubahan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan pada APBD 2023 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2022. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2022. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2023

mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai dengan melakukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2022 untuk mendanai belanja kegiatan dari semula dianggarkan Rp.21.045.452.000,00.

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kampar tidak terjadi perubahan pengeluaran pembiayaan. Perubahan pembiayaan daerah terinci dalam table 6.1 berikut ini:

Tabel 2.3 : Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.045.452.000	21.045.452.000	0
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.045.452.000	21.045.452.000	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.045.452.000	21.045.452.000	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2023

2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, yang penjabarannya tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 semula berjumlah Rp. 2.546.433.417.574 bertambah sejumlah Rp. 281.138.933.874,- sehingga menjadi Rp. 2.827.572.351.448,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	2.525.387.965.574,-
b. Bertambah	Rp.	281.138.933.874,-
c. Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.806.526.899.448,-

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 secara rinci sebagai berikut :

1.1 Pendapatan asli daerah

a. semula	Rp.	278.735.827.642,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.023.504.457,-
c. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	282.759.332.099,-

1.2 Pendapatan transfer

a. semula	Rp.	2.244.552.137.932,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	277.115.429.417,-
c. Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	2.521.667.567.349,-

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. semula	Rp.	2.100.000.000,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
c. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	2.100.000.000,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	2.546.433.417.574,-
b. Bertambah	Rp.	281.138.933.874,-
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.827.572.351.448,-

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 secara rinci sebagai berikut :

1.1 Belanja operasi ;

a. semula	Rp.	1.931.753.904.282,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	112.758.203.856,-
c. Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	2.044.512.108.138,-

1.2 Belanja modal;

a. semula	Rp.	221.747.618.500,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	166.065.283.918,-
c. Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	387.812.902.418,-

1.3 Belanja tidak terduga;

a. semula	Rp.	7.000.000.200,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.551.780.400,-)
c. Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.448.219.800,-

1.4 Belanja transfer;

a. semula	Rp.	385.931.894.592,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.867.226.500,-
c. Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	393.799.121.092,-

3. Pembiayaan daerah

(1) Penerimaan pembiayaan

a. semula	Rp.	21.045.452.000,-
b. bertambah	Rp.	0,-
c. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.045.452.000,-

(2) Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
c. Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	21.045.452.000,-
e. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

**BAB
3****HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH****3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN****A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) tersebut menyajikan penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2023 sesuai dengan target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3.1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan

indikator sasaran. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran didapatkan melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPD.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.2 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. 16 (enam belas) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023, memiliki indikator sasaran sebanyak 21 (dua puluh satu), terdiri dari 2 (dua) indikator untuk misi I, 4 (empat) indikator untuk misi II, 6 (enam) indikator untuk misi III, 6 (enam) indikator untuk misi IV dan 3 (tiga) indikator untuk misi V.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									Kategori Capaian
			Capaian indicator \geq 100%		Capaian Indikator < 100%		Indikator < 100% Tetapi Lebih Tinggi Dibanding		Tidak Dapat Diukur (NA)		Rata-rata Capaian	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	%	
1.	Misi Pertama	2	1	50	0	0	0	0	1	50	100	Memuaskan
2.	Misi Kedua	4	3	75	1	25	0	0	0	0	96,66	Memuaskan
3.	Misi Ketiga	6	3	50	2	33,33	0	0	0	0	99,59	Memuaskan
4.	Misi Keempat	6	4	66,67	1	16,66	0	0	1	16,66	153,31	Memuaskan
5.	Misi Kelima	3	1	33,33	1	33,33	0	0	1	33,33	99,63	Memuaskan
Jumlah		21	12	57,14	5	23,81	0	0	3	14,29	109,84	Memuaskan

Selanjutnya analisis pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator pada tahun 2023 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar yang Menjamin Sistem Bermasyarakat dan Bernegara untuk Menghadapi Tantangan Global.

Pada misi pertama terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (50%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi pertama adalah:

Sasaran 1	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	100	N/A	N/A	N/A	100
	Rata-rata capaian Tahun 2023		N/A		

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data

Tidak didapat data realisasi capaian target mengenai indikator kinerja Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan untuk tahun 2023.

Sasaran 2	Terciptanya toleransi antar multikultur.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Indeks toleransi	B	B	100	V	B
	Rata-rata capaian Tahun 2023		100	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Indeks Toleransi

Indikator kinerja Indeks Toleransi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2023 masuk kategori B dengan target B juga. Indikator kinerja ini terealisasi 100% dari target atau dengan nilai capaian 100% dengan kategori Memuaskan (AA). Capaian indikator ini melalui program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama.

Toleransi merupakan prinsip utama dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mempraktekan prinsip-prinsip toleransi kepada sesama, kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih terjamin damai dan aman dengan minimnya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan dikalangan masyarakat. Toleransi menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan sebagai landasan sosial dan jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Isu intoleransi berkembang seiring dengan berjalannya proses demokratisasi di Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Kampar mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Kampar cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme ke agamaan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) disusun berdasarkan indikator penilaian seperti Toleransi, Kerjasama, dan Kesetaraan

Misi Kedua : Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat

Pada misi kedua terdapat 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (75%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (25%) tidak mencapai target tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kedua adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
-----------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
SAKIP	Nilai BB	Nilai B	90	^	Nilai BB
Opini BPK	WTP	WTP	100	V	WTP
	Rata-rata capaian Tahun 2023		95	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 95%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

SAKIP

Indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil

evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat B dengan nilai 62,55. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**”, yaitu Implementasi SAKIP sudah baik Pemerintah Daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

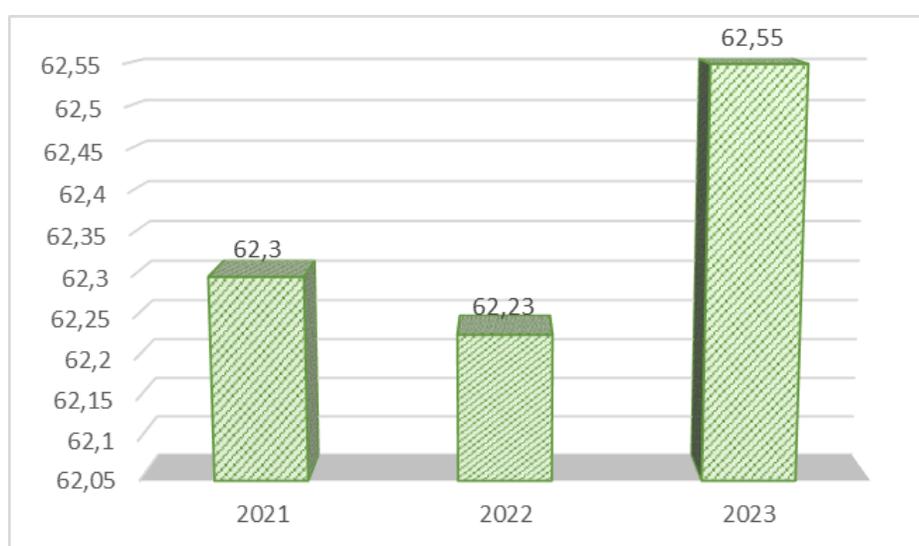
No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,09
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,56
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,61
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,29
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Penyajian Laporan Kinerja perlu ditingkatkan kualitas dengan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memberikan informasi yang memadai tentang strategi perbaikan kinerja kedepan.

Capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar dari tahun 2021 hingga 2023 secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.1

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2023



Opini BPK

Indikator kinerja Opini BPK terealisasi dengan capaian 100%. Sama dengan tahun sebelumnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Capaian opini tersebut diperoleh melalui meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah setiap tahun Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data, Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan Pemerintah Daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan Keputusan. Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
				Tidak	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,44	89,1	101,90	V	89,45
Indeks SPBE	C	B	100	V	
	Rata-rata capaian Tahun 2023		100,95	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100,95%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SKM Kabupaten Kampar Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 perangkat daerah yang melaporkan hasil SKM hanya 18 perangkat daerah. Tahun 2023 ini mengalami peningkatan menjadi seluruh perangkat daerah yaitu sebanyak 31 Badan/Dinas. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yaitu IKM: 89,1 (A) dengan catatan masih perlu dilengkapi dengan tindak lanjut dan hasil tindak lanjut. Catatan ini sudah diperbaiki dengan melaksanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil SKM dilaporkan lengkap beserta rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut periode berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87. Nilai IKM di lingkup Kabupaten Kampar menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2023.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 31 Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya. Artinya seluruh Perangkat daerah telah melaporkan hasil SKM di Kabupaten Kampar
3. Seluruh Perangkat daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terus memberi perhatian hal-hal yang merupakan prioritas pembenahan. Prioritas pembenahan yang direkomendasikan akan dilakukan hingga akhir tahun 2023 antara lain:

1. Perlu upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kualitas sarana prasarana dan prosedur, sistem dan mekanisme pelayanan publik.
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang memperbaiki perilaku petugas, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan petugas dapat lebih memperbaiki sikap dan perilaku.
3. Memperbaiki sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan

4. Memberikan informasi secara jelas kepada publik tentang persyaratan pelayanan publik yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah wahana informasi dan menempatkannya ditempat yang dapat dengan mudah dilihat sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh publik.

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kampar dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 3.2

Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2023



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

Indeks SPBE

Realisasi Indikator kinerja indeks SPBE tahun 2023 memperoleh predikat B dengan nilai 2,96. Bila dibandingkan dengan target, capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu predikat C. Capaian tahun ini naik atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada integrasi sistem. implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari Domain, Aspek, dan Indikator. Tiga domain diantaranya domain kebijakan, domain tata kelola, domain SPBE, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai. Kedua Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai dan ketiga Indikator, yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

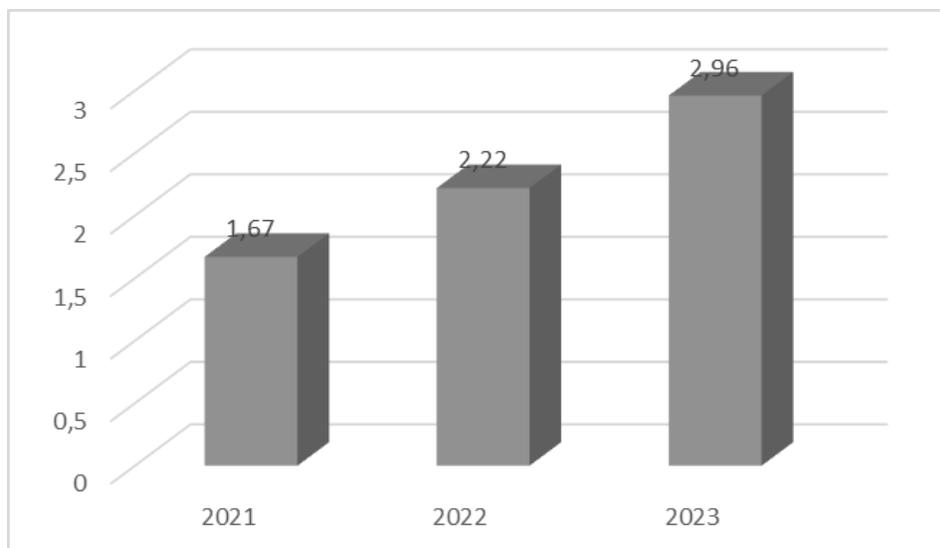
Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Ada tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.3

Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2023



Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan

Pada misi ketiga terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi ketiga adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai /		Target Akhir RPD
				Tidak		
Angka harapan hidup (tahun)	71,04%	71,42%	100,53	V		71,49
Rata-Rata Capaian Tahun 2023				100,53%		Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

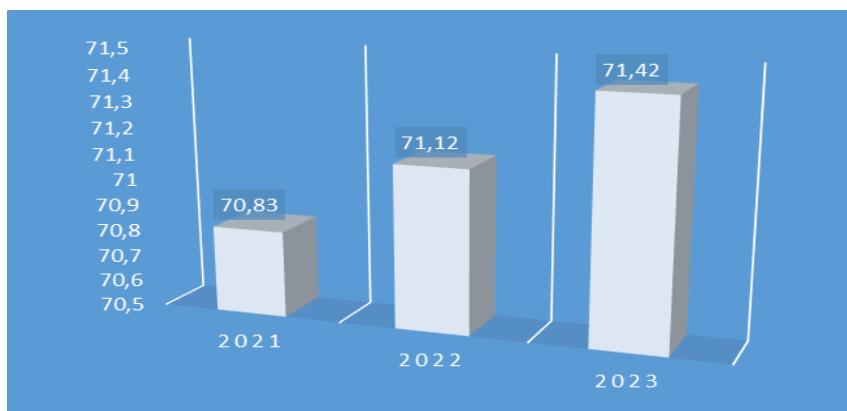
Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100,53%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup

Indikator kinerja angka harapan hidup untuk tahun 2023 terealisasi 71,42% dari target 71,04% dengan nilai capaian 100,53% dengan kategori Memuaskan (AA). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan. Capaian angka harapan hidup dari tahun 2021-2023 berturut-turut yaitu 70,83%, 71,12%, dan 71,42. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.4
Angka Harapan Hidup



Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan Pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,53	9,40	98,64	X	9,82
Harapan lama sekolah (tahun)	14,02%	13,60%	97,00%	X	14,40
Rata-Rata Capaian Tahun 2023				97,82%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 97,82%.

Penjelasan untuk indicator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Angka rata-rata lama sekolah

Diperoleh data bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah 9,40 Tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,40 tahun atau setara tamat kelas 9 SMP. Rumus Angka Rata-rata lama sekolah adalah:

$$ARLS = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas sedang sekolah atau sudah berijazah}}{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan}}$$

Angka rata-rata lama sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 9,53 tahun terealisasi sebesar 9,40 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi capaian kinerja indikator angka rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan.

Harapan lama sekolah

Realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2023 adalah 13,60% dari target sebesar 14,02% atau dengan capaian 97,00%. Ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian indicator kinerja harapan lama sekolah ini mengalami peningkatan.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Sasaran 3	Berkurangnya tingkat kriminalitas
-----------	-----------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Persentase pengurangan kriminalitas	-0,30%	-0,30%	100	V	3,09
Rata-Rata Capaian Tahun 2023				100	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran berkurangnya tingkat kriminalitas mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Pengurangan Kriminalitas

Indikator Persentase pengurangan kriminalitas terealisasi sebesar 100%. Tercapinya target ini karena adanya upaya untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas antara lain: pendidikan, ekonomi, dan agama. Hambatan dalam penanganan tingkat kriminalitas ini adalah tidak terdeteksinya ancaman kriminalitas.

Sasaran 4	Meningkatnya pengamalan agama
-----------	-------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Persentase indeks melek Al Quran (Kitab Suci)	68,45%	N/A	N/A	N/A	72,53
Rata-Rata Capaian Tahun 2023				N/A	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya pengamalan agama tidak didapat data realisasinya.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Indeks Melek Al-quran

Indikator Persentase indeks melek Al-quran Tahun 2023 tidak didapat data realisasi capaiannya

Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama	100%	100%	100	V	100
Rata-Rata Capaian Tahun 2023				100	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Agama

Indikator Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama Tahun 2023 terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk selalu memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana rumah ibadah.

Misi Keempat : Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, argo industri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan Pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Pada misi keempat terdapat 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (66,68%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,66%) tidak mencapai target;
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,66%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran terhadap misi keempat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Kontribusi PDRB sektor pertanian	34.27	33.93	99%	V	
2. Kontribusi PDRB sektor industri	34.13%	32.13%	94%	V	
3. Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	NA	NA	NA	NA	
Rata-Rata Capaian Tahun 2023					193% Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan peryumbuhan sektor unggulan daerah, ada yang tercapai dan masih ada yang

belum terelisasi karna tidak ada data nilai capaian 193% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa ke dua indikator kinerja mencapai target.

Kontribusi PDRB sektor Pertanian

Indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2023 yang telah ditargetkan berdasarkan RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Sasaran dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Sasaran dan Realisasi Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 dan perbandingan dengan tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023		
			Realisasi (Ton)	Porsentase (%)	Ket
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	Padi	22.069	18.741	59,95	
	Jagung	3.844	3.707	43,57	
	Cabe	1.575,60	1.354,45	92.01	
	Jeruk	10.003,20	6.917,74	81,31	
2.	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	69.59	62,97	100,00	
3.	Jumlah KK yang Menekuni Bidang Pertanian	46.750	42,642	100,00	

Pencapaian produksi tanaman pangan, palawija maupun hortikultura pada tahun 2023 sebagian komoditi tanaman sudah mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Produksi Padi

Produksi padi tahun 2023 sebesar 18.741 ton dan tercapainya dalah 59,95 %, ,bila dibandingkan dengan tahun 2022 produksi sebesar 22,069 ton dengan memiliki Terjadinya penurunan produksi padi tahun 2023 bila dibandingkan pada tahun 2022 disebabkan karena perubahan luas potensi lahan sawah dan juga alih Fungsi lahan.

2. Produksi Jagung

Produksi jagung pada tahun 2023 sebesar 3.707 ton atau tercapai sebesar 43,57 % bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3.844 ton. Terjadinya penurunan produksi jagung pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 disebabkan berkurangnya minat petani untuk menanam jagung serta susahnya pemasaran jagung pipilan.

3. Cabe

Produksi cabe tahun 2023 tercapai sebesar 1.354,45 ton atau tercapai sebesar 92.01 % bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.575,60 ton. Meningkatnya produksi cabe tahun 2023 dikarenakan tanaman cabe petani baik melalui swadaya maupun program pengembangan APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

4. Jeruk

Produksi jeruk tahun 2023 tercapai sebesar 6,917,74 ton atau tercapai sebesar 44,63 % bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 10.003,20 ton. Terjadinya penurunan produksi jeruk tahun 2023 disebabkan kurangnya program dari pemerintah baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN sehingga petani yang menanam jeruk berkurang dan alih Fungsi lahan

Kontribusi PDRB Sektor Industri

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024 terealisasi sebanyak 94% dari target 34.13%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan yaitu: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui 5 (lima) subkegiatan telah ditargetkan di Tahun 2023, dengan jumlah dana Rp. 2.341.144.350.- dan telah terlaksana dicapai 100%.

Kontribusi PDRB sektor Pariwisata

Belum ada data belum selesai dihitung, baru akan dipublish bulan April 2024.

Sasaran 2	Meningkatnya investasi daerah.
-----------	--------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD	
1. Pertumbuhan investasi	3.240.000	10.853.507.220.000	335%	V		
Rata-Rata Capaian Tahun 2023					335	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Investasi Daerah dengan nilai capaian 335% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi indikator kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator kinerja mencapai target yang memuaskan.

Meningkatnya Investasi Daerah dengan nilai capaian 335% dengan kategori Sangat Memuaskan. Hal ini disebabkan karena banyaknya Perusahaan Perkebunan sawit yang melakukan replanting mengganti tanaman sawit yang sudah tidak produktif/ ekonomis lagi (>25 tahun) atau produktivitas yang rendah (<10 ton TBS/ha/tahun) sehingga meningkatnya nilai Investasi.

Sasaran 3	Menurunnya TPT
------------------	-----------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD		
1. Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	3.99%	3.38%	84%	V			
Rata-Rata Capaian Tahun 2022					84%	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Menurunnya TPT dengan nilai capaian 84% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi indikator kinerja selama tahun 2023 menunjukkan indikator kinerja mencapai target yang memuaskan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra untuk tahun 2023.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) Subkegiatan, sesuai dengan tolak ukur Renstra, dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.589.400.050.-, dari 15 subkegiatan masing- masing terlaksana 100 %.

Sasaran 4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
------------------	--------------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD		
1. Persentase penurunan Tingkat Kemiskinan	-3,96	0,08	1,25%	X			
Rata-Rata Capaian Tahun 2023					1,25%	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan dengan nilai capaian 1,25% dengan kategori Tidak Memuaskan (C). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak mencapai target yang tidak memuaskan.

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang asing bagi perekonomian Indonesia. Uniknya, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan setelah adanya krisis moneter 1998. kalau dibandingkan antara era reformasi dan saat ini, selisihnya cukup banyak. untuk menilai apakah kemiskinan menurun, kita tidak bisa terpaku pada definisi menurut BPS saja, namun juga perlu meninjau fakta dilapangan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan (kemiskinan struktural), yakni:

1. Pola pikir atau mindset yang keliru

Sebagian besar penduduk miskin Indonesia cenderung pasrah dan terima nasib atas apa yang terjadi. Mereka menganggap bahwa kemiskinan yang menyimpannya itu ialah takdir, padahal masih bisa dirubah jika ada usaha.

2. Sulitnya akses pendidikan

Sulitnya mendapat pendidikan yang berkualitas juga merupakan faktor fundamental. Mereka yang terlahir dari keluarga miskin, sebagian besar hanya mampu sekolah ditempat yang akreditasinya rendah, yang mana kualitas dan fasilitas yang didapat pun berbeda dengan sekolah yang akreditasinya tinggi, khususnya diperkotaan. Selain itu, pergaulan yang tidak sehat juga sering terjadi pada sekolah dengan akreditasi rendah, seperti *bullying*, tawuran, dan lain-lain

3. Keterbatasan akses sumberdaya

Mereka yang berkecukupan, mampu membeli aset dengan bunga cicilan yang rendah. Sedangkan mereka yang miskin, untuk membeli aset, harus menyicil selama bertahun-tahun, yang apabila ditotal, bunga yang dibayar hampir setara dengan harga asetnya.

Ketiga faktor diatas yang dapat menghambat seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan semakin memperparah kesenjangan di masyarakat. Kemiskinan struktural ini juga tercermin pada indeks kesenjangan ekonomi yang disebut ratio gini berikut merupakan solusi yang dapat meminimalisir kesenjangan:

1. Sistem pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia masih perlu dievaluasi dan dikembangkan. Akan lebih baik lagi jika pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan disekolah, atau penambahan wawasan terkait bidang keuangan yang nantinya pasti berguna bagi peserta didik.

2. Pendidikan karyawan

Pemerintah sudah seharusnya menyediakan pelatihan-pelatihan bagi karyawan.

3. PKH (Program Keluarga Harapan)

Seperti yang kita ketahui, pada Program Keluarga Harapan, terdapat pelatihan bagi mereka yang ingin memulai usaha. Namun sepertinya hal ini belum optimal, dilihat dari banyaknya usaha yang belum lama buka namun sudah harus gulung tikar. Akan lebih baik lagi jika pelatihan ini dilakukan semaksimal mungkin dengan menambah wawasan dan keterampilan usaha.

Misi Kelima : Mewujudkan Pembangunan Kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan

Pada misi kelima terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 3 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) mencapai atau melebihi target;
3. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kelima adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,42	76,61	95,27	X	95,10
	Rata-rata capaian Tahun 2023		95,27	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai hasil 95,27% dengan kategori memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target untuk tahun 2023 adalah 80,42% dengan hasil yang hanya mencapai sebesar 76,61%. Hal ini mendapat capaian persentase sebesar 95,27%. Adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam mencapai sasaran ini adalah seperti belum memadainya kompetensi Sumber Daya Manusia untuk pengadaan tanah yang disebabkan terbatasnya regulasi, sosialisasi, seminar, workshop dan bimbingan teknis terkait pengadaan tanah terutama pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan umum. Selain itu, belum terbentuknya kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, minimnya data dan informasi terkait tata ruang wilayah, dan terbatasnya forum-forum diskusi sehingga sulit meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang tanah.

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar mengoptimalkan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan, dalam Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah dianggarkan sebesar 3.004.173.300,00 dengan persentase anggaran 0,94%.

Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi
------------------	--

a dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Persentase peningkatan pelayanan transportasi	60,04	62,6	104	V	100
	Rata-rata capaian Tahun 2023		104	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase peningkatan pelayanan transportasi mencapai hasil 104% dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase peningkatan pelayanan transportasi

Dalam pelaksanaan tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menemukan beberapa kondisi yang memberi dampak hambatan/ kendala dalam pencapaian target seperti pelayanan penguji kendaraan bermotor yang terganggu akibat adanya akreditasi dan kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Walaupun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendukung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor dan memaksimalkan setiap pelayanan yang ada di terminal agar selalu tercapainya target kinerja.

Dari data realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berjalan dengan baik dengan penyerapan anggaran sebesar 99,50% atau senilai dengan Rp. 34.478.328.975.

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Hasil 2023	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
				Tidak	
Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e)	35.940,55	N/A	N/A	N/A	100
	Rata-rata capaian Tahun 2023		N/A	N/A	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian indikator Penurunan Emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e) ini tidak bisa dihitung karena kegiatan ini belum pernah dilaksanakan dan juga belum adanya dana yang tersedia. Untuk menghitung indikator ini bisa melalui 4 sektor yaitu: sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan limbah tetapi memerlukan dana yang sangat besar untuk menghitungnya. Selain itu untuk menghitung target, perlu baseline selama 3 tahun terakhir.

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Target kinerja keuangan secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 2.805.811.127.502,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.734.805.625.683,08 atau mencapai 97,47 persen. Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
I	PENDAPATAN	2.805.811.127.502,00	2.734.805.625.683,08	97,47	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	285.540.731.945,00	298.626.546.420,08	104,58	260.225.610.592,71
	Pendapatan Pajak Daerah	156.820.690.967,00	153.800.441.758,00	98,07	142.366.052.600,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	13.505.450.000,00	12.315.324.270,00	91,19	8.917.742.152,31
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815,00	36.299.309.804,00	155,97	23.550.128.300,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.941.282.163,00	96.211.470.588,08	104,64	85.391.687.540,40
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.518.170.395.557,00	2.434.058.392.989,00	96,66	2.165.922.257.436,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.270.991.417,00	2.133.499.528.840,00	96,05	220.298.670.324,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	296.899.404.140,00	300.558.864.149,00	101,23	180.695.925.247,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	1.360.712.174,00
	Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,99	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.805.811.127.502,00	2.734.805.625.683,08	97,47	2.427.503.585.552,71

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Anggaran sebesar Rp. **298.626.546.420,08** dari Rp. **285.540.731.945,00** atau mencapai **104,58%**, sementara realisasi yang tertinggi bersumber dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari anggaran sebesar Rp. 23.273.308.815,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.299.309.804,00 dengan persentase sebesar 155,97% selanjutnya realisasi terendah yaitu dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.505.450.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 12.315.324.270,00 dengan kata lain sebesar 91,19 %.

2. Permasalahan dan solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum pokok permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada pajak daerah;
- 2) Dana perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat;
- 3) Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- 4) Porsi PAD terhadap total pendapatan masih rendah dan belum optimal;
- 5) Adanya perubahan kewenangan terkait Pajak Asli Daerah;
- 6) Belum optimalnya penegakan peraturan tentang Pajak Asli Daerah;
- 7) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Asli Daerah;
- 8) Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum dapat digali.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, berikut upaya-upaya pemecahan masalah adalah:

- 1) Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah;
- 2) Membangun program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan pendapatan sebagai penunjang bagi pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tepat sasaran;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 5) Perlu dilaksanakan mapping potensi retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada;
- 6) Perlu dioptimalkan pengelolaan BUMD dengan meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada;
- 7) Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

disamping penerapan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

3. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.619.085.368.819,00 atau 92,65 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.826.856.579.502,00 dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp. 207.771.210.683,00. Realisasi belanja Tahun 2023 lebih besar bila dibanding dengan realisasi belanja pada tahun 2022. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

URAIAN REKENING	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI 2022
	ANGGARAN	REALISASI	%	
BELANJA DAERAH	2.826.856.579.502,00	2.619.085.368.819,00	92,65	2.480.592.185.573,96
BELANJA OPERASI	2.047.129.480.192,00	1.900.788.573.608,50	92,85	1.818.618.607.702,14
Belanja Pegawai	1.020.218.954.429,00	936.576.698.454,00	91,79	963.391.408.176,00
Belanja Barang dan Jasa	910.545.958.029,00	849.562.750.223,45	93,30	787.240.777.384,22
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18	436.450.000,00
Belanja Hibah	103.269.017.734,00	102.175.874.903,05	98,94	47.872.957.141,92
Belanja Bantuan Sosial	12.545.550.000,00	12.351.250.028,00	98,45	19.677.015.000,00
BELANJA MODAL	384.479.758.418,00	324.522.994.637,50	84,41	281.509.813.581,82
Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.228.102.376,00	54.246.432.888,50	91,59	80.023.194.214,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.376.516.079,00	55.491.835.674,00	82,36	64.626.802.305,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.693.872.952,00	200.185.637.334,00	82,48	127.694.277.285,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.821.693.011,00	13.242.462.641,00	95,81	8.660.421.281,00
Belanja Modal Aset Lainnya	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
BELANJA TRANSFER	393.799.121.092,00	393.707.154.991,00	99,98	379.617.643.340,00
Belanja Bagi Hasil	16.813.266.012,00	16.808.319.340,00	99,97	10.423.785.747,00
Belanja Bantuan Keuangan	376.985.855.080,00	376.898.835.651,00	99,98	369.193.857.593,00
SURPLUS/DEFISIT	(21.045.452.000,00)	115.720.256.864,08	4,82	(53.088.600.021,2)
PEMBIAYAAN DAERAH	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21
Penggunaan SILPA				74.859.762.812,21
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				0,00
Pembiayaan Netto	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal.

Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 21.045.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.771.162.790,96 (103,45%), dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 21.045.452.000,00 dengan realisasi Rp. 21.771.162.790,96 (103,45%), perolehan penerimaan pembiayaan ini didapat dari Pembiayaan Netto.

1. Permasalahan dan Solusi

Walaupun Realisasi belanja daerah telah mencapai 92,53% akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah sepanjang tahun 2023, antara lain:

- 1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan asset daerah;
- 2) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas bulan). Hal ini disebabkan masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah;
- 3) Realisasi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatalan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, di prioritaskan kegiatan dengan skala layanan dan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- 4) Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang proses pengerjaannya terlambat karena Proses administrasi pelelangan, kondisi iklim/cuaca dan kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian beberapa kegiatan.

3.1.3 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/ Urusan Penunjang/ Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang dihadapi serta Solusi Pemecahannya

A Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
I	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase Guru SD Berkualifikasi	88,01%
		2 Persentase Guru SMP Berkualifikasi	96,19%
		3 Persentase Guru PAUD Berkualifikasi	63,53%
		4 Persentase Guru SD Bersertifikasi	46,00%
		5 Persentase Guru SMP Bersertifikasi	67,91%
		6 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SD	70
		7 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SMP	70
		8 Rasio Guru terhadap Siswa SD	1 : 16 Orang
		9 Rasio Guru terhadap Siswa SMP	1 : 10 Orang
II	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan pendidikan	1 Persentase SMP Berakreditasi	100%
		2 Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100%
		3 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87%
III	Meningkatnya Kualitas lulusan SD/SMP	1 Rata-rata Nilai UN SD	79,94
		2 Rata-rata Nilai UN SMP	80,77
		3 Angka Putus Sekolah SD	0,44%
		4 Angka Putus Sekolah SMP	1,26%
		5 Persentase Kelulusan SD	100,00%
		6 Persentase Kelulusan SMP	100,00%
		7 APM SD	97,80%
		8 APM SMP	84,64%
IV	Meningkatnya Pendidikan Kesetaraan	1 Persentase PKBM Berakreditasi	98,00%
		2 Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi	85,00%
V	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berstandar	1 Persentase SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas	85,55%
		2 Persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi Baik	65,64%
		3 Persentase Ruang Kelas SMP dengan kondisi Baik	71,29%

VI	Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat	1	APK SD	98,90%
		2	APK SMP	89,80%
		3	APK PAUD	90,50%
		4	Rata-rata Lama Sekolah	9,65 Tahun
		5	Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang Sekolah lulus sampai SMP	85,00%

Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 577.897.149.258,00	DANA APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 279.960.515.243,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp 564.865.600,00	DANA APBD
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 109.869.800,00	DANA APBD
JUMLAH		Rp 858.664.210.401,00	

➤ **Permasalahan :**

1. Masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.
2. Masih kurangnya aparatur yang Profesional
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan.
4. Masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan.
5. Masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan luar biasa.

➤ **Solusi :**

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri melalui pendidikan gratis secara menyeluruh dan pemerataan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Kegiatan belajar mengajar.
2. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan administrasi baik dari segi penyelenggaraan kegiatan, keuangan dan perencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ingin di targetkan.

3. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik untuk mengikuti Pelatihan-pelatihan, bimtek Peningkatan mutu sesuai dengan perkembangan teknologi.
4. Perlunya peningkatan sistem manajemen yang berbasis IT dan lebih menintensifkan sistem pengawasan di Sekolah.
5. Perlunya inventarisasi secara detail peninggalan situs budaya dan promosi kepariwisataan.
6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber dari pendapatan sah lainnya yang tidak mengikuti.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Cakupan fasilitas kesehatan yang terstandarisasi	100%
2	Menurunkan angka kematian dan kesakitan	Angka kematian ibu	98/100000 kelahiran hidup
		Angka kematian bayi	20/1000 kelahiran hidup
		Cakupan kesakitan yang disebabkan penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, ODGJ)	100%
		Cakupan Kesakitan Yang Disebabkan Penyakit Menular (TB)	100%
		Persentase Pendudukan Dengan Akses Sanitasi Layak	90%

Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 479.214.165	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 105.758.009.459	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 11.933.070	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 517.063.643	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.157.022.070	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 414.519.900	APBD
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 26.208.961.441	APBN
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan	Rp. 29.657.296.017	APBD dan APBN

9	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.581.459.068	APBD dan APBN
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp. 241.199.707	APBD
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.999.515	APBD
12	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 45.174.000	APBD
13	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKM Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 10.211.015.181	APBD
14	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 73.930.100	APBD
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Rp. 118.433.000	APBD
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 17.594.128	APBD
17	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp. 106.840.000	APBD
18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 181.462.200	APBD
19	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 141.204.986	APBD
20	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.806.198	APBD

Program Rumah Sakit Umum Bangkinang Tahun 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105.349.282.222,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.160.104.503,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	13.738.581.864,00

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
 - Sasaran program menggunakan sasaran estimasi tidak sasaran reel.
 - Masih kurang optimalnya penjangkauan laporan di faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.
 - Permasalahan di wilayah Perusahaan yang sasaran penduduk yang sudah terdata pulang ke kampungnya.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :
 - Masih ada Persalinan yang belum difaskesnya.
 - Ibu bersalin yang melahirkan di daerah lain sehingga tidak terdata Sasaran program menggunakan sasaran estimasi.
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :
 - Sasaran program menggunakan sasaran estimasi Kunjungan neonatus lengkap yang masih rendah karena masih banyaknya ibu yang melakukan persalinan di tempat yang berbeda.
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita :
 - Pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan yang belum maksimal sehingga laporan bulanan yang belum pas.
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :
 - Belum adanya pelatihan dalam pelaksanaan homecare terhadap lansia sehingga masih ada lansia yang tidak mandiri belum bisa menghadiri posyandu lansia.
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :
 - Belum maksimalnya Alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini hipertensi.
 - Belum semua puskesmas memiliki data yang valid tentang jumlah penderita diabetes melitus.
 - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, Gizi, PIS-PK.
 - Kurangnya Kerjasama lintas sektor terkait Kurangnya kepedulian dan tidak adanya dukungan dari keluarga untuk pasien hipertensi.
 - Belum semua Desa mengalokasikan dana untuk Pembelian Logistik BMHP dan Honor Kader sebagai penunjang kegiatan skrining PTM di POSBINDU PTM.
 - Pengelola program PTM terlatih di puskesmas sering berganti.
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus:
 - Belum maksimalnya alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini diabetes melitus.

- Belum semua puskesmas memiliki data yang valid tentang jumlah penderita diabetes melitus.
 - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, Gizi, PIS-PK.
 - Kurangnya Kerjasama lintas sector
 - Kurangnya kepedulian dan tidak adanya dukungan dari keluarga untuk pasien Diabetes Melitus.
 - Belum semua desa mengalokasikan dana untuk Honor Kader sebagai penunjang kegiatan skrining PTM di POSBINDU PTM
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat :
- Belum maksimalnya alokasi dana untuk kegiatan skrining dan deteksi dini GME dan gangguan jiwa
 - Belum maksimalnya koordinasi dengan lintas program terkait seperti promkes, dan PIS-PK
 - Belum semua Desa mengalokasikan dana untuk Honor Kader jiwa
 - Puskesmas yang telah pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa belum mengaktifkan poli jiwanya untuk mendeteksi dini GME dan pasien dengan gangguan jiwa
 - Rendahnya kepedulian masyarakat dan lintas sector terkait baik di Kecamatan dan Desa untuk pendataan dan pengobatan pasien ODGJ
 - Sebagian besar keluarga pasien ODGJ malu dan kurang/tidak peduli dengan pengobatan pasien ODGJ
 - Pengelola program keswa terlatih di puskesmas sering berganti.
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis :
- Keterlibatan Pemda Kurang dalam Program TB, Karena selama ini program TB di dukung oleh anggaran dana Hibah GF (Global Found)

SOLUSI :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
 - Memperkuat pencatatan pelaporan untuk menjaring ibu hamil sehingga terdata by name by address
 - Penguatan koordinasi lintas sektor
 - Meningkatkan penyuluhan tentang atau pemeriksaan kesehatan ibu hamil untuk pemeriksaan asecara lengkap
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :
 - Penyuluhan secara optimal tentang persalinan di fasyankes
 - Penguatan koordinasi pencatatan dan pelaporan

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :
 - Melakukan pemantauan kunjungan neonates lengkap sehingga tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita :
 - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemahaman pencatatan dan pelaporan
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :
 - Adanya homecare dan pelatihan
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :
 - Mengaktifkan kembali Pelayanan Pandu PTM di setiap Posbindu/ Desa
 - Mengusulkan Kembali alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini hipertensi
 - Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan ke Masyarakat melalui lintas program di Puskesmas
 - Peningkatan kunjungan rumah ke pasien hipertensi
 - Peningkatan edukasi melalui pendekatan keluarga untuk penderita hipertensi
 - Mengadvokasi puskesmas untuk meningkat Kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait
 - Mengadvokasi pihak desa dalam penggunaan dana desa untuk pembelian logistik dan BMPH kegiatan di Posbindu PTM
 - Mengadvokasi puskesmas tidak mengganti pengelola program PTM terlatih minimal 3 tahun.
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus:
 - Mengaktifkan kembali pelayanan Pandu PTM di setiap Posbindu/Desa
 - Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan ke Masyarakat melalui lintas program di Puskesmas
 - Peningkatan kunjungan rumah ke pasien Diabetes Melitus
 - Peningkatan edukasi melalui pendekatan keluarga untuk pasien Diabetes Melitus
 - Mengusulkan Kembali alokasi dana untuk kegiatan skrining PTM dan deteksi dini diabetes melitus
 - Mengadvokasi puskesmas untuk meningkat Kerjasama lintas program dan lintas sector terkait
 - Mengadvokasi pihak desa dalam penggunaan dana desa untuk pembelian logistik dan BMPH kegiatan di Posbindu PTM
 - Mengadvokasi puskesmas tidak mengganti pengelola program PTM terlatih minimal 3 tahun.

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat :

- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan pengetahuan mengenai GME dan keswa ke Masyarakat melalui lintas program di Puskesmas
- Peningkatan kunjungan rumah ke pasien ODGJ dan pasung
- Peningkatan edukasi melalui pendekatan keluarga dalam hal kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ dan pasung
- Mengusulkan Kembali alokasi dana untuk kegiatan keswa dan deteksi dini GME serta ODGJ
- Mengadvokasi puskesmas untuk meningkat Kerjasama lintas sektor terkait
- Mengadvokasi puskesmas tidak

9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis :

- Mohon Keterlibatan dari Pemda agar dapatnya dukungan anggaran

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap(%)	65,28
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	58,75
		Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	75,45
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Bangunan gedung Pemerintah Dalam Kondisi Layak (%)	86,75
3	Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	87,77

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.495.419.526,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	6.039.381.100,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	2.625.760.000,00

	Penyediaan Air Minum	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air limbah	3.402.465.000,00
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14.423.009.367,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	56.007.779.821,00
7	Program Penyelenggaraan, Jalan	210.504.312.331,00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.004.172.300,00
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.335.451.000,00
10	Program Pengelolaan Tanah Kosong	322.423.400,00
11	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	150.221.700,00
	JUMLAH	315.310.395.545,00

➤ **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam menjalankan program kinerjanya antara lain :

1. Anggaran untuk infrastruktur masih terbatas apabila dibandingkan dengan banyaknya cakupan wilayah kerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur baik jalan maupun jembatan.
2. Belum Lengkapnya Data dan Informasi Terkait Tata Ruang Wilayah.
3. Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop terkait Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Tanah.
4. Banyaknya jumlah alat berat yang sudah tidak layak jalan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.
5. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (pegawai) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

➤ **Solusi**

1. Penambahan anggaran infrastruktur
2. Perlu adanya pemutakhiran data dan informasi terkait Tata Ruang Wilayah
3. Perlu digalakkannya Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop terkait Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Tanah.

4. Perlu adanya pengadaan alat berat guna menunjang kegiatan pembangunan di Dinas PUPR Kampar
5. Diadakannya penambahan kuota pegawai (PNS) di lingkungan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Lingkungan Sehat Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kab/ Kota yang ditangani	0,59 %
2	Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	0,65 %
		Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	46, 87%
3	Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	42,78%

Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.436.054.178,00
2	Program Pengembangan Perumahan	865.153.400,00
3	Program Kawasan Permukiman	664.056.750,00
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.806.552.100,00
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	27.459.205.889,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	202.567.100,00

➤ Permasalahan dan Solusi

Berbagai permasalahan maupun isu-isu dan Solusi yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar antara lain :

1. Terbatasnya dana untuk bedah rumah
2. Masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau
3. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
4. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas Pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan Pemukiman;
5. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
6. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
7. Melaksanakan Tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	B
2	Meningkatkannya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%
3	Meningkatkan perurangan kasus ketentraman ketertiban dan Keindahan (K3)	Persentase kasus K3 yang tertangani	100%
4	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%
5	Meningkatkannya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100%
6	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100%

Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,664,535,308
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,499,400
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,499,400
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,677,326,249

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,673,826,849
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	3,499,400
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470,187,850
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,537,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,108,300
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164,760,000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	11,557,550
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,483,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237,742,000
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,881,950,984
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,967,880
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,848,983,104
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601,570,825
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,236,975
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468,706,650
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,627,200
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	20,000,000
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,752,585,550
1	Panganangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,752,585,550
1	Pencegah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	803,185,000
2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	660,541,000
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	84,977,400
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	188,882,150
5	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	15,000,000
	Total Anggaran	14,417,120,858

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah / hambatan :**

Beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yakni :

- b. Kurangnya Fasilitas pendukung baik secara fisik maupun sumber daya manusia;
- c. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal peraturan daerah, keputusan kepala daerah terutama koordinasi perkara yang ditangani oleh PPNS yang notabene sebagai penyidik beberapa kasus terutama pelanggaran yang dilakukan perorangan, badan hukum dan objek hukum lainnya;
- d. Masalah anggaran dirasa sangat kurang, mengingat semua kegiatan berada di lapangan;

❖ **Solusi :**

Agar kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dapat dilaksanakan secara lebih maksimal, disarankan untuk menambah jumlah anggota dan sarana penunjang pengamanan yang standar.

- 1. Pengalokasian anggaran secara Proposional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar;
- 2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas operasional;
- 3. Menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai PP No. 16 Tahun 2018;
- 4. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan, Pelatihan serta Kursus-kursus teknis dan fungsional seperti , Pelatihan PPNS, Pelatihan Intelejen dan Pelatihan Diksar.

❖ **Masalah / hambatan :**

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Tim YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar antara lain :

- 1. Masih rendahnya jumlah personil PPNS dan terbatasnya kemampuan penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar;
- 2. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Kab. Kampar;
- 3. Terbatasnya sarana dan Prasarana untuk penunjang Kegiatan Operasional Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Ka. Kampar.

❖ **Solusi / Saran:**

1. Agar dilakukan penambahan personil Penyidik PPNS;
2. Peningkatan kemampuan Teknis PPNS melalui Kegiatan Bimtek;
3. Agar ditingkatkan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Kab. Kampar; Agar dilengkapi sarana dan prasarana untuk penunjang Kegiatan Operasional Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Ka. Kampar.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGULANGAN BENCANA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	- Nilai Sakip	B
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat	- Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100%
		- Indeks resiko bencana (IRB)	Sedang (72-66)
3	Meningkatnya sinergitas penanggulangan bencana	- Penurunan indeks resiko bencana (IRB) Kabupaten Kampar	Sedang (72-66)
		- Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Rendah (0,31-0,5)
4	Meningkatkan Kewaspadaan akan Kerawanan Bencana Alam	- Peningkatan Jumlah Desa Desa Tangguh Bencana	9 Desa
		- Persentase Kemampuan tentang kebencanaan	85%
		- Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	94%
5	Penanganan Darurat Bencana yang Responsif disertai Dukungan Logistik dan Peralatan	- Persentase Penanganan Darurat Bencana	89%

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah</i>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.981.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	38.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	7.170.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	7.170.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.170.000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.163.265.886	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.367.800	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.481.000	
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	123.209.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.920.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.312.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	522.732.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.028.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.982.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.774.965.269	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.609.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.712.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.798.400	
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	484.048.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	236.784.500	
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	212.563.200	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	138.580.250	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	3.824.156.765	
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	238.256.000	

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	255.567.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	320.592.000	
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	98.446.350	
TOTAL		13.734.669.470	

❖ **Masalah / hambatan :**

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kampar antara lain :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam Penanggulangan Bencana baik dari sisi administrasi maupun lapangan
2. Terbatasnya peralatan dalam penanganan bencana

❖ **Solusi :**

1. Menganggarkan biaya untuk pelatihan personil untuk penanganan bencana;
2. mengutus personil untuk mengikuti pelatihan penanganan bencana baik itu di provinsi maupun pusat;
3. Mengajukan usulan peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana.

❖ **Saran:**

1. Agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia dan pembelian pengadaan peralatan dilingkungan BPBD Kab. Kampar.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan respons timerate (tingkat waktu tanggap) bencana kebakaran bangunan 15 menit di Kabupaten Kampar	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %
		Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakarandan penyelamatan	100 %
		Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan penyelamatan	100%

Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

NO	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	337.636.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	14.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	11.333.970	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	15.257.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	15.027.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.250.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.850.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.396.157.465	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.786.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.956.000	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.892.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.452.760	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	128.115.000	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.653.220	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.897.680	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.569.570	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	425.465.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	178.941.780	
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	150.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	318.356.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.156.300	
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Mebel		115.067.040	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		264.593.550	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.029.120	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.648.555.141	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.903.900	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.421.325.100	
	Pemeliharaan Mebel	5.061.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.760.000	
9	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota		
	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.184.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.354.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	31.480.000	
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.893.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.281.650	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	506.863.060	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	440.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	31.181.500	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	16.000.000	
10	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	30.183.000	
	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	27.200.000	
11	Investigasi Kejadian Kebakaran		
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	34.817.000	
12	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	277.304.000	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	36.694.100	
13	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	32.664.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	25.516.660	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	179.862.900	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	40.000.000	
	TOTAL	18.216.702.766	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat atau masih banyak indikator kinerja yang berorientasi pada output kegiatan, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya;
2. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan, hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar

❖ **Solusi :**

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, khususnya yang berhubungan dengan kebencanaan;
2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar melalui koordinasi internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar;
3. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	
		URAIAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Dokumen
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di Kecamatan	Meningkatnya SDM dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kampar	21 Orang TKSK dan 1 Orang Korda
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Kecamatan	Meningkatnya SDM dan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Kampar	57 Orang di 21 Kecamatan
4	Korkab, Korcam, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya SDM dan Kinerja Korkab, Korcam, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	115 Orang Pendamping dan Operator PKH
5	Lembaga Lembaga Sosial yang Melaksanakan Pelayanan terhadap PMKS	Meningkatnya Kinerja Lembaga Lembaga Sosial yang Menangani PMKS di Kabupaten Kampar (SLRT, Puskessos, Vetran, Perlansia, KKKS, dan Pepabri)	7 Lembaga Sosial
6	Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peralatan Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma di Kabupaten Kampar (Kaki Palsu, Tangan Palsu, Kursi Roda, dan Hearing Head)	27 Orang Penyandang Disabilitas
7	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kesiagaan dan Penanganan Sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODGJ, Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandangan, Warga Binaan, Napza, dan PMKS Lainnya	39 Orang PPKS
8	Data DTKS Skala Kabupaten	Terkelolanya Data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	1 Dokumen Data DTKS
9	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan (BSP)	21 Kecamatan
10	KUBE - FM, UEP Lansia Produktif dan UEP bagi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kampar melalui Bantuan Kelompok Usaha Bersama bagi Fakir Miskin (KUBE-FM) , Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif (UEP Lansia) dan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas (UEP Penyandang Disabilitas)	11 Orang UEP Disabilitas, dan 21 Orang UEP Lansia Produktif
11	Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan	72 Orang

	(Tagana Kabupaten Kampar)	Bencana Sosial oleh Anggota Tagana Kabupaten Kampar serta Peningkatan SDM Anggota Tagana Kabupaten Kampar dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Relawan Tagana Kabupaten Kampar
12	Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi korban bencana di kabupaten kampar	1 Tahun Anggaran
13	Pengusulan Pahlawan Daerah Menjadi Pahlawan Nasional	Terlaksananya Pengusulan Pahlawan Daerah Mahmud Marzuki menjadi Pahlawan Nasional	1 Orang Pahlawan
14	Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia dan Makam Panglima Khatib Simpang Kubu	3 Lokasi Pemakaman

Program Dinas Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN / KOTA	8,274.360.944	
a	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.874.750	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.375.633.072	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	954.329.000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.413.786.000	
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.138.504.922	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.203.200	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.226.619.450	
a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	3.226.619.450	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.424.486.800	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.112.158.900	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	312.327.900	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	682.453.580	

a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	682.453.580	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	790.110.000	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	125.205.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	664.905.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	683.917600	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional / Kabupaten / Kota	683.917600	
	JUMLAH	15.081.948.374	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang di Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota tidak di cairkan karena masih ada permakanaan dan sandang buffer stock dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Riau.

B Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Penja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1	MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA	RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN	66%

Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.493.830.392	
2.	Penempatan Tenaga Kerja	170.350.094	
	TOTAL	1.664.180.486	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Sarana dan Prasarana Peruntukan Industri belum terbangun seluruhnya;
2. Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya manusia di Sektor Industri Masih terbatas;
3. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam;
4. Tingkat angka pengangguran;
5. Rendahnya keterampilan Tenaga Kerja;
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan;
7. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

❖ **Solusi :**

1. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana;
2. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pencari kerja sehingga pencari kerja mendapatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang baik.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Penja Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	A	Program Pengurusantamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			1. Terlaksananya Pelatihan PPRG Bagi Perencanaan SKPD Dan Pendampingan Penyusunan ARG	36 orang
			2. Tercapainya Sosialisasi perempuan Berpolitik	50 orang
			3. Terpenuhinya Pendidikan Dan Keterampilan Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Dan Menciptakan Kesempatan Kerja Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga	21 orang

			4. Terpenuhinya Pendidikan Dan Keterampilan Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Dan Menciptakan Kesempatan Kerja Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga	21 orang
		B	Program Perlindungan Perempuan	
			1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 kegiatan
			2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Berbagai Perlakuan Yang Salah	11 desa
		C	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			1. Berkembangnya Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Dalam Bidang Usaha Merajut Di Kabupaten Kampar Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga	5 keluarga
			2. Terlaksananya Pembinaan Peran Dan Partisipasi Perempuan Untuk Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Dalam Mensejahterakan Keluarga	1 Kegiatan
			3. Terlaksananya Pembinaan Peran Dan Partisipasi Perempuan Untuk Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Dalam Mensejahterakan Keluarga	1 Kegiatan
		D	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
			1. Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan
		E	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			1. Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi hak anak-anak	21 FAN
			2. Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi hak anak-anak	21 FAN
			3. Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi hak anak-anak	21 FAN
		F	Program Perlindungan Khusus Anak	
			1. Terlindunginya perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	80 orang
			2. Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak	10 desa
			3. Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak	10 desa
			4. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang	1 kegiatan

**Program Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tahun 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	317.078.550	
2.	Program perlindungan perempuan	185.956.350	
3.	Program peningkatan kualitas keluarga	3.936.0088.556	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	54.523.450	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	639.496.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	849.701.950	
	TOTAL	5.982.773.866	

➤ **Permasalahan yang ditemukan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak antara lain :**

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Perencanaan berorientasi pada pengarusutamaan gender;
2. Belum optimalnya peran perempuan baik di bidang politik, ketenagakerjaan maupun teknologi;
3. Belum maksimalnya program pemberdayaan perempuan, bidang peningkatan SDM, ekonomi dan kelembagaan;
4. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak negatif pada psikologi anak. Produksi media cetak dan elektronik yang tidak sensitif anak, seperti iklan rokok, sinetron berkualitas rendah dan mengabaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa telah melahirkan fenomena sosial baru; berupa sikap konsumerisme dan tindakan yang tidak rasional; kekerasan dan eksploitasi anak; pornografi dan pornoaksi; geng-geng remaja, bullying; pola hidup yang tidak sehat dan maraknya kasus-kasus trafficking anak. Semakin meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun Tahun 2019 Kekerasan pada Anak Sebanyak 20 Orang, Tahun 2020 Kekerasan pada Perempuan dan Anak Sebanyak 24 Kasus, sedangkan pada Tahun 2021 Kekerasan pada Anak sebanyak 120 Orang dan Kasus Kekerasan pada Perempuan pada Tahun 2021 sebanyak 11 Orang, kasus Tahun 2022 kekerasan pada anak 128

orang dan kasus kekerasan perempuan 165 orang serta tahun 2023 kekerasan pada anak dan kasus kekerasan perempuan 139 orang;

5. Belum terbentuknya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar namun Kabupaten Kampar sudah menuju Kabupaten Kota Layak Anak dengan peringkat Madya pada tahun 2023.

➤ **Solusi Permasalahan yang lain**

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan dengan menghapus perbedaan, disparitas, atau keadaan yang merugikan perempuan misalnya keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat deskriminatif melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan, pendidikan dan pelatihan (membuat ku dan kursus menjahit, membordir dan magang tata rias pengantin) bagi perempuan putus sekolah dan perempuan sebagai Kepala Keluarga.
2. Melakukan sosialisasi pada anak dan orang tua baik disekolah-sekolah, wirid pengajian dsb tentang Undang-Undang Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar minimal 4 kali dalam sebulan.
3. Menjalin kerjasama dan komunikasi antara orang tua dengan sekolah, Mitra kerja dan Instansi terkait tentang pengawasan kegiatan anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat untuk mengarahkan kegiatan yang positif seperti olahraga, ketrampilan pengajian dsb minimal 1 bulan sekali.
4. Mengadakan pendekatan dan komunikasi baik secara eksternal maupun internal dengan instansi terkait tentang penganggaran minimal 4 kali dalam setahun;
5. Perlu diadakan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang layak bagi anak, yaitu kebijakan pembangunan yang didasarkan pada, hak-hak dan kewajiban anak, kepentingan dan kebutuhan anak, yang dilaksanakan dengan seksama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut antara lain hak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur dan

lingkungan hidup, Anak memerlukan tempat aman dan layak untuk bermain, anak-anak di kota memerlukan ruang terbuka hijau dan rute aman menuju sekolah, dan lain-lain;

6. Membentuk gugus tugas pada tahun 2016 agar terbentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan cara mengikut sertakan intansi terkait dalam membangun dan menciptakan sarana dan prasarana sesuai dengan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pendirian Rumah Aman untuk anak yang sedang menghadapi masalah baik anak sebagai pelaku dan korban serta perempuan yang mengalami gangguan perkembangan. Rumah Aman juga di fungsikan sebagai Lembaga Per masyarakatan untuk anak-anak dan pada Tahun 2023 Kampar sudah Menuju Kota Layak Anak dengan Peringkat Madya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	20 Dokumen	100 Persen
		2. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	100 Persen
		3. Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100 Persen
		4. Jumlah laporan keuangan akhir SKPD yang disusun	20 Dokumen	100 Persen
		5. Tersedianya komponen instalasi Listrik	1 Tahun	100 Persen
		6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	100 Persen
		7. Tersedianya makan, minum dan rapat staff	1 Tahun	100 Persen
		8. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100 Persen
		9. Jumlah media	4 Media	100 Persen
		10. Frekuensi rakor dan konsultasi yang diikuti	1 Tahun	100 Persen
		11. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air Listrik	1 Tahun	100 Persen
		12. Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan tenaga harian lepas	1 Tahun	100 Persen

		13. Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 Tahun	100 Persen
		14. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	100 Persen
		15. Terpeliharanya peralatan kerja	1 Tahun	100 Persen
2.	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga	1. Tersedianya rumah bibit dan fasilitas pendukung lainnya	44 KWT	1. Pengadaan pupuk organik dan non organic 2. Pengadaan benih sayuran dan perlengkapannya 3. Pengadaan bibit / kloni lebah dan perlengkapannya 4. Pengadaan Cultivator 5. Pengadaan ternak ayam ayam kampung unggul (dara), pakan, tempat minum, multivit dan tempat pakan
				6. Pengadaan ternak ayam ayam kampung unggul (DOC), pakan, tempat minum, multivit dan tempat pakan 7. Pengadaan rumah bibit/saung
3.	Angka Pola Pangan Harapan	1. Tersedianya informasi harga pangan pokok	21 Kecamatan	Insentif Satuan Tugas Pangan
		2. Tersedianya dokumen stok pangan	21 Kecamatan	Operasi pasar murah
		3. Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	18 Gapoktan	Pemantauan rencana kebutuhan pangan local
		4. Tersedianya cadangan pangan daerah	30.000 Kg	Tersedianya jasa transportasi beras medium CPPD dari bulog
		5. Terlaksanya lomba cipta menu dan dokumen analisis pola konsumsi	2 Iven dan dokumen pola kumsumsi	Tingkat Kabupaten dan Provinsi
		6. Penguatan kelompok wanita tani dalam intensifikasi pekarangan	13 Kelompok Wanita Tani	1. Pengadaan pestisida 2. Pengadaan pupuk organik dan non organic 3. Pengadaan benih sayuran dan perlengkapannya 4. Pembuatan hidroponik dan perlengkapannya 5. Pengadaan ayam buras/ayam arab (DOC), pakan, tempat minum, multivit dan

				tempat pakan
4.	Teridentifikasinya daerah kerentanan dan rawan pangan	1.Peta kerawanan pangan dan gizi	21 Kecamatan	1. Insentif Tim SKPG Kabupaten
5.	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Pangan	1.Terlaksananya uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan	21 Kecamatan	1. Ujilaboratorium pangan segar 3 Sampel

Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.246.542.029,-	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.528.000,-	
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.798.000,-	APBD
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.730.000,-	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.916.539.210,-	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.653.790,-	APBD
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.885.420,-	APBD
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.051.950,-	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.575.000,-	APBD
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.381.700,-	APBD
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.748.000,-	APBD
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.074.250,-	APBD
1.3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000,-	APBD
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.509.000,-	APBD
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.057.464,-	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000,-	APBD
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.257.464,-	APBD
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.365.405,-	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.983.895,-	APBD
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.931.510,-	APBD
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,-	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.467.490.824,-	
2.1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.467.490.824,-	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.467.490.824,-	APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.319.964.980,-	

3.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	462.441.000,-	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	246.644.000,-	APBD
3.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	215.797.000,-	APBD
3.2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	79.755.000,-	
3.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	28.524.000,-	APBD
3.2.2	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51.231.000,-	APBD
3.3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	777.768.980,-	
3.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	230.030.360,-	APBD
3.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	547.738.620,-	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	71.887.950,-	
4.1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	71887.950,-	
4.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	71.887.950,-	APBD
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	547.462.000,-	
5.1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	547.462.000,-	
5.1.1	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	547.462.000,-	APBD
J U M L A H		7.653.347.783,-	

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Kabupaten Kampar	Terselenggara dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	Tanah Milik pemerintah teridentifikasi dan terdata dengan baik	2 Dokumen

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.969.976.600
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 2.607.201.000
3	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp. 479.308.400
4	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 151.536.700
	Jumlah Anggaran	Rp. 6.208.022.700

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Rumus / Penjelasan	Satuan	Target
1	Terlaksananya urusan kesekretariatan kepegawaian, keuangan dan perencanaan	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penilaian inspektorat kabupaten kampar	Dokumen	66,00
2	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di kabupaten kampar	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terlaksana	Pengelolaan data dari kerawanan pencemaran dan kerusakan lingkungan air	Titik Sungai dan perusahaan	66,00
3	Tersedianya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten Kampar	Persentase kegiatsn perencanaan lingkungan hidup terlaksana	Data Perusahaan di kabupaten Kampar	Dokumen	66,00
4	Terlaksananya penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup terlaksana	Tingkat pengaduan Masyarakat dan jumlah masalah teratasi	Tahun	66,00
5	Terlaksananya penelolan sampah di kabupaten Kampar	Persentase program pengelolaan sampah terlaksanan	Penanganan sampah di kabupaten Kampar	Tahun	66,00
6	Terlaksananya penyusunan laporan RKA, DPA,dan SKPD	Terlaksanya dokumen perancangan	Penilaian inspektorat dan bapenda kabupaten Kampar	Dokumen	66,00

7	Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan pelaporan keuangan	Terlaksananya penyediaan gaji dan pelaporan keuangan	Jumlah tenaga pekerja pada dinas lingkungan hidup	Laporan	66,00
8	Meningkatnya SDM aparatur dinas	Meningkatnya SDM aparatur daerah	Kualitas aparatur dinas	Orang	66,00
9	Terkelolaya ruang terbuka hijau di kabupaten Kampar	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten Kampar	Pembangunan/ penataan taman dan raung terbuka hijau	Tahun	66,00
10	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di kabupaten Kampar	Penanganan dan pengelolaan sampah	Tahun	66,00
11	Terselenggara pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Terlaksananya penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Penyelesaian masalah lingkungan hidup	Tahun	66,00
12	Terlaksananya penghargaan lingkungan hidup untuk dunia Pendidikan dan Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat daerah kabupaten kampar	Pemberian penghargaan adiwisata terhadap sekolah dan Lembaga Masyarakat	Tahun	66,00
13	Terlaksananya pemantauann tentang kerusakan tanah untuk produksi biomasa terlaksananya pemantauan tentang kualitas air dan neraca sumber daya air terlaksananya pemantauan terhadap sumber emisi tidak bergerak bagi kegiatan industri	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penanggulangan pencegahan pencemaran terhadap tanah, air, udara, dan laut	Titik Sungai dan perusahaan	66,00
14	Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten Kampar	Tersedianya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten Kampar	Penyusunan dokumen RPPLH kabupaten Kampar	Dokumen	66,00
15	Terlaksananya pembinaann dan penertiban terhadap Perusahaan yang telah di terbitkan izin lingkungan hidup	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintahan kabupaten Kampar	Pengawasan usaha terhadap Perusahaan yang telah diberikan izin	Kegiatan /usaha	66,00

16	Tersedianya peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai	Meningkatnya SDM aparatur	Kualitas pegawai	Orang	66,00
17	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan kantor	Terlaksananya penyediaan administrasi kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	66,00
18	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji	Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	66,00
19	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan semester SKPD dan laporan realisasi anggaran perangkat Daerah	Terlaksananya pelaporan keuangan	Laporan keuangan	Laporan	66,00
20	Terlaksananya dokumen perencanaan	Terlaksananya musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen	Dokumen	66,00
21	Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA, DPA, Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen	Dokumen	66,00

Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Bidang	Anggaran
1	Sekretariat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.269.285.888,00
2	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 71.718.000,00
3	Bidang Tata Lingkungan	Rp. 612.258.000,00
4	Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Rp. 554.452.500,00
5	Bidang Pengelolaan Persampahan Dan Pertamanan	Rp. 4.141.708.104,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Kampar		Rp. 15.269.285.888,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 71.809.900,00
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 4.744.294.162,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 390.235.395,00
4	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.833.506.431,00
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 229.440.000,00
Total		Rp. 15.269.285.888,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.195.612.332,00
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.946.095.772,00

Total		Rp. 4.141.708.104,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 52.580.000,00
2	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 19.138.000,00
Total		Rp. 71.718.000,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 554.452.500,000
Total		Rp. 554.452.500,000
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 326.203.000,00
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Rp. 86.803.000,00
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MAH) Kearifan Lokal Dan Hak Mah Yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 199.252.000,00
Total		Rp. 612.258.000,00
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A. Administrasi umum perangkat daerah		Rp. 390.235.395,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 4.144.000,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 168.224.700,00
3	Penyedia peralatan rumah tangga	Rp. 9.964.000,00
4	Penyedia bahan logistik kantor	Rp. 16.269.000,00
5	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Rp. 26.229.695,00
6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp. 5.000.000,00
7	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 160.404.000,00
B. Penyedia dan penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp. 9.833.506.431,00
1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 264.763.395,00
2	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 3.150.000,00
3	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Rp. 9.565.593.036,00
C. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp. 229.440.000,00
1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Rp. 229.440.000,00
Total		Rp. 10.453.181.826,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
A. Administrasi keuangan perangkat daerah		Rp. 4.744.294.162,00
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 4.743.294.162,00
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 999.950,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
A. Administrasi keuangan perangkat daerah		Rp. 71.809.900,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 51.899.950,00
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp. 490.000,00
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp. 490.000,00

4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp. 1.840.000,00
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.840.000,00
6	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 490.000,00
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 14.759.950,00

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Lamanya penyusunan dokumen perencanaan	1. Pengumpulan data dari setiap bidang harus dipercepat
2. Ketidakhadiran yang tidak jelas dari THL yang gajinya di potong	2. Evaluasi kehadiran dari seluruh pekerja dinas lingkungan hidup
3. Masih terdapatnya aparatur yang tidak profesional	3. Pemberian tugas dan tanggung jawab terhadap aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

❖ **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapat perusahaan di kabupaten kampar yang belum memiliki izin PPLH	1. Menyurati perusahaan yang belum memiliki izin PPLH untuk segera membuat izin PPLH

❖ **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Limbah pabrik yang mencemari lingkungan hidup masyarakat dan berakibat terhadap rusaknya ekosistem	1. Penanganan limbah yang baik dan tertangani dengan baik serta tidak mencemari lingkungan hidup
2. Tidak terawasinya seluruh wilayah yang terjadinya kerusakan lingkungan	2. Pengawasan terhadap lahan yang sering terjadi kerawanan kerusakan lingkungan

❖ **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Pembangunan RTH yang tidak berpotensi baik	1. Penetapan RTH yang objektif dan berpotensi baik
2. Pengelolaan RTH yang tidak berjalan dengan baik	2. Pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan RTH
3. Terjadinya kerusakan lampu taman dan bunga pada RTH oleh masyarakat	3. Pengadaan lampu taman dan bunga

❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapatnya pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH oleh perusahaan	1. Pembinaan dan pengawasan yang objektif terhadap seluruh perusahaan yang telah memiliki izin PPLH

❖ PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapatnya masyarakat yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	1. Melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH

❖ PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Banyaknya dari masyarakat/ lembaga , masyarakat / usaha , pendidikan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	1. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat/ lembaga , masyarakat / usaha , pendidikan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

❖ PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kabupaten Kampar	1. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi terhadap pelanggar yang tidak menaati peraturan

❖ PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah di lingkungan masyarakat	1. Pembuatan tempat pembuangan sampah pada daerah yang sering tertumpuk sampah
2. Terbatasnya fasilitas untuk penanganan dan pengolahan sampah	2. Melengkapi fasilitas dan pemanfaatan limbah sampah menjadi bahan daur ulang
3. Terdapat banyaknya kerusakan pada alat pengelolaan persampahan	3. Perbaiki peralatan persampahan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan penerbitan KTP – el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk pelayanan di Kabupaten Kampar	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Kampar meliputi:	
		Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	100%
		Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Menerapkan Identitas Kependudukan Digital
		Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98%
		Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	16 (Enam Belas) Mitra
		Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan	Sudah menggunakan data DKB
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	6 (Enam) OPD
		Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD	-
		Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT
		Pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran
Dilarang menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk		
2.	Capaian Keluaran / Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran / Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat.
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 (tiga) jenis inovasi
		Pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan	3 (tiga) pelayanan terintegrasi
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	- Ketersediaan Blanko KTP-el - Aset BMN di daerah
5.	Penyediaan Data Kependudukan	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten	Tersusunnya profil data

	berskala Kabupaten Kampar yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Kampar yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	kependudukan berskala Kabupaten Kampar
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian urusan Administrasi Kependudukan di desa

➤ **Permasalahan dan Solusi
Pengelolaan Keuangan**

Dalam pengelolaan keuangan permasalahan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Permasalahan Teknis

Kesalahan teknis sering terjadi dan menjadi kendala dalam melaksanakan manajemen keuangan secara paripurna. Manajemen keuangan yang bersih harus terhindar dari kesalahan sekecil apapun yang dapat menjadi temuan dari pihak pemeriksa. Kesalahan dari tahun ke tahun dapat diperkecil namun tetap tidak dapat dihindarkan untuk tetap ada. Solusi yang diusulkan adalah bagaimana pengawasan dari atasan terhadap bawahan dapat dilaksanakan dengan lebih ketat sehingga permasalahan teknis dapat diminimalisir.

b. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Kesalahan teknis juga menyangkut kecakapan sumber daya manusia yang mengelola keuangan. Beberapa tenaga teknis keuangan telah tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar namun belum cukup untuk mengurangi kesalahan. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan namun perlu didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Solusi yang diharapkan adalah dengan merekrut tenaga profesional keuangan seperti Sarjana Akuntansi dan Sarjana Komputer.

c. Permasalahan Birokratis.

Kendala dalam masalah birokratis adalah keterlambatan realisasi dana serta terlalu panjangnya birokrasi di tingkat pemerintah daerah sehingga menyulitkan pengurusan keuangan. Upaya untuk mempercepat dan memangkas birokrasi tanpa mengurangi ketelitian manajemen keuangan sangat perlu untuk dilakukan.

Perangkat Alat Cetak

a. Alat cetak KTP-EI masih kurang kerana alat cetak yang ada pada saat ini hanya tersedia tiga (3) unit dan satu (1) unit dalam keadaan rusak diharapkan alat cetak KTP-EI untuk kabupaten kampar sebanyak 5 unit karna kemampuan alat tersebut untuk mencetak sangat terbatas dan sangat sensitive. Solusi telah membuat surat Kemendagri agar dapat memberikan alat cetak sesuai kebutuhan dan mengusulkan biaya perbaikan atau pembelian alat cetak KTP- el melalui dana APBD Kabupaten Kampar.

b. Pengadaan blanko KTP-EI masih dari pusat melalui Dirjen Adminduk Kemendagri sehingga tidak bisa diminta sesuai yang dibutuhkan apabila blanko KTP-EI yang diberikan pusat habis maka pelayanan terhadap masyarakat terpaksa terhenti/terkendala.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Akuntailitas yang disusun	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 Orang
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	9 Desa

		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	101 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3	Meningkatnya keberadaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi di Desa menuju Desa Mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen

	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

Program Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 259.538.760	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.275.396.720	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 57.052.000	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 681.536.450	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 63.764.000	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 636.646.820	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 215.915.883	APBD
2	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 558.105.500	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar desa	Rp. 145.695.550	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.801.229.800	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp. 370.710.200	APBD
JUMLAH ANGGARAN			Rp. 11.065.591.683	

➤ **Permasalahan :**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2023 tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berupaya semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan dengan Anggaran yang masih terbatas di beberapa leading sektor kegiatan.

Permasalahan dan upaya yang telah ditempuh :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan beban kerja yang diamanatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
4. Terjadinya Refocussing Anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya dana untuk pelaksanaan kegiatan.

❖ **Solusi**

Demi kelancaran pelaksanaan beban kerja yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dibutuhkan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah mohon untuk memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia dalam rangka kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
2. Untuk memenuhi ketersediaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan tugas rutin dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

Demi kenyamanan dalam bertugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, dapat kiranya Pemerintah Daerah melengkapi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terjaganya Generasi dan Bahaya dari Penggunaan NAPZA, pergaulan bebas dan Radikalisme	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		2. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		3. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		4. Gaji dan Tunjangan	12 Bulan
		5. Peningkatan SDM	12 Bulan
		6. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		7. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	3 Bulan
		8. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		9. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		10. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		11. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		12. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan
		13. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan
		14. Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan
		15. Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan
		16. Mobil Operasional	12 Bulan
		17. Mobil Operasional	12 Bulan
		18. Mobil Operasional	12 Bulan
		19. Mobil Operasional	12 Bulan
		B. Program Pengendalian Penduduk	
		1. Terlaksananya Program Bangga Kencana	12 Bulan
		C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		1. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		2. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		3. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		4. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		5. PLKB/PKB	21 Balai
		6. PLKB/PKB	21 Balai
		7. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
		8. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan

		9. Wawasan Terlaksananya Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	Kompeten Tenaga KB dan KR yang terampil	1 Kegiatan
		10. Wawasan Terlaksananya Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	Kompeten Tenaga KB dan KR yang terampil	1 Kegiatan
		11. Wawasan Terlaksananya Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	Kompeten Tenaga KB dan KR yang terampil	1 Kegiatan
		12. Wawasan Terlaksananya Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	Kompeten Tenaga KB dan KR yang terampil	1 Kegiatan
		13. Tercapainya Peran Kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi masyarakat		21 Kecamatan
		14. Tercapainya Peran Kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi masyarakat		21 Kecamatan
		D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
		1. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.		10 Keluarga
		2. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.		10 Keluarga
		3. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.		10 Keluarga
		4. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.		21 Kecamatan

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjukkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.730.847.702	APBD
2.	Program Pengendalian Penduduk	110.577.350	APBD
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.747.311.350	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.582.716.550	APBD
	JUMLAH	16.171.452.952	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

- a. Pencapaian peserta KB baru (PB) untuk akseptor yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang belum mencapai target yang mana sasaran PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) tahun 2023 (lampiran 7) sebesar 2.891 dan pencapaian 3.697 atau 78.00% sedangkan untuk PPM Tahun 2023 untuk seluruh alkon untuk Kab.Kampar PPMnya 27.821 akseptor dan pencapaian sebesar 14.261 akseptor atau 51.26 (lampiran 8).
- b. Kurangnya pembinaan kesertaan Ber-KB Jalur wilayah di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan (Calcitas) sehingga tingkat kesertaan KB masih rendah yang menyebabkan masih tingginya Unmet Need. Di Provinsi Riau pada tahun 2023 Unmet Need sebesar 25.86% dengan target tahun 2023 14,45% sedangkan di Kabupaten Kampar 17.00 %.
- c. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata seperti masih tingginya *CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR)* *CPR*, (*AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR)*) dan kesertaan KB Pria masih rendah sebanyak 0 % serta kurang optimalnya pemanfaatan tenaga medis setelah melakukan pelatihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Intra Uterine Devise (IUD) dan Implant.
- d. Masih tingginya ASFR(Age Spscifik Fertilitas Rate) usia (15-19 tahun) untuk Kabupaten Kampar sebesar 96.92%.
- e. Belum terlayannya calon Akseptor MKJP karena Menurut Perpres NO 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditanggung BPJS, tetapi BPJS belum siap maka pembiayaan

pelayanan KB terutama Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) masih dalam proses pembiayaan dan administrasi pertanggung jawaban, pada BKKBN Provinsi Riau.

- f. Kurangnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- g. Belum tersosialisasinya program (Generasi Berencana) yakni program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan positif remaja.
- h. Kurangnya pembinaan terhadap usaha kelompok yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang harus memberika keuntungan yang akan meningkatkan pendapatan keluarga anggota kelompok.
- i. Masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 375.716 KK atau 8,38 % berdasarkan Kabupaten Kampar dalam angka tahun 2023.
- j. Masih rendahnya rasio PLKB dengan desa binaan lebih kurang 2.9 yang idealnya 1 petugas 2 memegang $\frac{1}{2}$ desa.
- k. Persentase penggunaan Inform Consent atas pelayanan KB Baru MKJP sampai bulan Desember 2022 mencapai 2498 (4,3%) masih jauh dari angka ideal 100%. Dari hasil telaah laporan F/II/KB terlihat masih banyak klinik yang belum menggunakan/melaporkan penggunaan inform concent dalam pelayanan KB baru MKJP dan juga banyak yang belum mengetahui bahwa pelayanan KB suntik harus menggunakan inform concent, padahal salah satu pelayanan KB MKJP dan suntik yang sesuai SOP adalah dengan pemberian inform concent.
- l. Mekanisme operasional lini lapangan tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan dana.
- m. Kurangnya sarana dan prasarana untuk lini lapangan seperti PLKB kit, IUD kit, KIE kit dsb.
- n. Alat kontrasepsi yang masih kurang belum sesuai dengan permintaan dan realisasi yang diminta.

➤ **Solusi :**

- a. Menggerakkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pusku, bidan praktek dsb untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang manfaat dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang setiap melakukan pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun di praktek swasta.
- b. Meningkatkan pergerakan lini lapangan dengan memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terutama petugas PLKB/PKB minimal 4 kali dalam sebulan, menyiapkan bahan-bahan KIE yang bersifat edukasi interpersonal dan konseling untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari.
- c. Lebih mengoptimalkan penggunaan Mobil Pelayanan (Muyan) terutama untuk daerah calcitas, daerah terpencil dan daerah tertinggal dalam pelayanan KB dari satu (1) kali dalam sebulan menjadi 3 tiga kali dalam sebulan.
- d. Memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan seluruh masyarakat untuk lebih cerdas memilih alat kontrasepsi dengan melakukan intensitas KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana sebanyak 2 kali dalam sebulan.
- e. Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta dalam meningkatkan capaian MKJP untuk ibu Pasca Persalinan dan Keguguran dengan membuat kerjasama atau MOU.
- f. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang Balita, anak, remaja serta peningkatan kualitas hidup Lansia, melalui kegiatan BKB, BKR dan BKL dengan cara mengikutsertakan para kader mengikuti pelatihan, orientasi serta mengadakan lomba kader.
- g. Membentuk dan Membina PIK-R/Mahasiswa baik jalur masyarakat ataupun jalur sekolah menjadi 50 PIK-R, sebagai wadah memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekan hidup sehat serta berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, etrhindar dari Remaja, dan terhindar dari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, NAPZA,HIV dan AIDS), menuda usia perkawinan, mempunyai perencanaan

berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model dan Idola bagi teman sebaya.

- h. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perindustrian dan Pasar, Dinas Kesehatan untuk izin industri Rumah Tangga , mengemaskan dan memasarkan hasil industri rumah tangga sehingga dapat bernilai jual tinggi yang nantinya akan meningkatkan tahap hidup masyarakat dari Keluarga Pra KS menjadi KS 1 ataupun KS 1 menjadi KS II.
- i. Menambah jumlah PLKB/ PKB dengan cara mengadakan tenaga THL ataupun TKS agar program KB dapat sukses di masyarakat sejumlah ± 40 Orang.
- j. Agar angka penggunaan inform concent meningkat, diharapkan untuk melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan tentang penggunaan inform concent untuk pelayanan KB dengan metode suntik kepada klinik KB yang ada di Kabupaten Kampar dan melaporkannya pada laporan F/II/KB.
- k. Memberikan reward kepada mitra kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader baik kader di tingkat desa maupun tingkat RW atau RT dengan cara mengadakan berbagai kegiatan perlomba .
- l. Meningkatkan kerjasama dengan cara sosialisasi program KB ke Stake Holder, Lembaga Legislatif dan Bappeda serta BKKBN Perwakilan Riau agar penambahan anggaran bisa tercapai.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	7150
		2. Jumlah Terminal/Bandara/Stasiun yang dikelola	2
		3. Persentase Layanan Angkutan Darat	75%
		4. Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan	500
		5. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,5
		6. Jumlah Arus Penumpang Umum	278775
		7. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal/Bandara/Stasiun	273000
II	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perairan	1. Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang dibangun	1
		2. Jumlah Orang/Barang Melalui Pelabuhan/Dermaga	990
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB

Program Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 10.371.148.581	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 23.795.441.655	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 486.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 34.652.590.236	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis permasalahan yang melingkupi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Bidang Transportasi	Kurangnya Manajemen transportasi	Belum Optimalnya Pengembangan Operasional Angkutan
		Kurangnya Manajemen Aparatur	Kompetensi Teknis Pegawai
2	Bidang Sistem Informasi Teknologi Transportasi	Sistem Informasi Teknologi Transportasi masih terbatas	Sistem Jaringan SI IT yang belum memadai

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, dan Informatika

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.07
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97.34
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	97.43
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.98
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.39
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91.54
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	96.50
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.34
3	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama Domain yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.49
		2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.84
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.03
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	91.75

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.289.654.757
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.764.191.250
3	Program Aplikasi Informatika	3.670.242.510
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	126.397.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	237.724.700
	JUMLAH	21.088.120.217

➤ PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan program sebagai berikut :
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100%, realisasinya sebesar 96.67 %.
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator Persentase Informasi Publik yang disediakan dengan target 100%, realisasi sebesar 99.34 %.
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan indikator Persentase Jumlah OPD yang Terintegrasi dengan target 100%, realisasi sebesar 99.17 %.
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi dengan target 100%, realisasi sebesar 99.03 %.
6. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator index Keamanan Informasi dengan target 100%, realisasi sebesar 91.75 %.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasidan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Koperasi Aktif	Jumlah Peningkatan Koperasi Aktif	320 Koperasi
2	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil Terlatih	318 K

Program Dinas Perdagangan, Koperasidan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	237.333.850	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasian	36.751.050	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.639.515.627	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	396.967.650	APBD
	JUMLAH	2.310.568.177	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

1. Masih adanya koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT)
2. Masih banyak nya Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
3. Kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang Pelaporan Keuangan Koperasi
4. Kurang berminatnya Koperasi dalam Kerja Sama Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal dari Pemerintah
5. Adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu pengguna jalan seperti
: pasar tambang, pasar kuok, pasar teratak buluh (siak hulu), pasar air tiris dan pasar bangkinang (pasar inpres).

❖ **Solusi :**

1. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan terkait pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi jalannya roda

- organisasi Koperasi
2. Menyurati dan memberikan Sanksi bagi Koperasi yang belum melaksanakan RAT
 3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 4. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
 5. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (BIMTEK) tentang Perkoperasian dan Pelaporan Keuangan Koperasi
 6. Melakukan Monitoring Pelaporan Keuangan Koperasi
 7. Melakukan Sosialisasi tentang Program Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal Pemerintah kepada Koperasi
 8. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMK Kabupaten Kampar bekerja sama dengan OPD terkait Satpol PP dan Dishub untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya secara berkala.
 9. Melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar sehingga dapat meningkatkan PAD

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	90%
		Persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu	100%
2	Meningkatkan kemudahan investasi	Persentase peningkatan fasilitasi investasi	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	BB

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.700.000,-

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.813.000,-
	II	Administrasi keuangan perangkat daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.835.583.175,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.516.000,-
	III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.400.000,-
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.630.000,-
	IV	Administrasi umum perangkat daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.596.000,-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.970.000,-
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.149.000,-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.162.150,-
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,-
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.977.000,-
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.295.000,-
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.883.000,-
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.610.000,-
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	242.248.740,-
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.753.782.184,-
	VI I	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.236.950,-
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.130.900,-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	434.840.000,-
	B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	I	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	
	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	167.642.000,-
	C	Program Promosi Penanaman Modal	
	I	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota	
	1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	40.245.000,-
	D	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	I	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	
	1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	270.800.000,-

	2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	137.847.200,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	319.121.500,-
E	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	I	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.366.000,-
	2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.050.050,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	73.949.950,-
F	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	I	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten/kota	
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	219.711.000,-
		JUMLAH	12.717.855.799,-

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

Pada tahun 2023 DPMPTSP Kab. Kampar mendapatkan target untuk investasi PMA dan PMDN senilai 3. 240.000.000.000,- dalam pencapaiannya target PMA dan PMDN tersebut DPMPTSP Kab. Kampar melebihi target pencapaian sebesar Rp. 10.853.507.220.000,- dengan persentase 334,98 %, namun ada beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan antara lain:

1. Pelaku usaha masih banyak yang belum melakukan migrasi data dari OSS 1,1 ke online single submission risk based approve (OSS RBA).
2. Banyak pelaku usaha yang belum memahami tatacara pengisian LKPM di OSS RBA

❖ **Solusi :**

1. DPMPTSP Kab. Kampar melalui bidang Penanaman Modal melakukan pengawasan terkait LKPM ke pelaku usaha.
2. DPMPTSP kab. Kampar juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pelaku usaha mikro sampai usaha besar. Kemudian DPMPTSP juga memfasilitasi berupa tempat,

akomodasi dan lainnya kepada pelaku usaha dalam bentuk bimtek.

3. DPMPTSP Kab. Kampar melalui bidang penanaman modal mendirikan sebuah klinik LKPM yang bertujuan untuk menampung kendala dan memberikan Solusi terkait LKPM kepada pelaku usaha.

**13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Berkaitan Dengan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1 Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	68,00%
		2 Jumlah Pelatih Bersertifikat	125 Orang
		3 Jumlah Wasit Bersertifikat	80 Orang
II	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan	1 Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	55,00%
		2 Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	25,00%
III	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bidang Keagamaan	1 Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Keagamaan	45,00%

**Program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Berkaitan Dengan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	131.810.500,00	DANA APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.510.725.240,00	DANA APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	617.944.950,00	DANA APBD
JUMLAH		6.260.480.690,00	

➤ **Permasalahan :**

Anggaran untuk Program Kepemudaan dan Olahraga masih dikategorikan rendah baik dari segi pengembangan Atlit dan pemuda beserta Sarana Prasarana Penunjangnya, sebab jika dilihat dari anggaran yang tersedia memang cukup besar namun anggaran

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada anggaran yang tercantum hanya 50% selebihnya ke Pihak Hibah Organisasi seperti KONI, NPC, PRAMUKA DLL.

➤ **Solusi :**

1. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap judgement yang terkait dengan penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Berupaya untuk lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pelayan masyarakat, melalui berbagai pelatihan atau short course terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Melakukan Pendekatan bersama dengan Mitra OPD yaitu komisi I DPRD Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kampar, dalam hal penyampaian Usulan Anggaran Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga Baik Dari Segi Sumber daya Manusia atau Sarana Prasarannya.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan akses data statistik sektoral	- Tersedianya sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada

Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.047.000,-	
	JUMLAH	117.047.000,-	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik.
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di bidang statistik.
4. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.

❖ **Solusi :**

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas
Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang statistik.
3. Meningkatkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang optimal.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	- Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	75%

Program Urusan pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	287.790.700	APBD
	JUMLA	287.790.700	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang
4. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi (Sertifikat Elektronik, kontra penginderaan dll)

❖ **Solusi :**

1. SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Teknologi Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal.
2. Sosialisasi system Informasi dan Teknologi Informasi seperti: (CSIRT, siber security, dll)
3. Penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi - Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah langkah strategis yaitu mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat. Seperti Sistem Informasi yang berbasis tanda tangan digital.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

**Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2023**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melestarikan dan Memfalitasi Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan dan difasilitasi	2 Lembaga
2	Terinventarisasinya benda situs cagar budaya	Jumlah benda situs cagar budaya yang dilestarikan	12 Unit

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Pengembangan Kebudayaan	4.358.980.800	APBD
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	961.805.750	APBD
	JUMLAH	5.320.786.550	

❖ **Permasalahan :**

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan baik Kuantitas maupun Kualitas.
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Objek wisata dan budaya
3. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan.

4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

❖ **Solusi :**

1. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti Diklat Kepariwisata dan Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan Penataan Objek serta dayaTarik wisata secara efektif dan memadai.
3. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata, kebudayaan.
4. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan dengan pihak-pihak terkait.
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan kebudayaan.
6. Melakukan Pendataan usaha kepariwisataan dan kebudayaan yang ada di kecamatan- kecamatan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perjanjian Kerja (PENJA) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah Pustaka Binaan (Pustaka Umum)	32 Pustaka
		Jumlah Koleksi Pustaka Daerah dan Kecamatan	6.343
		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Daerah dan Kecamatan	18.000 Pemustaka
		Jumlah Promosi Budaya Baca	5 Kegiatan
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik	Pendataan dan Penataan Arsip SKPD dan Kecamatan	5 OPD dan 5 Kecamatan
		Jumlah SDM Kearsipan	3 Orang
		Jumlah SKPD yang Tertata Arsip Dinamis dan Arsip Statis	5 OPD dan 5 Kecamatan

Program Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.541.464.244

2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.565.630.950
3	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	115.767.850
	JUMLAH	10.222.863.044

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Perjanjian Kerja (PENJA) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	Lancarnya pengelolaan arsip	1800 Berkas
2	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	Lancarnya pengelolaan arsip Statis daerah	200 Arsip
3	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) tahun	Tercapainya jumlah Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50 Berkas
4	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tercapainya jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	70 Arsip
5	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Jumlah Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Arsip
6	Terlaksananya Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Tercapainya jumlah pencarian Arsip Statis yang dinyatakan	300 Arsip

Program Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	119.795.090	APBD
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	33.469.000	APBD
3	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	41.341.300	APBD
4	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	115.371.100	APBD
5	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	70.593.400	APBD
6	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	70.405.100	APBD
	JUMLAH	450.974.990	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Untuk mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun 2023, dalam hal kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah daerah serta dari stakeholder lainnya dalam pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan sangat diharapkan.
3. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

C Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Perjanjian Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Produksi Budidaya dan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan	72.000

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.900.149.473
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.823.076.000
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.075.000.200
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	864.740.000
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.021.204.284
	JUMLAH	19.684.169.957

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Masih terbatasnya usaha diversifikasi produk dan pemasaran
2. Tingginya harga pakan ikan pabrik.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan.
4. Kurangnya ketersediaan benih yang berkualitas dalam jumlah yang cukup.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
6. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan perikanan.
7. Terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha perikanan.
8. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga sulit mengadopsi teknologi sesuai perkembangan sehingga belum optimalnya penerapan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat.
9. Kesenjangan antara jumlah nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh serta sarana dan sarana penunjang penyuluhan.
10. Kemampuan modal yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan sangat kecil sehingga sangat sulit untuk memasarkan dan mengembangkan usaha.
11. Kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan akibat belum adanya informasi paket investasi menguntungkan.
12. Masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal akses permodalan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam rangka pengembangan usaha.
13. Masih adanya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan terlarang seperti racun dan bom.
14. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar.
15. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan maupun sarana pendukung pembinaan maupun sarana pendukung lainnya seperti TPI/PPI, pabrik es dan prasarana saluran tambak.
16. Masih rendahnya penanganan pasca panen.
17. Terbatasnya infrastruktur dasar, seperti kelistrikan, modal transportasi dan prasarana jalan.
18. Organisasi pembudidaya dan nelayan belum berfungsi secara optimal.

19. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
20. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan.
21. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas.
22. Masih tingginya ancaman penyakit ikan.

❖ **Solusi :**

1. Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan sentra-sentra pengolahan berbasis industri dan pasar.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi melalui pengembangan kawasan sentra-sentra budidaya perikanan.
3. Meningkatkan produksi benih ikan yang berkualitas melalui pengembangan Balai Benih Ikan dan penumbuhan kelompok-kelompok pembenihan rakyat (UPR/KPR).
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Perikanan melalui Pengembangan Kawasan, seperti Pengembangan Kawasan Minapolitan, Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, dan Pengembangan Kawasan Budidaya KJA Waduk PLTA Koto Panjang.
5. Bantuan teknologi dan pemodalaan bagi kelompok pembudidaya, pembenihan dan Pengolahan. Pemberian subsidi pakan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023

SASARAN			
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata	2%
2	Meningkatnya Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan (Domestik / asing)	10%
3	Meningkatnya Kelestarian Seni dan Budaya Daerah	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang	100%
4	Terpeliharanya Warisan Budaya (Tangible dan	Persentase benda, situs dan kawasan Cagar	100%

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri ➤ Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Baik dalam dan Luar Negeri 	<p>912.381.900</p> <p>66.000.000</p>
2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota ➤ Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 	<p>1.438.861.500</p> <p>160.923.000</p>
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar ➤ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata ➤ Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 	<p>155.647.000</p> <p>1.130.578.350</p> <p>393.352.300</p>
	JUMLAH		4.257.744.050

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Masalah :

Secara umum Pembangunan di Bidang Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kampar masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain :

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan kebudayaan baik kuantitas maupun kualitas.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang objek wisata dan Budaya.
3. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata, dan Kebudayaan baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

Solusi :

1. Mengirimkan Aparatur untuk mengikuti Diklat Kepariwisata, Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Nasional.
2. Mengoptimalkan Pembinaan dan Penataan objek serta daya tarik wisata secara efektif dan efisien.

3. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata dan Kebudayaan.
4. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang Pariwisata dan kebudayaan dengan pihak-pihak terkait.
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
6. Melakukan pendataan usaha kepariwisataan dan Kebudayaan yang ada di kecamatan-kecamatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2023 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :	
		Padi	31.261
		Jagung	8.508
		Cabe	1.472
		Jeruk	15.500
		Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna	62.97
		Persentase peningkatan KK Petani yang bergerak di Bidang Pertanian	42.642

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	18.966.882.189
2	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	1.342.969.730
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.278.626.450
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	878.860.000
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	178.261.000
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.631.911.700
	JUMLAH	27.277.511.069

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Masalah :

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar mengalami kendala/hambatan yaitu :

1. Sosial budaya masyarakat yang masih lemah.
2. Rendahnya tingkat penerapan teknologi ditingkat petani
3. Masih terbatasnya penggunaan benih bermutu.
4. Adanya alih fungsi lahan.

Solusi :

Setelah melihat proses pelaksanaan kegiatan dan memperhatikan permasalahan serta hambatan yang ada dapat kami sarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Pembangunan Pertanian perlu menyatukan persepsi, bahwa sub sektor pertanian pada umumnya merupakan sub sektor yang penting dan strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kampar untuk menuju visi “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Swasembada Pangan dan Hortikultura berbasis Industri Pertanian tahun 2023 “ karena lebih dari 68,12 % masyarakat Kampar mata pencariannya adalah sektor pertanian secara umum dan didukung oleh potensi SDA dan SDM yang ada.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua Stakeholder dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Sub Sektor Pertanian.
3. Untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2023 dukungan baik dalam hal kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah serta dari stakeholder lainnya dalam pembangunan pertanian sangat diharapkan.

**Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Meningkatkannya Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	100 %	Pembangunan Prasarana Pertanian		
					Penyusunan Masterplan pengembangan prasarana sarana kawasan dan, komoditas perkebunan	Jumlah buku data statistic perkebunan dan peternakan	2 Dokumen
					Pembangunan Prasarana pertanian		
					Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	20 unit
					Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota		
					Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan	125 Ha
					Pencegahan, Penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	375 Ha
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya		
					Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	1 Laporan
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	48 orang					

					Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	4 Unit
			Persentase Penyakit ternak yang tertangani (%)	100 %	Pengawasan Obat hewan di tingkat Pengecer		
					Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan obat hewan	1 Laporan
					Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota		
					Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	1 Laporan
					Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintar daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah kabupaten/ kota	1 Laporan
					Penerapan dan pengawasan persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner		
					Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	1 Laporan
					Penerapan dan pengawasan persyaratan Teknis		
			Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	1 Laporan		
			Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna	100 %	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen
					Pemanfaatan SDG	Jumlah Pemanfaatan	1 Dokumen

					hewan/tanaman	SDG hewan/ tanaman	
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	100 %	Peningkatan mutu dan peredaran Benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	1 Laporan
					Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota		
					Penjaminan peredaran benih/ bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	8.000 Ekor

**Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Perkebunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.850.311.585
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.547.452.925
3	Penyediaan dan Pengembangan Parasarana Pertanian	4.323.817.715
4	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.124.435.970
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	397.445.975
6	Perizinan Usaha Pertanian	1.259.907.407
7	Penyuluhan Pertanian	2.552.574.628
	JUMLAH	24.055.946.205

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Masalah :

1. Permasalahan sosialisasi pencegah kebakaran hanya dilakukan pada bulan – bulan musim kemarau, sehingga pencegahan kebakaran baru dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan masyarakat yang kurang akan kesadaran atas fatalnya membuka lahan dengan

cara membakar, sehingga masih banyak masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

2. Kurangnya SDM aparatur di Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan baik kuantitas maupun kualitas.

Solusi :

1. Peningkatan Kualitas SDM secara berkesinambungan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan akurasi data, penjadwalan SDM pada kegiatan yang optimal, peningkatan respon oleh para PPTK/PPK pengambil kebijakan khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terbinanya Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Kelurahan	4 Pasar
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya	21 Kec

Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023

No	Uraian Program	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	59.720.000
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26.267.000
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.190.300
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	585.645.439
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	54.922.400
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	143.196.300

	dan Barang Penting	Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	575.649.600
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	50.783.000
4	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	358.021.700
5	Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	76.234.000
	JUMLAH		2.043.629.739

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Masalah :

Pemasalahan yang menjadi kendala dalam capaian optimalisasi kinerja yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM terutama ASN baik kuantitas maupun kualitas yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sampai saat ini masih menjadi masalah klise, ditambah dengan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan tuntutan jabatan, sehingga tidak mengherankan jika capaian sasaran kinerja kurang optimal akibat kurangnya penguasaan teknis dan kemampuan untuk berinovasi dalam peningkatan program-program kerja yang telah ditetapkan.
2. Belum terbentuknya data tunggal mengenai perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sehingga ini menjadi kendala dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Di sisi lain teknik pengumpulan data masih dilakukan secara manual, belum menggunakan aplikasi.
3. Fasilitas kerja yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar saat ini belum lengkap dan memadai meskipun secara jumlah sudah mulai mencukupi, sehingga turut berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program kerja atau kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Solusi :

Menyikapi beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK di atas, maka solusi yang dapat ditawarkan antara lain :

1. Mengupayakan bimbingan teknis dan diklat-diklat bagi ASN terutama yang berkaitan dengan teknis bidang perdagangan, koperasi dan UMK dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tugas secara optimal dan mampu berinovasi guna mendukung pengembangan program dan kegiatan yang ada.
2. Perlunya koordinasi aktif dan terbuka antar setiap unit kerja yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK dalam hal informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga adanya walidata yang dapat diakses secara mudah guna kepentingan pencapaian sasaran dan kinerja yang lebih baik.
3. Mengupayakan ketersediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai secara bertahap agar program-program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan kinerja yang optimal

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Perjanjian Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pembangunan Industri	% Pertumbuhan Industri	5,87 %

Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.154.440.534
2	Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	129.162.322
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	112.751.896
	JUMLAH	3.396.354.752

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Sarana dan prasarana peruntukan industri belum terbangun seluruhnya.
2. Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia disektor industri masih terbatas
3. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam
4. Tingginya angka pengangguran
5. Rendahnya keterampilan tenaga kerja
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan
7. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

❖ **Solusi :**

1. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana industri.
2. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pencari kerja sehingga pencari kerja mendapatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang baik.

D Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan
Program Sekretariat Daerah Tahun 2023**

BAGIAN HUKUM			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang pemerintahan, hukum, kerjasama serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat dalam meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat	1. Jumlah Peraturan Produk Hukum	3 Dokumen
		2. Jumlah Kasus Hukum yang di selesaikan	7 Kasus
		3. Jumlah sosialisasi produk hukum daerah dan perundang-undangan yang di ikuti oleh masyarakat	2 Dokumen

Program Bagian Hukum Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 707.312.050
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 272.539.900
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 253.092.250
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 181.679.900

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang pemerintahan, hukum, kerjasama serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat dalam meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat	1. Jumlah Pembinaan Aparatur Kecamatan	1 Dokumen
B.	Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi kewilayahan di perbatasan wilayah	2. Jumlah penataan administrasi otonomi daerah	1 Dokumen
		3. Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Pemekaran Wilayah Kecamatan/Kelurahan Penegasan Batas Daerah Penegasan Batas Desa Terlaksananya tertib administrasi kewilayahan Kabupaten Kampar	1 Dokumen

Program Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.798.860.050
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 362.805.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 852.882.700
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.298.376.350
B	Program Pengelolaan Perbatasan	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Rp. 284.796.000

BAGIAN KERJASAMA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang pemerintahan, hukum, kerjasama serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat dalam meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat	1. Jumlah kerjasama yang disepakati	25 Dokumen
		2. Jumlah kerjasama yang disepakati	2 Dokumen
		3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan CSR/TSP	1 Laporan

Program Bagian Kerjasama Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 801.447.800
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 725.431.500
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 22.911.300
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 53.105.000

BAGIAN KESRA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang pemerintahan, hukum, kerjasama serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat dalam meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat	1. Jumlah fasilitasi pelayanan pada Verifikasi dan Evaluasi bantuan Hibah dan Sosial, Terlaksananya pembinaan Sekolah/Madrasah Sehat dan Monitoring Dan Evaluasi	3 Aktifitas
		2. Jumlah Fasilitasi Pelayanan tentang Kesadaran masyarakat Mewujudkan Rumah Sehat, Kesadaran membangun kerjasama antara keluarga, warga, kelompok masyarakat, memberikan pembekalan calon jemaah haji Kab. Kampar serta pemberangkatan dan pemulangan jemaah	4 Aktifitas

		calon haji dan jamaah haji	
		3. Jumlah fasilitasi pelayanan terhadap imam dan gharim masjid raya Kecamatan, Markaz Islami Kab. Kampar dan terselenggaranya kegiatan keagamaan serta Peringatan Hari Besar Islam, peningkatan profesionalisme Dewan Hakim MTQ, persiapan mengikuti MTQ tingkat Kab. Kampar, Training Centre Qori/ah MTQ, persiapan keikutsertaan MTQ tingkat Kab. Kampar untuk tingkat Provinsi Riau	8 Aktifitas
		4. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45 Keluarga

Program Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 15.285.498.500
		1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 3.375.430.900
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.345.738.650
		3. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp. 10.354.324.150
		4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp. 210.004.800

BAGIAN PEREKONOMIAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif bidang ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam	1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Bantuan Permodalan bagi UUMKM	5 Laporan
		2. Jumlah Laporan Pembinaan BUMD dan BLUD	5 Laporan
		3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi	5 Laporan

Program Bagian Perekonomian Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 813.404.200
		1. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 300.018.500
		2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 357.467.000
		3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 155.918.700

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif bidang ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam	1. Jumlah laporan penyerapan anggaran pembangunan	12 laporan
		2. Jumlah laporan penyerapan anggaran pembangunan	13 Laporan

		3. Jumlah laporan penyerapan anggaran pembangunan	12 Laporan
--	--	---	------------

Program Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 611.533.400
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 316.433.600
		2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 165.980.200
		3. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 129.119.600

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif bidang ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam	1. Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara on-line (e-procurement)	100 %
		2. Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Secara Elektronik	100 %
		3. Persentase penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang Jasa dan SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional	100 %

Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.868.983.500
		1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 622.010.800
		2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	Rp. 921.036.000

		Elektronik	
		3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 325.936.700

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif bidang ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen

Program Bagian Sumber Daya Alam Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 695.052.250
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 131.074.000
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp. 466.266.000
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 97.712.250

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4

A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	<p>4 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 	<p>177 Orang/Bulan</p> <p>12 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>12 Laporan</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 12. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 13. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD 14. Penatausahaan Barang 	<p>1 Dokumen</p> <p>1 Laporan</p>

		Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		15. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan
		16. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan

Program Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp. 1.321.178.300
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 764.021.250
		2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Rp. 90.624.850
		3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Rp. 99.199.700
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 80.430.000
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Rp. 73.372.500
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 213.530.000
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 20.499.684.870
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penunian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 20.178.949.820
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Rp. 89.327.700
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 100.841.900
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp. 76.055.750
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 54.509.700
		1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Rp. 2.712.179.000
		2. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	Rp. 114.347.800
		3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 94.597.700
		Administrasi Keuangan dan Operasional	Rp. 2.503.233.500
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 774.451.868
			Rp. 174.451.868

		2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 600.000.000
--	--	---	-----------------

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan
		3. Jumlah Pendokumentasian Laporan Tugas Pimpinan	1 Laporan

Program Bagian Organisasi Protokol Tahun 2023

BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan
		3. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
		4. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen
		5. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen

Program Bagian Organisasi Tata Laksana Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Penataan Organisasi	Rp. 1.313.188.550
		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 557.147.900
		2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 211.930.050
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 126.980.850
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 300.934.100
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 116.195.350
BAGIAN UMUM			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4

A.	Terselenggaranya tertib administrasi bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	1. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
		2. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	191 Dokumen
		3. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang
		4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16380 Dokumen
		6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
		8. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		9. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	191 Dokumen
		10. Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang
		11. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
		12. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
		13. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		14. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket
		15. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket
		16. Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	3 Paket
		17. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
		18. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan

		19. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		
		20. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit		
		21. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1847 Unit		
		22. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	680 Unit		
		23. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit		
		24. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98 Unit		
		25. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		
		26. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		
		27. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		
		28. Jumlah Mebel yang Dipelihara	1847 Unit		
				29. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	680 Unit
				30. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
				31. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit
				32. Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket

Program Bagian Umum Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 645.966.000
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp. 56.259.000
		2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 22.680.800
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 563.559.800
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 3.466.400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 571.793.600
		1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 489.470.800
		2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 82.322.800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 11.836.548.836
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 325.795.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.334.009.100
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 8.176.744.736
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 32.068.000
		1. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 32.068.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 13.791.567.900
1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 520.165.000		
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 8.899.681.000		
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 4.371.721.900		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.095.244.900		
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 1.512.460.000		
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 78.000		
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp. 582.706.900		
Administrasi kepegawaian perangkat daerah			
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 1.210.682.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.119.315.600		
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 564.831.000		
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.275.804.600		
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 308.680.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.878.459.000		
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Rp. 551.918.000		

		Kendaraan Dinas Jabatan	
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 811.000.000
		3. Pengadaan Mebel	Rp. 213.907.000
		4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 48.615.000
		5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.088.967.000
		6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.164.052.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.186.040.000
		1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.186.040.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 14.939.702.710
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1.894.473.860
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp. 2.149.567.150
		3. Pemeliharaan Mebel	Rp. 264.660.000
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.520.980.000
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 4.857.787.100
		6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4.222.229.800
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 661.946.000

➤ **Permasalahan :**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
3. Kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBDP dengan waktu pelaksanaan singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan.

2. Sekretariat DPRD

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Kampar	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga	91%
2	Meningkatnya layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	92 %
3	Meningkatnya layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	92 %

Program Sekretariat Dewan Tahun 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	106,478,987,046,00	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33,077,507,200,00	APBD
JUMLAH		139,556,494,246,00	

Program Sekretariat DPRD

Dari kegiatan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan secara rutin masih menemui permasalahan sehingga kegiatan Sekretariat DPRD maupun kegiatan yang berakitan dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kampar dapat terlaksana dengan baik.

- Permasalahan dan kendala yang perlu dicarikan solusinya antara lain :
1. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur Pegawai dalam pelayanan administrasi untuk memenuhi pelayanan prima kepada Anggota Dewan;
 2. Masih kurangnya tenaga yang profesional di bidang Peraturan Perundang-undangan;
 3. Masih kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan secara komputerasi dalam mewujudkan terlaksananya pelayanan yang prima bidang keuangan;
 4. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang di miliki.

➤ Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang di hadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dengan melakukan pelatihan melalui Diklat-diklat bidang Perundang-undangan dan keuangan serta komputerisasi;
2. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya;
3. Menambah fasilitas sarana dan prasarana kantor;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
5. Meningkatkan koordinasi Internal yang baik dengan Dewan untuk mendukung kinerja DPRD Kabupaten Kampar

3. Perencanaan

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.	100%
		Persentase Capaian Pelaksanaan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	100%
2.	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Persentase Hasil Litbang Yang Menjadi Kebijakan.	100%
		Indek Inovasi Daerah	60%

Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	14.591.972.414
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	3.055.376.550
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	2.372.317.400
4. Program Penelitian dan Pengembangan.	2.144.906.600
JUMLAH	22.164.572.964

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Secara keseluruhan tujuan dan sasaran seluruh kegiatan untuk Tahun 2023 sudah direalisasikan sesuai dengan rencana tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,13%, adanya deviasi realisasi fisik dibanding realisasi keuangan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : Ada beberapa sisa belanja pada sub kegiatan seperti belanja perjalanan dinas biasa yang digunakan untuk perjalanan dinas ke luar provinsi Riau dan belanja perjalanan dinas dalam kota, yang digunakan untuk perjalanan dinas di dalam provinsi Riau, ini disebabkan adanya sisa at cost tiket pesawat, sisa biaya penginapan luar daerah yang dibayarkan dibawah standar harga dan ada juga tiket pesawat, penginapan, transportasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan serta tidak seluruh belanja perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan.

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar pencapaian target realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Kampar lebih optimal, yaitu:

- a) Merencanakan dengan optimal penganggaran tiap program dan kegiatan agar target keuangan tercapai.
- b) Meningkatkan pelaksanaan Anggaran secara teratur sesuai scedul yang telah direncanakan.
- c) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional' dalam menjalankan tugas.
- d) diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan pembangunan daerah

4. Keuangan

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatkannya pengelolaan perencanaan penganggaran Daerah	Jumlah Ranperda APBD/P APBD tepat waktu Jumlah Ranperbub APBD/P APBD tepat waktu	80 Set 80 Set
2	Meningkatnya pelayanan panatausahaan pengelolaan keuangan	Persentase layanan SP2D dan SKPP yang di selesaikan sesuai SOP	95%

3	Meningkatnya kualitas pelaporan pertanggung jawaban sesuai SAP	Persentase SKPD/PPKD menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu Presentase audit BPK	95% 91%
4	Meningkatnya tertib pengelolaan aset Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terinput sampai selesai pada SIPKD Barang milik daerah Persentase SDM yang memiliki kompetensi dalam mengelola Barang Milik Daerah	90% 90%

**Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Kampar Tahun 2023**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGARAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.948.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	124.948.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.430.373.859
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.421.007.359
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.366.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.245.237.370
5	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	1.114.602.370
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.434.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.436.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.265.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.240.196
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.369.000
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.235.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	845.636.196
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.714.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.730.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	915.984.000
	Penataan Organisasi	49.072.000
15	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.072.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	397.607.929.442
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	722.212.250
16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	63.183.000
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	44.244.750
18	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-
20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	262.657.750

21	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	221.056.750
22	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	131.070.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	791.397.300
23	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	98.570.000
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	149.659.400
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	543.167.900
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	846.979.000
25	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95.265.000
26	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	751.714.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	395.247.340.892
27	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	376.985.855.080
28	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.448.219.800
29	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.813.266.012
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.391.424.500
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.391.424.500
30	Pengamanan Barang Milik Daerah	529.989.000
31	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	611.317.500
32	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	250.118.000
	TOTAL	412.356.939.367

➤ Permasalahan dan Solusi

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 yang dibawah 90% disebabkan faktor eksternal seperti Sosialisasi terhadap PPK-SKPD dan Pengurus Barang Pengguna dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan serta efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil analisis dengan cara membandingkan dokumen-dokumen tersebut diatas secara kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan program-program yang terkait, sudah tepat dan semuanya sudah sesuai dan selaras dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Pelaksanaan kegiatan biaya APBD tahun 2023 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat pada rata-rata presentase pencapaian

rencana tingkat capaian seluruh kegiatan yang mencapai **98,42%**. Namun demikian masih dihadapkan dengan berbagai hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja instansi.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, pada tahun 2023 ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membangun Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan pengelolaan keuangan sebagai penunjang bagi Pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan Aset yang Akuntabel dan tepat sasaran ;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset sebagai penunjang tupoksi SKPD;
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023 sebesar **98,42%**.

**Perjanjian Kinerja dan Program
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	278.735.827,42
2.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pajak Daerah	86 Orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.823.601.209
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.766.363.400
JUMLAH		20.589.964.609

➤ Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah:

1. Pendapatan Asli daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah.
2. Dana Perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat.
3. Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Masih diperlukan cara penentuan Potensi Pendapatan Daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 Tahun kedepan.

Adapun solusi yang dapat disarankan dalam menghadapi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan Bimtek Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Fasilitasi Dana Perimbangan dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Kepegawaian

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur Sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	±2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar
2.	Meningkatnya pelayanan Kepegawaian yang terlayani	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	4 (Sangat Baik) 100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.054.566.521	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	3.415.814.000	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	806.862.700	APBD
TOTAL		65.277.243.221	APBD

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dalam pengumpulan data-data dan koordinasi internal sehingga berakibat pada kurang akuratnya dalam penetapan indikator dan sasaran kinerja terutama jangka menengah dan panjang.
2. Kurang disiplin dalam penggunaan anggaran terutama terutama ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Masih terdapat kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program oleh Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BKPSDM baik segi kualitas dan kuantitas masih menjadi hambatan pada proses percepatan hasil kerja.
2. Respon Koordinasi Instansi lain masih rendah.
Selaku instansi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan manajemen pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar membutuhkan pasrtisipasi aktif dari instansi lain dalam pelaksanaan program-program kerja terutama yang berkaitan dengan informasi data kepegawaian di masing-masing instansi.
3. Masalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Kampar saat ini masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan program

6. Inspektorat Daerah

Perjanjian Kinerja dan Program Inspektorat Kabupaten Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	1. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI	85%
		2. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	65%
		3. Persentasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal Baik	77%
		2. Jumlah Perangkat daerah dengan Nilai AKIP Minimal Baik	1
		3. Nilai SAKIP Inspektorat	75
3.	Meningkatnya Kapasitas APIP	1. Level Kapasitas APIP	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.056.783.003
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.077.560.000
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	678.606.000

➤ Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dikemukakan merupakan pencapaian kegiatan fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan secara keseluruhan 93,45%. Pada umumnya semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kampar :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mengemban tugas dan pelaksanaan fungsi pengawasan, kemampuan aparatur yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kampar masih memerlukan perhatian khusus, baik kualitas maupun kuantitas karena latar belakang Pendidikan yang berbeda sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan cara memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, personil yang ada belum seluruhnya mendapat Pendidikan dan Pelatihan teknis

pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan sangat dirasakan kelemahannya dan hasil yang diperoleh belum optimal.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mengemban tugas dan pelaksanaan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kampar masih memerlukan perhatian khusus, karena lokasi pengawasan pada 21 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan se Kabupaten Kampar dan kondisi bangunan kantor yang kurang memadai dengan luas bangunan 431.675 M2 yang ditempati oleh 63 orang pegawai dan 15 orang THL ditambah kondisi bangunan yang sudah tua.

Sedangkan jumlah kendaraan dinas/operasional pada Inspektorat baru ada 1 unit double cabin, yang seharusnya dibutuhkan 3 unit double cabin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui :

1. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat teknis fungsional dan structural, baik yang diadakan oleh badan Diklat Kemendagri, BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Mengadakan koordinasi/konsultasi teknis dengan berbagai aparat pengawasan (Inspektorat Provinsi Riau, BPKP, BPK dan Irjen Kemendagri) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan
3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan merumuskan rencana program kerja tahunan dengan APiP, melaksanakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan aparat pengawas sebelum temuan dituangkan dalam LHP.
4. Memberikan motivasi dan penilaian kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas.
5. Memeberikan pengertian tentang arti pentingnya pengawasan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui kegiatan sosialisasi pengawasan.
6. Meningkatkan pelaksanaan membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaaan tepat waktu kepada pihak terkait.
7. Mengefektifkan pemantauan terhadap tindak lanjut trmuan hasil pemeriksaan APiP dan BPK-RI.
8. Mengadakan pemuktahiran data dan larwasda tingkat kabupaten secara rutin.

9. Menyewa sarana transportasi untuk menjangkau lokasi pengawasan. Adanya permasalahan yang dihadapi semuanya dapat diatasi dengan mengoptimalkan kegiatan secara efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan dana yang tersedia

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.321.183.998
2	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik.	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisai/pembinaan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kampar	500 Orang	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.282.795.600
3	Meningkatkan penyelesaian konflik yang ditangani	Jumlah konflik yang terselesaikan .	25 Konflik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.586.622.750
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	729.621.500
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.557.667.800
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.902.884.100

Dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, untuk mewujudkan capaian sasarannya sudah mencapai 98.62 %, dengan realisasi anggaran 91.59 %, yaitu dari anggaran sebesar Rp. 21,380,775,748 dan terealisasi sebesar Rp. 19,902,453,172. Dari hasil capaian di atas menunjukkan bahwa komitmen aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dengan Langkah dan upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi, Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan tupoksi dan keahlian sehingga pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi anggaran.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan mekanisme manajemen internal organisasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi berbagai Program dan Kegiatan.

Tabel 3.1.1

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Lokalitas sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN PENDIDIKAN						
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.353.000,00	275.319.027,00	75,15
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.485.300,00	212.469.127,00	75,21
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.867.700,00	62.849.900,00	74,94
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	565.097.700.292,00	548.505.249.544,00	97,06
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	565.046.324.292,00	548.455.477.644,00	97,06
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.776.000,00	32.174.500,00	95,26
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.800.000,00	8.797.400,00	99,97
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240.249.850,00	214.960.000,00	89,47
				SUB KEGIATAN :			
				1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	240.249.850,00	214.960.000,00	89,47
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.071.286,00	1.339.458.153,00	92,05
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.764.000,00	68.848.000,00	92,09
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.330.000,00	52.250.000,00	99,85
				3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.022.936,00	51.938.550,00	99,84
				4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	599.526.800,00	599.526.800,00	100,00
				5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.348.000,00	205.383.803,00	67,04
				6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.079.550,00	361.511.000,00	97,68
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.690.394.280,00	4.407.102.959,00	93,96
				SUB KEGIATAN :			

				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.746.340,00	264.003.869,00	81,30
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.929.500,00	849.834.100,00	98,83
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.505.718.440,00	3.293.264.990,00	93,94
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.645.612,00	199.548.300,00	75,98
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.645.612,00	199.548.300,00	75,98
2	URUSAN KESEHATAN							
	DINAS KESEHATAN		1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	793.577.200,00	648.862.390,00	81,76
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	569.105.900,00	496.231.090,00	87,19
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	53.931.000,00	28.677.000,00	53,17
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36.056.000,00	9.373.000,00	26,00
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.134.000,00	8.134.000,00	100,00
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.350.300,00	106.447.300,00	84,25
			2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.656.518.382,00	107.217.588.121,00	98,68
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108.409.802.582,00	106.971.050.699,00	98,67
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	246.715.800,00	246.537.422,00	100
			3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.428.000,00	38.828.000,00	68,81
					SUB KEGIATAN :	39.228.000,00	38.828.000,00	98,98
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.200.000,00	0,00	0,00
			5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.563.116.400,00	1.356.825.083,00	
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.116.000,00	0,00	0,00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	845.578.400,00	771.276.299,00	91,21
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.096.000,00	38.990.000,00	82,79
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544.858.000,00	462.761.784,00	84,93
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.168.740.755,00	6.568.198.691,00	91,62

					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.972.755,00	222.160.691,00	
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.834.768.000,00	6.346.038.000,00	92,85
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.459.534,00	818.371.393,00	78,73
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.696.841,00	82.729.393,00	98,84
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.106.693,00	61.680.000,00	
				3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	71.375.000,00	50.866.000,00	71,27
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	797.281.000,00	623.096.000,00	
				8	Peningkatan Pelayanan BLUD	33.353.103.963,00	0,00	0,00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	33.353.103.963,00	0,00	0,00
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG		1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.943.800,00	33.761.980,00	99,46
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.943.800,00	33.761.980,00	99,46
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.485.950,00	8.395.040,00	98,93
				3	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	8.485.950,00	8.485.950,00	100,00
				4	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.485.950,00	8.395.040,00	98,93
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.062.452.373,00	36.810.203.616,00	94,23
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.057.135.473,00	36.810.203.616,00	94,25
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.316.900,00	0,00	0,00
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	399.050.000,00	388.648.056,00	97,39
					SUB KEGIATAN :			
				1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	97.510.000,00	88.370.000,00	90,63
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	301.540.000,00	300.278.056,00	99,58
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.211.469.350,00	3.104.173.780,00	96,66

					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.950.000,00	79.694.590,00	88,60
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.486.000,00	265.509.800,00	96,73
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.112.003.000,00	1.032.436.650,00	92,84
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	871.151.550,00	868.764.200,00	99,73
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	506.318.800,00	503.263.129,00	99,40
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.560.000,00	354.505.411,00	99,15
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.336.483.464,0	7.475.560.697,00	89,67
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.350.102.000,00	1.920.687.485,00	81,73
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.986.381.464,00	5.554.873.212,00	92,79
				6	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.306.920.744.00	0.00	0.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.306.920.744,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	589,939,350.00	548,895,300.00	93.04
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320,869,350.00	290,434,300.00	90.51
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	104,460,000.00	103,060,000.00	98.66
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16,608,000.00	8,070,000.00	48.59
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81,852,000.00	81,181,000.00	99.18
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,150,000.00	66,150,000.00	100.00
				11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,161,764,726	9,926,525,206	97.69
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,100,229,726	9,870,591,784	98.06
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	61,535,000	55,933,422	72.78
				111	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

					SUB KEGIATAN :			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94,000,000	12,627,500	13.43
			1V		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,360,000	7,779,500	50.65
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,145,952,250	1,045,405,000	91.23
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263,164,000	192,332,400	73.08
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118,393,000	115,824,900	97.83
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,040,000	9,020,000	31.06
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,277,824,000	1,240,693,141	97.09
			V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	949,400,000	832,900,000	96.08
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	667,360,000	600,860,000	96.51
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282,040,000	232,040,000	90.15
			VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,423,624,000	1,292,405,693	93.17
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298,818,000	281,542,693	89.81
				2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,360,000	7,779,500	95.89
				3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,145,952,250	1,045,405,000	90.20
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263,164,000	192,332,400.00	99.82
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118,393,000	115,824,900	96.89
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,040,000	9,020,000	99.85
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,277,824,000	1,240,693,141	97.87
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157,000,000	129,239,500.	87.17
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967,806,000	881,623,500	94.51
			VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,493,458,200	1,143,801,578.	92.03
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167,455,800	88,695,000	86.11

				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363,332,400	305,416,578	97.07
				3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar	877,670,000	749,690,000	90.92
				4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85,000,000	0.00	
				I	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,032,181,100	5,277,053,045	87.48
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi Dan Rawa	218,984,000	215,971,500	98.62
				2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	3,541,990,000	3,041,432,745	85.87
				3	Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,879,397,700	1,708,754,900	90.92
				4	Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	391,809,400	310,893,900	79.35
				II	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,625,760,000.00	2,553,721,176.00	97.26
					SUB KEGIATAN:			
				1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan Spam	108,020,000.00	107,698,000.00	99.70
				2	Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	0.00	0.00	#DIV/0!
				3	Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan	2,517,740,000.00	2,446,023,176.00	97.15
				III	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,402,465,000.00	3,113,813,180.00	91.52
				1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	3,402,465,000.00	3,113,813,180.00	91.52
				IV	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,423,009,367.00	13,501,313,041.00	93.61
				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	417,400,000.00	415,512,600.00	99.55
				2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13,119,475,847.00	12,353,738,941.00	94.16
				3	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase	886,133,520.00	732,061,500.00	82.61
				IV	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	210,504,312,331.00	166,993,442,512.00	79.33
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan	1,805,742,000.00	1,770,951,570.00	98.07
				2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1,556,429,000.00	1,547,083,000.00	99.40
				3	Pembangunan Jalan	51,982,999,198.00	43,436,618,955.00	83.56
				4	rekonstruksi jalan	41,407,370,000.00	16,494,349,000.00	39.83

				5	rehabilitasi jalan	0.00	0.00	0
				6	pemeliharaan berkala jalan	510,840,000.00	510,173,350.00	99.87
				7	pemeliharaan rutin jalan	1,722,123,000.00	1,615,867,150.00	93.83
				8	pembangunan jembatan	105,745,676,925.00	97,186,740,424.00	91.91
				9	rehabilitasi jembatan	1,532,240,000.00	1,518,323,857.00	99.09
				10	pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	4,240,892,208.00	2,913,335,206.00	68.70
				V	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	222,014,200.00	121,939,200.00	54.92
					Sub Kegiatan :			
				VI	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	222,014,200.00	121,939,200.00	54.92
				1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	222,014,200.00	121,939,200.00	54.92
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247,033,600	220,957,000	92.22
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146,911,000	142,054,450	96.69
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46,676,000	32,737,450	70.14
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23,586,000	17,503,400	74.21
				4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	26,926,410	16,020,800	59.50
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,010,632	27,010,000	100.00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,893,310,876	3,884,652,313	79.39
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,835,859,026	3,827,203,513	79.14
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,387,166	14,386,500	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	43,064,684	43,062,300	99.99
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,603,000	70,380,000	75.19
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66,375,000	51,000,000	76.84
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27,228,000	19,380,000	71.18
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	705,869,615	645,191,093	91.40

					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,346,325	5,346,325	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264,309,688	255,577,688	96.70
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,184,000	57,184,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,590,602	21,315,852	90.36
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	5,400,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,039,000	300,367,228	85.81
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943,775,400	925,068,072	98.02
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,728,000	42,164,320	90.23
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,967,400	27,888,752	99.72
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	869,080,000	855,015,000	98.38
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,082,152	564,343,440	97.62
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110,440,000	107,987,960	97.78
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147,254,452	136,256,480	92.53
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320,387,700	320,099,000	99.91
5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
				I	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.400.	3.462.050.	98.93
					Sub Kegiatan :			
				1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	3,499,400.	3,462,050.	98.93
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,678,792,910.	3,558,039,971.	96.72
					Sub Kegiatan :			
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3,678,792,910.	3,558,039,971.	96.72
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	3,499,400.	3,462,060.	98.93
				III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102,345,000	101,267,500	98.95
					Sub Kegiatan :			

				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102,345,000	101,267,500.	98.95
				I.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747,682,650.	742,259,350.	99.27
					Sub Kegiatan :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,537,000.	10,511,000.	99.75
				2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	82,003,100.	79,864,800.	97.39
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	321,460,000.	320,411,000.	99.67
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,557,550.	11,557,550.	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	64,483,000.	62,588,000.	97.06
				6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	64,483,000.	62,588,000.	97.06
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	257,642,000.	257,327,000.	99.88
				I.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,490,273,484.	8,368,185,621.	98.56
					Sub Kegiatan :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	8,490,273,484.	8,368,185,621.	98.56
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,457,305,604.	8,335,226,921.	98.56
				I.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734,928,925.	686,025,860.	93.35
					Sub Kegiatan :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,236,975.	84,423,175.	85.07
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	616,027,250.	581,938,185.	94.47
				3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	19,664,700.	19,664,500.	100.00

						6 Kegiatan / 23 Sub Kegiatan	6 Kegiatan / 23 Sub Kegiatan	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.274.360.944	7.835.007.067	94,69
	DINAS SOSIAL					8.274.360.944	7.835.007.067	94,69
				I.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.874.750	381.088.550	83,60
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	399.829.800	327.735.150	81,97
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.704.300	11.144.000	87,72
				3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.168.000	12.951.000	98,35

				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.390.000	4.746.500	88,06
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.394.650	7.286.900	98,54
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.388.000	17.225.000	99,06
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.375.663.072	3.271.004.699	96,90
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.358.067.072	3.253.526.699	96,89
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.596.000	17.478.000	99,33
			III	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		954.329.000	882.479.514	92,47
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.625.600	20.472.000	76,89
				2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	532.095.400	526.500.400	98,95
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.260.000	39.860.000	99,01
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.700.000	56.631.540	99,88
				5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	25.650.000	10.404.000	40,56
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	272.998.000	228.611.574	83,74
			IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.413.786.000	1.314.515.450	92,98
				SUB KEGIATAN :				
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	419.052.000	336.880.500	80,39
				2	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	818.000.000	804.034.950	98,29
				3	Pengadaan Mebel	176.734.000	173.600.000	98,23
			V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.138.504.922	1.103.741.930	96,95
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	160.441.850	135.711.914	84,59
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	978.063.072	968.030.016	98,97
			VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		936.203.200	882.176.924	94,23
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.571.200	109.684.000	94,91
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.042.000	306.736.724	89,42
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.540.000	45.750.000	85,45

				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.050.000	420.006.200	99,05
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.645.112.985	7.346.106.350	96,09
	DINAS KETAHANAN PANGAN		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113.471.900	112.049.900	98,75
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.741.900	108.349.900	98,73
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.730.000	3.700.000	99,20
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.848.344.602	2.777.698.273	97,52
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
			III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		557.994.950	510.663.132	91,52
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.575.000	3.575.000	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.597.700	286.933.450	94,82
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.748.000	23.180.200	97,61
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.074.250	16.074.250	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	19.710.000	99,73
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.236.000	161.190.232	83,85
			IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		364.057.464	349.773.840	96,08
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	19.800.000	100,00
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.257.464	329.973.840	95,85
			V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		174.632.205	147.391.505	84,40
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.397.295	91.781.195	78,18
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.784.910	25.160.310	93,93
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000	30.450.000	100,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					22.357.842.715	21.723.271.185	97,16
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		128.310.650	126.088.850	98,27
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.718.950	93.689.950	97,88
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	490.000	490.000	100,00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	490.000	490.000	100,00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.840.000	1.840.000	100,00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.840.000	1.840.000	100,00
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.748.950	9.748.950	100,00
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.182.750	17989950	98,94
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.390.516.938	4.050.352.565	92,25

					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.381.367.988	4.041.203.615	92,24
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.148.950	9.148.950	100,00
			III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.002.248.440	985.819.825	98,36
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.809.000	17.809.000	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.242.500	402.557.101	99,58
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.987.000	17.987.000	100,00
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.272.000	71.424.000	92,43
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.005.940	52.833.540	92,68
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	3.600.000	72,00
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.932.000	419.609.184	99,21
			IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.592.083.151	10.417.650.534	98,35
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.263.615	162.308.998	60,06
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.170.000	17.839.000	88,44
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.301.649.536	10.237.502.536	99,38
			V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		264.026.800	236.293.475	89,50
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.026.800	236.293.475	89,50
9	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10,340,536,907	9,735,568,272	94.15
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75,245,000	71,362,008	94.84
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66,520,000	62,646,008	94.18
				2	koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	1,886,000	1,886,000	100.00
				3	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	1,723,000	1,721,000	99.88
				4	koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	1,723,000	1,723,000	100.00
				5	koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	1,723,000	1,721,000	99.88
				6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1,670,000	1,665,000	99.70
					Administrasi keuangan perangkat daerah	3,256,829,610	2,777,455,577	85.28
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	3,219,304,610	2,739,930,577	85.11
				2	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	37,525,000	37,525,000	100.00
					Administrasi umum perangkat daerah	4,903,922,500	4,843,768,769	98.77
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,760,000	10,760,000	100.00
				2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,755,978,000	3,713,434,450	98.87
				3	penyediaan bahan logistik kantor	13,116,000	13,116,000	100.00

			4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	728,482,500	728,317,500	99.98
			5	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	395,586,000	378,140,819	95.59
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36,000,000	32,785,000	91.07
				sub kegiatan :			
			1	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36,000,000	32,785,000	91.07
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1,627,544,341	1,602,244,941	98.45
				sub kegiatan :	59,117,470	56,753,070	96.00
			1	penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	3,926,000	39.26
			2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	147,702,825	134,777,425	91.25
			3	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,469,841,516	1,463,541,516	99.57
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	440,995,456	407,951,977	92.51
				sub kegiatan :			
			1	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	228,943,466	200,624,715	87.63
			2	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	95,301,990	90,868,762	95.35
			3	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	88,700,000	88,498,500	99.77
			4	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	28,050,000	27,960,000	99.68
10	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,437,872,594	4,996,763,118	91.89
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	260,182,800	249,520,012	95.90
				sub kegiatan :			
			1	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	145,109,650	139,857,312	96.38
			2	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	21,798,000	21,406,000	98.20
			3	evaluasi kinerja perangkat daerah	93,275,150	88,256,700	94.62
				administrasi keuangan perangkat daerah	3,142,533,807	2,936,497,944	93.44
				sub kegiatan :			
			1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	3,136,904,757	2,931,033,044	93.44
			2	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	5,629,050	5,464,900	97.08
				administrasi kepegawaian perangkat daerah	125,902,000	119,196,000	94.67
				sub kegiatan :			
			1	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100,883,000	94,827,000	94.00
			2	pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	25,019,000	24,369,000	97.40
				administrasi umum perangkat daerah	1,000,357,450	884,508,272	88.42
				sub kegiatan :			
			1	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	25,000,000	100.00
			2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	402,671,400	398,091,300	98.86
			3	penyediaan peralatan rumah tangga	22,783,000	22,733,000	99.78
			4	penyediaan bahan logistik kantor	66,910,000	61,699,400	92.21
			5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61,546,050	57,323,000	93.14
			6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27,900,000	19,404,000	69.55

				7	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	353,172,000	259,882,572	73.59
				8	penatausahaan arsip dinamis pada skpd	8,000,000	8,000,000	100.00
				9	dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	32,375,000	32,375,000	100.00
					pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	74,500,000	73,741,000	98.98
					SUB KEGIATAN :			
				1	pengadaan mebel	65,600,000	65,531,000	99.89
				2	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	8,900,000	8,210,000	92.25
					penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	623,395,429	590,354,501	94.70
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan jasa surat menyurat	4,000,000	4,000,000	100.00
				2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91,989,000	80,360,572	87.36
				3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16,928,000	16,928,000	100.00
				4	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	510,478,429	489,065,929	95.81
					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	211,001,108	142,945,389	67.75
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	112,697,108	65,028,000	57.70
				2	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73,314,000	52,927,389	72.19
				3	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24,990,000	24,990,000	100.00
11	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7,078,174,360	6,762,988,554	95.55
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7,078,174,360	6,762,988,554	95.55
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129,432,000	122,137,000	94.36
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	109,564,300	109,064,300	99.54
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,713,410	111,249,300	99.58
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,087,300,551	3,974,553,073	97.24
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4,087,300,551	3,974,553,073	97.24
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,400,000	9,400,000	100.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,400,000	9,400,000	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	811,759,000	786,024,802	96.83
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,452,000	2,452,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	252,343,700	251,015,700	99.47
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,960,000	48,960,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,876,800	24,770,700	99.57
				5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	212,551,500	212,551,500	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	270,575,000	246,274,902	91.02
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243,359,950	201,831,950	82.94

					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	12,954,000	12,954,000	100.00
				2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	230,405,950	188,877,950	81.98
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,221,802,209	1,116,172,818	91.35
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	111,648,000	107,821,109	96.57
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,110,154,209	1,008,351,709	90.83
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353,842,940	332,555,311	93.98
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,785,590	44,614,490	97.44
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	79,948,350	61,023,800	76.33
				3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	24,015,000	23,923,000	99.62
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	204,094,000	202,994,021	99.46
12	URUSAN PERHUBUNGAN					32,110,028,736	31,970,146,376	99.56
		DINAS PERHUBUNGAN			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	248,942,400	248,591,800	99.86
					SUB KEGIATAN :			
				1	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	96,270,000	96,106,000	99.83
				2	koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	105,670,000	105,545,800	99.88
				3	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	47,002,400	46,940,000	99.87
					Administrasi keuangan perangkat daerah	4,567,237,543	4,499,070,765	98.51
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	4,539,165,943	4,471,070,765	98.50
				2	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	28,071,600	28,000,000	99.74
					administrasi kepegawaian perangkat daerah	73,836,000	72,352,813	96.90
					sub kegiatan :			
				1	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	73,836,000	72,352,813	96.89
					administrasi umum perangkat daerah	1,340,925,150	1,336,065,264	99.33
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,902,000	8,802,000	98.88
				2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	284,358,550	282,869,000	99.48
				3	penyediaan bahan logistik kantor	118,020,000	117,820,000	99.83
				4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	189,779,600	188,922,000	99.55
				5	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	133,067,000	132,600,000	99.65
				6	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	606,798,000	605,052,264	99.71
					penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,041,666,588	3,031,170,885	99.65
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	497,627,360	494,624,359	99.40

				2	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2,544,039,228	2,536,546,526	99.71
					pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1,098,540,900	1,093,449,799	99.54
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	146,887,700	145,421,799	99.00
				2	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	186,508,200	184,430,000	98.89
				3	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	692,949,000	691,678,000	99.82
				4	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	72,196,000	71,920,000	99.62
					penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	21,703,020,155	21,653,585,050	99.77
					sub kegiatan :			
				1	penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	7,065,634,000	7,041,563,000	99.66
				2	rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	14,637,386,155	14,612,022,050	99.83
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9,289,564,757	8,980,647,576	96.67
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212,734,500	204,369,076	96.07
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,017,250	20,770,750	86.48
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	55,852,000	53,985,000	96.66
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	132,865,250	129,613,326	97.55
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,151,288,322	4,040,972,330	97.34
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,124,113,922	4,013,797,930	97.33
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27,174,400	27,174,400	100.00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193,019,850	188,055,607	97.43
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	154,217,850	154,136,100	99.95
				2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	30,670,000	27,045,000	88.18
				3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,132,000	6,874,507	84.54

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,661,081,485	1,644,106,588	98.98
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	26,144,000	25,982,050	99.38
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	405,482,450	403,552,850	99.52
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,256,000	199,334,400	99.54
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	191,639,035	190,556,966	99.44
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28,512,000	22,275,000	78.13
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809,048,000	802,405,322	99.18
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162,035,000	161,040,964.50	99.39
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Pengadaan Mebel	162,035,000	161,040,964.50	99.39
					Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,322,322,000	1,210,514,220	91.54
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318,392,000	215,178,839	67.58
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,003,930,000	995,335,381	99.14
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,587,083,600	1,531,588,790	96.50
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	195,399,600	180,304,350	92.27
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	351,040,000	322,812,800	91.96
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,340,000	97,340,000	100.00
				4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	545,304,000	544,416,790	99.84
				5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	398,000,000	386,714,850	97.16
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8,808,092,175	8,364,553,999	94.96
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,513,000	133,329,700	98.39
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			

				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,700,000	98,668,700	97.98
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	34,813,000	34,661,000	99.56
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,860,099,175	5,613,556,079	95.79
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,835,583,175	5,589,115,079	95.78
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,516,000	24,441,000	99.69
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63,030,000	63,030,000	100.00
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32,400,000	32,400,000	100.00
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,630,000	30,630,000	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,207,454,150	1,025,493,609	84.93
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7,596,000	7,590,000	99.92
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162,970,000	161,824,580	99.30
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146,149,000	144,043,400	98.56
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	179,162,150	178,652,950	99.72
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000	9,600,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701,977,000	523,782,679	74.62
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	748,788,000	747,127,117	99.78
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	Pengadaan Mebel	139,295,000	138,089,000	99.13
				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292,883,000	292,653,000	99.92
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316,610,000	316,385,117	99.93
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,996,030,924	1,922,791,715	96.33
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	242,248,740	228,768,976	94.44
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,753,782,184	1,694,022,739	96.59

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah	793,207,850	782,017,494	98.59
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303,236,950	292,170,595	96.35
			2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,130,900	55,130,000	100.00
			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	434,840,000	434,716,899	99.97
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				8.541.464.244	8.152.215.354	95,44
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.942.300	16.942.300	100,00
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.935.000	2.935.000	100,00
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.732.500	3.732.500	100,00
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.959.400	2.959.400	100,00
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.350.000	2.350.000	100,00
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.558.400	2.558.400	100,00
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.407.000	2.407.000	100,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.479.503.568	3.289.467.209	94,54
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.477.278.568	3.287.242.209	94,53
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.225.000	2.225.000	100,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.435.000	5.300.000,00	97,52
				SUB KEGIATAN :			
			1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.435.000	5.300.000,00	97,52
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.200.000	63.284.000	98,57
				SUB KEGIATAN :			
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.000.000	36.000.000	100,00
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.200.000	27.284.000	96,75
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	702.801.000	695.313.336	98,93
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.925.000	30.925.000	100,00
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.515.600	358.910.600	99,83
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.224.000	31.224.000	100,00
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.896.400	24.896.400	100,00

			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	100,00
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.040.000	242.157.336	97,24
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.958.180.000	2.824.809.705	95,49
				SUB KEGIATAN :			
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000	560.000.000	100,00
			2	Pengadaan Mebel	23.780.000	23.700.000	99,66
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.374.400.000	2.241.109.705	94,39
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.147.539.376	1.091.185.804	95,09
				KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.202.800	172.599.228	95,78
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	967.336.576	918.586.576	94,96
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.863.000	165.913.000	99,43
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.757.000	142.957.000	99,44
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.106.000	22.956.000	99,35
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	8.900.149.473	8.521.816.733	95,75
	DINAS PERIKANAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	360.780.550	335.100.238	92,88
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.460.850	294.780.538	91,99
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Kinerja	40.319.700	40.319.700	100,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.067.175.604	3.998.666.820	98,32
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.063.175.804	3.994.667.020	98,31
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.800	3.999.800	100,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.872.000	49.530.000	99,31
				SUB KEGIATAN :			
			1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49.872.000	49.530.000	99,31
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	996.252.050	894.009.110	89,74
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	9.455.000	94,56
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.445.000	303.158.000	97,97

				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.252.000	41.948.000	99,28
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.080.000	4.080.000	100,00
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.078.050	14.078.050	100,00
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.140.000	9.360.000	71,23
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	603.258.000	511.930.060	84,86
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.976.000	283.709.900	88,67
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.000.000	105.048.000	86,10
				2	Pengadaan Mebel	197.976.000	178.661.900	90,24
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.877.261.582	1.808.650.541	96,35
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	193.119.230	184.781.543	95,68
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.684.142.352	1.623.868.998	96,42
					Pemeliharaan Barqang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.831.687	1.152.150.124	93,76
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.175.657	162.800.124	69,82
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.992.000	5.272.000	52,76
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	985.664.030	984.078.000	99,84
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.949.669.284	5.647.861.193	94,93
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	124.038.950	120.838.450	97,42
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.904.950	98.704.450	96,86
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.134.000	22.134.000	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.946.681.889	2.903.977.996	98,55
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.939.025.039	2.896.321.146	98,55
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.656.850	7.656.850	100,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.761.000	55.507.900	89,88
					SUB KEGIATAN :			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.761.000	55.507.900	89,88
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	932.167.690	816.064.438	87,54

					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.530.000	7.506.000	99,68
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.256.640	321.190.640	99,98
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.640.000	124.960.000	99,46
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.291.050	105.287.050	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.960.000	50.880.000	99,84
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.490.000	206.240.748	64,15
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	734.459.000	699.243.500	95,21
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	465.000.000	93,00
				2	Pengadaan Mebel	35.215.000	35.131.500	99,76
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.244.000	199.112.000	99,93
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962.089.205	885.277.909	92,02
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	91.613.645	41.827.664	45,66
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.475.560	843.450.245	96,90
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.471.550	166.951.000	88,58
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.859.200	83.271.000	86,87
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.242.350	72.310.000	89,01
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.370.000	11.370.000	100,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	18.966.882.189	17.557.691.215	92,57
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.202.650	6.202.650	100,00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.202.650	6.202.650	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.497.751.209	13.295.385.877	91,71
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14.491.516.259	13.289.150.927	91,70
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.234.950	6.234.950	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.624.147.100	1.516.825.365	93,39

					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	59.696.000	34.116.755	57,15
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.690.000	309.662.000	99,99
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.800.000	241.740.000	99,98
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.523.100	189.518.500	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.597.000	160.584.000	99,99
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	662.841.000	581.204.110	87,68
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.787.500	606.078.000	97,16
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	551.787.500	541.236.000	98,09
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	64.842.000	90,06
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.719.744.630	1.647.440.223	95,80
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.323.750	56.248.516	72,74
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.560.000	34.560.000	100,00
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.607.860.880	1.556.631.707	96,81
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.249.100	485.759.100	98,08
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.947.000	28.647.000	92,57
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.832.100	24.432.100	79,24
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	433.470.000	432.680.000	99,82
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL					6.603.892.187	6.354.640.600	96,23
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.990.100	313.135.690	91,03
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272.950.100	243.503.690	89,21
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.440.000	49.034.000	97,21
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.600.000	20.598.000	99,99
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.852.686.341	3.692.456.241	95,84
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.205.341	3.658.975.241	95,80

				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.481.000	33.481.000	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	985.548.740	949.394.623	96,33
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.746.000	28.746.000	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.348.140	350.848.140	99,86
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.878.500	87.878.500	100,00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.484.100	92.484.100	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.850.000	19.850.000	100,00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.242.000	369.587.883	91,20
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.010.000	42.010.000	100,00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	42.010.000	42.010.000	100,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.594.400	994.505.190	98,60
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.816.000	141.912.355	94,10
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.778.400	852.592.835	99,40
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.062.606	363.138.856	97,86
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.848.606	270.924.856	97,16
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.214.000	92.214.000	100,00
20	URUSAN INDUSTRI							
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.168.000	187.131.704	93,02
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	101.310.000	97.083.200	95,83
				2	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	3.852.000	3.828.000	99,38
				3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	6.541.000	6.541.000	100,00
				4	Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	3.479.000	3.431.000	98,62
				5	Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	9.551.000	9.551.000	100,00

			6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12.807.000	12.727.000	99,38
			7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	63.628.000	53.970.504	84,82
			Administrasi keuangan perangkat daerah		3.617.530.688	3.538.222.682	97,81
			SUB KEGIATAN :				
			1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	3.607.872.688	3.528.564.682	97,80
			2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	6.000.000	6.000.000	100,00
			3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	3.658.000	3.658.000	100,00
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah		37.856.000	37.300.000	98,53
			SUB KEGIATAN :				
			1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	37.856.000	37.300.000	98,53
			Administrasi umum perangkat daerah		653.948.500	570.355.774	87,22
			SUB KEGIATAN :				
			1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
			2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.569.500	94.093.500	94,50
			3	Penyediaan bahan logistik kantor	100.312.000	98.472.000	98,17
			4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.442.000	48.323.000	90,42
			5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.190.000	8.190.000	100,00
			6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	380.435.000	309.277.274	81,30
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1.321.113.760	1.221.351.960	92,45
			SUB KEGIATAN :				
			1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.321.113.760	1.221.351.960	92,45
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.346.988.305	1.254.325.195	93,12
			SUB KEGIATAN :				
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.689.305	147.381.195	88,42
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.299.000,00	1.106.944.000,00	93,79
			Pemeliharaan Barqang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		829.451.019	675.351.100	81,42

				Daerah			
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.906.019,00	227.356.100,00	90,61
			2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	578.545.000	447.995.000	77,43
21	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH						
	SEKRETARIAT DAERAH			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.321.178.300	1.227.083.200	92,88
				SUB KEGIATAN :			
			1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	764.021.250	721.444.700	94,43
			2	koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	90.624.850	84.289.300	93,01
			3	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	99.199.700	95.945.500	96,72
			4	koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	80.430.000	74.512.400	92,64
			5	koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	73.372.500	70.659.500	96,30
			6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	213.530.000	180.231.800	84,41
				Administrasi keuangan perangkat daerah	20.499.689.983	19.467.914.670	94,97
				SUB KEGIATAN :			
			1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	20.178.954.933	19.227.490.270	95,28
			2	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	89.327.700	67.016.100	75,02
			3	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	100.841.900	70.811.600	70,22
			4	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	76.055.750	70.996.300	93,35
			5	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	54.509.700	31.600.400	57,97
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.712.169.000	2.278.967.856	84,03
				SUB KEGIATAN :			
			1	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	114.347.800	101.799.100	89,03
			2	rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	94.597.700	87.534.000	92,53
			3	penatausahaan barang milik daerah pada skpd	2.503.223.500	2.089.634.756	83,48
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.856.648.000	1.758.597.498	94,72
				SUB KEGIATAN :			
			1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	56.259.000	55.159.000	98,04
			2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.210.682.000	1.186.710.364	98,02
			3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.680.800	22.680.800	100,00
			4	koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	3.466.400	0	0,00

				5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	563.559.800	494.047.334	87,67
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.512.677.100	15.666.415.348	94,88
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	564.831.000	563.629.000	99,79
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.275.804.600	1.189.585.050	93,24
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	520.165.000	518.496.729	99,68
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.899.681.000	8.899.183.000	99,99
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	489.470.800	484.245.191	98,93
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.322.800	77.171.800	93,74
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	308.680.000	302.405.442	97,97
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.371.721.900	3.631.699.136	83,07
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.878.459.000	3.771.471.010	97,24
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	551.918.000	545.104.000	98,77
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	811.000.000	774.560.000	95,51
				3	pengadaan mebel	213.907.000	213.393.500	99,76
				4	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	48.615.000	48.010.000	98,76
				5	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.088.967.000	1.082.700.900	99,42
				6	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.164.052.000	1.107.702.610	95,16
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.022.588.836	14.389.236.131	95,78
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.795.000	325.652.000	99,96
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.334.009.100	3.151.397.098	94,52
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.186.040.000	3.182.396.070	99,89
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.176.744.736	7.729.790.963	94,53
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.909.697.910	14.810.675.340	99,34
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.894.473.860	1.873.384.713	98,89
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.149.567.150	2.100.200.416	97,70
				3	Pemeliharaan Mebel	264.660.000	260.920.000	98,59
				4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.520.980.000	1.516.945.740	99,73

				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.857.787.100	4.845.612.001	99,75
				6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.222.229.800	4.213.612.470	99,80
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.468.465.868	1.183.281.380	80,58
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.451.868	0	0,00
				2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	661.946.000	627.247.380	94,76
				3	pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	32.068.000	16.034.000	50,00
				4	penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	600.000.000	540.000.000	90,00
					Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	2.095.244.900	2.094.770.250	99,98
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.512.460.000,00	1.512.280.000,00	99,99
				2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	78.000,00	0,00	0,00
				3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	582.706.900,00	582.490.250,00	99,96
22	URUSAN SEKRETARIAT DPRD							
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	143.892.000	89.892.000	62,47
					SUB KEGIATAN :			
				1	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	28.812.000	28.812.000	100,00
				2	koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	15.270.000	15.270.000	100,00
				3	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	15.270.000	15.270.000	100,00
				4	koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	15.270.000	15.270.000	100,00
				5	koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	15.270.000	15.270.000	100,00
				6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	54.000.000	-	0,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.186.321	4.389.993.184	97,59
					SUB KEGIATAN :			
				1	penyediaan gaji dan tunjangan asn	4.486.913.321	4.389.993.184	97,84
				2	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	11.273.000	-	0,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.524.711.000	1.387.159.249	90,98
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	325.520.000	324.400.000	99,66
				2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.199.191.000	1.062.759.249	88,62

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.877.392.950	3.740.275.600	96,46
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.016.000	33.016.000	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.034.373.950	2.954.208.600	97,36
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.715.000	8.500.000	97,53
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.385.000	35.000.000	58,94
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	741.903.000	709.551.000	95,64
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	588.915.000	586.539.000	99,60
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan mebel	468.915.000	466.939.000	99,58
				2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	120.000.000	119.600.000	99,67
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.700.861.620	2.617.948.896	96,93
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.800.000	98,00
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.990.780	530.731.504	88,31
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.989.000	189.155.000	99,56
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.899.881.840	1.888.262.392	99,39
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.818.628.000	3.188.891.631	83,51
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.510.000	57.339.918	15,91
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.508.000	627.344.183	70,69
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.116.140.000	2.101.708.000	99,32
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.770.000	248.245.300	91,34
				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.700.000	154.254.230	84,43
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.249.161.665	33.677.104.828	98,33
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	33.115.884.665	32.699.814.828	98,74
				2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	1.051.422.000	977.290.000	92,95
				3	Pelaksanaan medical check up DPRD	81.855.000	0	0,00
					Layanan Administrasi DPRD	1.045.309.000	848.933.500	81,21

					SUB KEGIATAN :			
				1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	595.050.000,00	418.146.000,00	70,27
				2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	450.259.000,00	430.787.500,00	95,68
23	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	270,693,900	269,482,000	99.55
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,187,700	101,528,200	99.35
				2	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka- skpd	10,027,700	9,950,200	99.23
				3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	10,027,700	9,944,000	99.17
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	11,377,700	11,300,200	99.32
				5	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA -SKPD	11,377,700	11,252,700	98.90
				6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	10,027,700	10,013,000	99.85
				7	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	115,667,700	115,493,700	99.85
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,777,461,402	2,711,760,663	97.63
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	2,770,229,702	2,704,528,963	97.63
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	7,231,700	7,231,700	100.00
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI	772,136,900	771,572,886	99.93
				1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,470,000	13,470,000	100.00
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	136,860,900	136,671,700	99.86
				3	Penyediaan bahan logistik kantor	24,640,000	24,465,000	99.29
				4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103,850,000	103,675,000	99.83
				5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,960,000	3,960,000	100.00
				6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	489,356,000	489,331,186	99.99
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	798,650,000	780,338,015	97.71
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000	395,772,000	96.77

				2	Pengadaan Mebel	116,550,000	116,145,200	99.65
				3	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	162,100,000	157,500,000	97.16
				4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	111,000,000	110,920,815	99.93
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	113,051,000	107,071,226	94.71
				2	Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor	20,075,000	20,019,500	99.72
				3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	561,521,212	509,685,600	90.77
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	135,254,000	130,451,696	96.45
				2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	71,000,000	71,000,000	100.00
				3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	222,000,000	221,115,930	99.60
24	URUSAN KEWILAYAHAN							
		KECAMATAN KAMPAR KIRI			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,700,315,268	1,566,974,618	92.16
					Sub Kegiatan Meliputi			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,698,715,518	1,565,374,868	92.15
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1,599,750	1,599,750	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,520,000	2,520,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,471,000	76,471,000	100.00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86,762,000	86,762,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,833,200	11,833,200	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,062,000	102,940,000	91.05
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267,467,312	267,467,312	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,171,940	25,171,940	100.00

				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242,295,372	242,295,372	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,300,832	97,240,832	99.94
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,456,832	70,456,832	100.00
				2	Pemeliharaan jasa pemeliharaan	5,144,000	5,144,000	100.00
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	21,700,000	21,640,000	99.72
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	565,398,310.00	565,398,310.00	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	453,802,810	453,802,810	1
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111,595,500	111,595,500	2
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,800,000	19,800,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19,800,000	19,800,000	1
		KECAMATAN TAPUNG HILIR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,566,133,634	1,480,847,493	94.55
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,566,133,634	1,480,847,493	1
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	636,661,400	619,430,400	97.29
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	4,880,000	4,880,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182,600,000	180,575,000	98.89
				3	Belanja Modal Peralatan Mesin	111,746,000	109,721,000	98.19
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312,125,000	312,105,000	99.99
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,518,400	14,518,400	100.00
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,640,000	2,640,000	100.00
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,898,000	104,712,000	87.33
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,674,000	202,732,500	97.15
					SUB KEGIATAN:			

				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,669,000	9,075,000	93.86
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,005,000	193,657,500	97.31
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,582,400	50,582,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,182,400	38,182,000	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,400,000	12,400,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
		KECAMATAN TAPUNG HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,027,684,981	946,314,370	92.08
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,027,684,981	946,314,370	92.08
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,788,000	8,200,000	93.31
					SUB KEGIATAN:			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,788,000	8,200,000	93.31
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	543,834,900	532,931,500	98.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	16,416,000	16,416,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,878,000	120,878,000	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230,646,400	230,633,200	99.99
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,462,500	25,462,500	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,432,000	139,541,800	92.76
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113,523,600.00	108,376,550.00	95.47
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	21,633,600	19,486,550	90.08
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91,890,000	88,890,000	96.74

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,418,215	52,416,300	92.91
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,907,015	43,905,100	91.65
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,511,200	8,511,200	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,200,000	16,200,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,200,000	16,200,000	100.00
		KECAMATAN TAPUNG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,379,819,445	1,312,823,167	95.14
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,379,819,445	1,312,823,167	95.14
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28,224,000	27,429,900	97.19
					SUB KEGIATAN:			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28,224,000	27,429,900.00	97.19
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	451,153,850	427,820,000	94.83
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	4,029,000	3,886,000	96.45
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133,100,000	131,079,000	98.48
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153,219,000	153,219,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,575,850	13,568,500	73.04
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,960,000	3,960,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,270,000	122,107,500	88.31
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,027,402	50,553,000	91.87
					SUB KEGIATAN			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,957,402	40,483,000	90.05
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,070,000	10,070,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	99,887,001	99.89
					SUB KEGIATAN			
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan	100,000,000	99,887,001	

				1	Lain yang Dilimpahkan			99.89
					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,500,000	16,500,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,500,000	16,500,000	100.00
		KECAMATAN TAMBANG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,052,399,049	2,023,348,371	98.58
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,052,399,049	2,023,348,371	98.58
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,978,000	35,978,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35,978,000	35,978,000	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	441,773,000	441,527,000	99.94
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146,980,000	146,980,000	100.00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138,077,000	138,077,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,324,000	18,324,000	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,392,000	138,146,000	99.82
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,806,500	174,066,500	99.01
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,841,500	24,841,500	100.00
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150,965,000	149,225,000	98.85
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,474,200	40,463,000	99.97
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,789,000	24,789,000	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,685,200	15,674,000	99.93
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00

		KECAMATAN KAMPAR		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,346,310,411	2,273,357,227	96.89
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,346,310,411	2,273,357,227	96.89
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	620,153,250	612,244,569	98.72
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201,820,800	201,820,800	100.00
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162,976,000	162,976,000	100.00
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,484,450	49,484,450	100.00
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000	9,000,000	100.00
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196,872,000	188,963,319	95.98
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,900,000	67,900,000	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Pengadaan Mebel	67,900,000	67,900,000	100.00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,302,700	247,955,780	99.46
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	20,015,200	19,030,780	95.08
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229,287,500	228,925,000	99.84
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,706,623	77,706,623	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,226,623	45,226,623	100.00
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,480,000	32,480,000	100.00
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	565,452,108	565,452,108	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	322,092,358	322,092,358	100.00
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243,359,750	243,359,750	100.00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,700,000	9,900,000	84.62
				SUB KEGIATAN:			
			1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,700,000	9,900,000	84.62

		KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,462,244,387	1,382,268,357	94.53
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,462,244,387	1,382,268,357	94.53
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,128,400	365,856,180	99.65
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	10,166,000	10,166,000	100.00
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107,821,200	107,821,200	100.00
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,936,000	65,936,000	100.00
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,489,200	28,489,200	100.00
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,716,000	153,443,780	99.18
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,964,812	131,493,956	98.89
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	10,167,020	8,696,164	85.53
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,797,792	122,797,792	100.00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,015,232	52,599,232	99.22
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	47,065,432	46,649,432	99.12
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,949,800	5,949,800	100.00
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
				SUB KEGIATAN:			
			1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,331,811,791	2,283,876,041	97.94
		KECAMATAN SIAK HULU		SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,331,811,791	2,283,876,041	97.94
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	545,610,900	544,526,500	99.80
				SUB KEGIATAN:			
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	10,366,000	10,366,000	100.00
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,940,300	249,940,300	100.00
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151,803,000	151,803,000	100.00

				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,177,600	27,177,600	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106,324,000	105,239,600	98.98
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153,165,000	150,734,170	98.41
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,540,000	22,109,170	90.09
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128,625,000	128,625,000	100.00
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	73,587,432	73,587,432	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	65,352,432	65,352,432	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,235,000	8,235,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	60,000,000	60.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	60,000,000	60.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
		KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,414,963,413	1,213,962,194	85.79
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,414,963,413	1,213,962,194	85.79
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,400,000	8,588,000	91.36
					SUB KEGIATAN:			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,400,000	8,588,000	91.36
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	258,044,350	250,808,350	97.20
					SUB KEGIATAN:	SUB KEGIATAN:		
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	10,939,000	10,939,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,186,000	78,036,000	94.95
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,200,000	71,200,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,152,350	19,772,350	98.11
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,500,000	2,500,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,067,000	68,361,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,945,600	257,986,785	99.25

					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,145,600	12,186,785	86.15
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,800,000	245,800,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,196,599	46,196,599	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,784,299	38,784,299	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,412,300	7,412,300	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	565,193,864	565,193,864	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	355,379,864	355,379,864	100.00
					KECAMATAN RUMBIO JAYA	987,325,779	947,246,320	95.94
					Keuangan Administrasi Perangkat Daerah			
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	987,325,779	947,246,320	95.54
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	330,078,100	329,850,100	99.93
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,390,000	70,340,000	99.93
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144,229,000	144,199,000	99.98
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,144,100	13,144,100	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102,315,000	102,167,000	99.86
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225,607,740	225,580,113	99.99
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,277,740	17,250,113	99.84
				2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	38,780,000	38,780,000	100.00
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169,550,000	169,550,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,620,976	41,620,976	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,120,976	31,120,976	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,500,000	10,500,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00

					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,800,000	19,237,500	97.16
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19,800,000	19,237,500	97.16
		KECAMATAN KAMPAR UTARA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	717,169,822	605,767,475	84.47
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	717,169,822	605,767,475	84,47
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	375,060,900	371,206,299	98.97
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,948,000	7,948,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	48,171,000	48,171,000	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155,221,400	155,086,400	99.91
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,958,500	25,958,500	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,804,000	6,804,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130,958,000	127,238,399	97.16
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,049,000	44,049,000	100.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	22,500,000	22,500,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213,695,780	208,615,280	97.62
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,486,780	18,486,780	100.00
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195,209,000	190,128,500	97.40
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,895,932	66,895,932	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,013,932	25,013,932	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,800,000	24,800,000.00	100.00
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	17,082,000	17,082,000.00	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,850,000	13,450,000	90.57
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,850,000	13,450,000	99.57
		KECAMATAN KAMPA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,028,920,923	915,295,947	88.96
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,028,920,923	915,295,947	88,96
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	407,389,150.00	406,022,150.00	99.66
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,560,000	2,560,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,968,000	180,968,000	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109,261,800	109,261,800	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,544,350	7,544,350	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,055,000	105,688,000	98.72
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,856,500	172,258,000	99.65
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,891,500	16,293,000	96.46
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155,965,000	155,965,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,573,608	32,573,608	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,935,308	25,935,308	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,638,300	6,638,300	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
		KECAMATAN SALO			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	906,927,735	779,746,575	85.98
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	906,927,735	779,746,575	85,98

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	280,009,400	230,580,986	82.35	
					SUB KEGIATAN:				
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,771,000	83,771,000	83,771,000.00	
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,875,000	58,315,000	97.39	
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,163,400	9,163,400	100.00	
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127,200,000	79,331,586	62.37	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186,468,324	180,287,456	96.69	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,978,600	8,900,232	89.19	
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176,489,724	171,387,224	97.11	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,847,600	41,847,600	95.44	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,747,600	32,747,600	94.24	
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,100,000	9,100,000	100.00	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550.000	11,550.000	100.00	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550.000	11,550.000	100.00	
					KECAMATAN BANGKINANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,829,815,537	1,686,782,769	92.18
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,829,815,537	1,686,782,769	92.18	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	360,623,000	352,092,101	97.63	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,581,600	69,558,701	99.97	
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144,278,000	143,660,000	99.57	
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,027,400	30,987,400	99.87	
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,736,000	107,886,000	93.22	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,739,000	45,739,000	100.00	
					SUB KEGIATAN:				

				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,739,000	45,739,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,516,056	297,429,907	95.79
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,516,056	14,829,907	68.92
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289,000,000	282,600,000	97.79
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,204,800	26,665,600	80.31
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	33,204,800	26,665,600	80.31
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100,000,000	98,800,000	98.80
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	100,000,000	98,800,000	98.80
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,067,240,000	1,067,240,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	854,240,000	854,240,000	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	213,000,000	213,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,500,000	16,500,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,500,000	16,500,000	1
		KECAMATAN KUOK			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,235,024,864	1,104,981,527	89.47
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,235,024,864	1,104,981,527	89.47
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	256,851,000	254,344,050	99.02
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,703,800	66,153,800	99.18
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103,332,000	103,332,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,963,200	8,963,200	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	77,852,000	75,895,050	97.49
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183,964,250	180,541,350	98.14
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,544,250	17,256,350	98.36
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,420,000	163,285,000	98.12

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,011,000	25,716,000	82.93
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23,756,000	18,461,000	77.71
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,255,000	7,255,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8,850,000	8,850,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,850,000	8,850,000	100.00
		KECAMATAN BANGKINANG KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,099,785,960	1,903,632,969	90.66
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,099,785,960	1,903,632,969	90.66
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	5,475,000	5,475,000	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	466,430,150	457,777,348	98.14
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	3,472,000	3,472,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108,596,000	108,596,000	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217,011,000	217,011,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32,549,150	32,549,150	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	2,910,000	97.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,802,000	93,239,198	91.59
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,650,000	18,650,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Mebel	13,994,000	13,994,000	100.00
				2	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4,656,000	4,656,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291,286,600	279,071,190	95.81
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,826,600	61,891,190	89.92
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222,460,000	217,180,000	97.63
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,621,387	103,621,387	100.00

					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,846,387	48,846,387	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,655,000	41,655,000	100.00
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	13,120,000	13,120,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,231,430,731	1,227,899,731	99.71
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	669,698,631	669,698,631	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	561,732,100	558,201,100	99.37
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
		KAMPAR KIRI TENGAH			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,657,952,096	1,606,899,634	96.92
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,657,952,096	1,606,899,634	96.92
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	449,520,820	440,062,000	97.90
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,303,000	9,303,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,679,810	119,527,000	99.87
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175,702,500	173,108,500	98.52
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,641,510	27,495,500	94.40
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,194,000	110,628,000	94.40
					Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,200,000	6,200,000	99.64
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Mebel	6,200,000	6,200,000	99.64
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113,546,800	109,922,732	96.81
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaam Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	17,671,800	15,687,732	88.77
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,600,000	62,360,000	98.05
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	56,879,755	48,828,500	85.85

					Daerah				
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	53,280,755	47,528,500	89.20	
				2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	3,599,000	1,300,000	36.12	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,800,000	18,150,000	19,800,000	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19,800,000	18,150,000	19,800,0001	
					KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,401,512,972	1,275,642,259	91.02
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,401,512,972	1,275,642,259	91.02	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	256,601,574	241,965,254	94.30	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	8,254,500	8,254,500	100.00	
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,519,500	33,519,500	100.00	
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,399,000	83,873,140	95.97	
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,342,574	17,260,524	99.53	
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,086,000	99,057,590	89.98	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104,220,000	104,220,000	100.00	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	104,220,000	104,220,000	100.00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,737,060	266,134,100	99.77	
					SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,727,060	59,719,100	99.99	
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,010,000	206,415,000	99.71	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,777,500	11,776,700	85.48	
					SUB KEGIATAN:				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	2,000,000	0	0.00	

				1	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,777,500	11,776,700	99.99
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100,000,000	100,000,000	100.00
				SUB KEGIATAN:				
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		566,000,000	566,000,000	100.00
				SUB KEGIATAN:				
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	444,000,000	444,000,000	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122,000,000	122,000,000	100.00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11,550,000	11,550,000	100.00
				SUB KEGIATAN:				
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
			KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,006,942,970	883,741,666	87.76
				SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,006,942,970	883,741,666	87.76
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17,176,000	15,234,800	88.70
				SUB KEGIATAN:				
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17,176,000	15,234,800	88.70
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		190,083,590	172,774,000	90.89
				SUB KEGIATAN:				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	2,458,000	2,458,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,042,400	14,822,400	98.54
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,829,000	83,887,000	98.89
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,306,190	5,568,600	67.04
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,448,000	66,038,000	83.12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		55,150,000	54,980,000	99.69
				SUB KEGIATAN:				
				1	Pengadaan Mebel	25,150,000	25,150,000	25,150,000.00
				2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	30,000,000	29,900,000	99.67
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		151,691,950	145,062,700	95.63
				SUB KEGIATAN:				

				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,607,950	15,029,700	96.30
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,084,000	130,033,000	95.55
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,489,108	21,741,500	82.08
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,150,908	21,269,000	88.07
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,338,200	472,500	20.21
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100.00
		KECAMATAN PERHENTIAN RAJA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,389,969,401	1,297,143,833	93.32
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,389,969,401	1,297,143,833	93.32
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	375,807,600	375,715,100	99.98
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	8,606,000	8,606,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,970,400	54,970,400	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214,170,000	214,077,500	99.96
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,442,200	14,442,200	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,619,000	83,619,000	100.00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,390,000	45,390,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	45,390,000	45,390,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,323,768	123,547,303	96.28
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,537,000	7,730,535	81.06
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118,786,768	115,816,768	97.50
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,878,100	40,874,000	99.99

					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,098,100	30,094,000	99.99
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,780,000	10,780,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,500,000	16,500,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,500,000	16,500,000	100.00
		KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,115,757,996	1,038,704,907	93.09
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,115,757,996	1,038,704,907	93.09
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	242,124,600	242,114,100	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	10,906,000	10,906,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,841,900	93,841,900	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,600,000	61,589,500	99.98
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,776,700	15,776,700	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	60,000,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,160,500	197,743,546	98.79
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,575,500	24,158,546	90.91
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173,585,000	173,585,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,878,716	47,803,000	95.84
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,362,716	38,983,000	96.58
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,516,000	8,820,000	92.69
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			

				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	1
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	1

Tabel 3.1.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
					Rp.	Rp.		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8	9		10	11	12
1	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				863.811.315.141	841.682.432.951	97,44	3 Proghram, 7 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan	3 Proghram, 7 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan	98
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	I	Program Pengelolaan Pendidikan	291.029.816.171	286.129.104.518	98,32	4 Kegiatan, 49 Sub Kegiatan	4 Kegiatan, 49 Sub Kegiatan	
			1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	180.668.533.528	177.382.213.609	98,18	1 Kegiatan 17 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 17 Sub Kegiatan	
				Sub Kegiatan :						
				1 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.012.788.923,00	1.739.012.122,00	86,40	8 Ruang	8 Ruang	100
				2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	705.416.000,00	705.416.000,00	100,00	4 Ruang	4 Ruang	100
				3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	626.769.000,00	626.769.000,00	100,00	9 Ruang	9 Ruang	100
				4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	349.124.000,00	349.124.000,00	100,00	2 Ruang	2 Ruang	100
				5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	31.082.025.300,00	29.025.348.780,00	93,38	200 Sekolah	200 Sekolah	100
				6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.033.697.270,00	10.861.238.950,00	98,44	119 Ruang	119 Ruang	100
				7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	191.730.000,00	191.730.000,00	100,00	2 Ruang	2 Ruang	100
				8 Pengadaan Mebel Sekolah	2.345.659.000,00	2.097.783.000,00	89,43	79 Ruang	79 Ruang	100
				9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.130.532.000,00	2.097.314.040,00	98,44	27 Paket	27 Paket	100
				10 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	192.459.050,00	184.607.050,00	95,92	17511 Siswa	17511 Siswa	100
				11 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	431.914.400,00	431.563.000,00	99,92	550 Sekolah	550 Sekolah	100
				12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	371.055.350,00	366.953.500,00	98,89	252 Siswa	252 Siswa	100
				13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	34.291.707.612,00	33.860.040.172,00	98,74	12 Bulan	12 Bulan	100

					14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	152.239.750,00	151.034.090,00	99,21	250 Sekolah	250 Sekolah	100	
					15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.122.205.873,00	93.065.069.905	99,94	12 Sekolah	12 Sekolah	100	
					16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57.342.000,00	57.342.000,00	100,00	12 Sekolah	12 Sekolah	100	
					17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.571.868.000,00	1.571.868.000,00	100,00	9 Ruang	9 Ruang	100	
				2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.884.769.623	86.763.328.740	98,72	1 Kegiatan	16 Sub Kegiatan	1 Kegiatan	16 Sub Kegiatan	
					Sub Kegiatan :								
					1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.565.107.200,00	1.423.336.000,00	90,94	10 Ruang	10 Ruang	100	
					2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	470.716.000,00	470.716.000,00	100,00	2 Ruang ah	2 Ruang	100	
					3	Pembangunan Laboratorium	3.983.447.050,00	3.983.447.050,00	100,00	9 Ruang	9 Ruang	100	
					4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.752.234.240,00	8.490.661.240,00	97,01	53 sekolah	53 sekolah	100	
					5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.632.623.670,00	3.583.169.750,00	98,64	8 ruang	8 ruang	100	
					8	Pengadaan Mebel Sekolah	831.003.000,00	788.451.468,00	94,88	22 ruang	22 ruang	100	
					9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	757.332.000,00	747.764.440,00	98,74	4 paket	4 paket	100	
					10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	516.873.500,00	511.397.050,00	98,94	14713 siswa	14713 siswa	100	
					11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	588.952.250,00	574.046.570,00	97,47	145 Lembaga	145 Lem	100	
					12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	267.628.600,00	264.715.617,00	98,91	210 siswa	210 siswa	100	
					13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.850.371.664,00	28.465.707.838,00	98,69	12 Bulan	12 Bulan	100	
					14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	338.935.500,00	139.365.000,00	41,12	60 peserta	60 peserta	80	
					15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.281.088.949	37.272.308.717	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
					16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.456.000,00	48.242.000,00	99,56	12 Bulan	12 Bulan	100	
				3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.538.908.720,00	18.088.253.430,00	97,57	1 Kegiatan	10 Sub Kegiatan	1 Kegiatan	10 Sub Kegiatan	
					Sub Kegiatan :								
					1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	509.848.400,00	477.344.000,00	93,62	3 Lokal	3 Lokal	100	
					2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.927.244.320,00	1.698.109.200,00	88,11	14 Ruang	14 Ruang	100	

				3	Pengadaan Mebel PAUD	15.008.000,00	14.994.000,00	99,91	1 Lokal	1 Lokal	100
				4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	862.872.000,00	858.670.330,00	99,51	7 Paket	7 Paket	100
				5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	677.575.000,00	674.138.000,00	99,49	12 Bulan	12 Bulan	100
				6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	504.830.000,00	485.181.500,00	96,11	525 Orang	525 Orang	100
				7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.681.797.000,00	1.681.773.000,00	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	852.879.100,00	843.092.500,00	98,85	11 Lembaga	11 Lembaga	100
				9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.433.000.000,00	11.298.536.000,00	98,82	12 Bulan	12 Bulan	100
				10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	73.854.900,00	56.414.900,00	76,39	12 Bulan	12 Bulan	79
				4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.937.604.300,00	692.308.739,00	17,58	1 Kegiatan 6 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 6 Sub Kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	163.870.700,00	138.448.589,00	84,49	2500 Peserta	2500 Peserta	100
				2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	143.025.350,00	142.820.800,00	99,86	240 Lembaga	240 Lembaga	100
				3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	212.513.500,00	211.610.750,00	99,58	240 Orang	240 Orang	100
				4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	97.297.250,00	97.190.100,00	99,89	80 Lembaga	80 Lembaga	100
				5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.203.000.000,00	3.203.000.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
				6	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	117.897.500,00	102.238.500,00	86,72	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	100
				II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	559.214.850	549.316.050	98,23	2 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	2 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	
				1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	431.394.200,00	430.182.100,00	99,72	2 Sub Kegiatan	2Sub Kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	214.017.950,00	213.724.250,00	99,86	4 Dokumen	4 Dokumen	100
				2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	217.376.250,00	216.457.850,00	99,58	100 Orang	100 Orang	100
				2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak	127.820.650,00	119.133.950,00	93,20	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	

					Sub Kegiatan :							
				1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	127.820.650,00	119.133.950,00	93,20	95 Guru	95 Guru	100	
				III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.869.800,00	62.374.400,00	56,77	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan		
				1	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.869.800,00	62.374.400,00	56,77	2 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan		
					Sub Kegiatan :							
				1	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.970.800,00	62.374.400,00	94,55	2500 Guru	2500 Guru	100	
				2	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.899.000,00	0,00	0,00	21 Laporan	0	0	
2	URUSAN KESEHATAN											
		DINAS KESEHATAN		I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.925.733.450	17.754.953.931	99,05	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	99,05	
				1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.925.733.450	17.754.953.931	99,05	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	99,05	
					Sub Kegiatan :							
				1	Pembangunan Puskesmas	4.783.093.500,00	4.760.029.500,00	99,52	10 Unit	8 Unit	80	
				2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.205.956.150,00	5.152.072.554,00	98,96	31 Unit	29 Unit	93,54	
				3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	596.862.400,00	577.518.900,00	96,76	31 Unit	31 Unit	100	
				4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	294.489.000,00	282.260.000,00	95,85	31 Unit	18 Unit	58,06	
				5	Pengadaan Obat, Vaksin	2.800.468.000,00	2.785.198.770,00	99,45	1 Paket	1 Paket	100	
				6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.244.864.400,00	4.197.874.207,00	98,89	1 Paket	1 Paket	100	
				2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.531.148.067,00	29.244.951.875,00	48,31	33 Sub Kegiatan	33 Sub Kegiatan	100	
					Sub Kegiatan :							

					1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.190.673.000,00	351.513.000,00	11,02	19.583 Orang	17.878 Orang	91,3
					2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	52.780.000,00	26.418.000,00	50,05	18.582 Orang	15.783 Orang	84,90
					3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.385.950,00	17.361.000,00	99,86	17.872 Orang	15.652 Orang	87,6
					4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	889.661.000,00	0,00	0,00	65.538 Orang	40.820 Orang	62,3
					5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	695.856.300,00	28.009.800,00	4,03	100	100	100
					6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	787.795.000,00	63.032.000	8,00	136.691 Orang	107.562 Orang	78,68
					7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.417.671.850,00	18.530.000,00	1,31	36.972 Orang	35.892 Orang	98,06
					8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.300.000,00	32.300.000,00	100,00	42.849 orang	28.039 orang	65%
					9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	814.666.000,00	810.644.700,00	99,51	5108 orang	5202 orang	101%
					10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	536.219.900,00	18.014.900,00	3,36	889 orang	1084 orang	121%
					11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.226.117.200,00	9.712.000,00	0,79	14.388 Orang	20.912 Orang	145%
					12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	807.772.900,00	271.788.900,00	33,65	21.909 Orang	11.314 Orang	51,64
					13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	67.455.400,00	9.821.000,00	14,56	31 Puskesmas	31 Puskesmas	100
					14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.743.525.850,00	920.200.350,00	7,84	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	676.145.450,00	99.370.450,00	14,70	100 %	100%	100%
					16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.098.199.300,00	173.511.300,00	15,80	31 Dokumen	31 Dokumen	100%
					17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.318.539.550,00	356.227.400,00	15,36	100 %	90%	90 %
					18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	670.054.000,00	120.900.000,00	18,04	31 Puskesmas	31 Puskesmas	100
					19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	98.255.900,00	72.840.000,00	74,13	241.964 orang	24.422 orang	10%
					20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	197.715.000,00	197.010.385,00	99,64	860 orang CJH	860 orang CJH	100
					21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.501.900.950,00	534.911.920,00	11,88	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.613.651.785,00	22.217.062.320,00	86,74	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
					23	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	249.999.850,00	214.715.900,00	85,89	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

				24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.985.443.932	1.912.436.650,00	96,32	12 Bulan	12 Bulan	100
				25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	229.874.700,00	228.385.500,00	99,35	31 Puskesmas	31 Puskesmas	100
				26	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem	611.487.300,00	540.234.400,00	88,35	100%	100%	89
				3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	421.441.000,00	381.711.000,00	90,57			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	421.441.000,00	381.711.000,00	90,57	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.999.317.850,00	1.799.019.581,00	89,98	2 sub kegiatan	2 sub kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.963.559.800,00	1.769.751.532,00	90,13	31 Puskesmas	31 Puskesmas	100
				2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	35.758.050,00	29.268.049,00	81,85	10 Dokumen	8 Dokumen	100
				5	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UPT di Wilayah Kabupaten/Kota	9.733.770.550,00	9.615.719.950,00	98,79	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	100
					Sub Kegiatan :						
				1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	106.276.000,00	105.676.000,00	99,44	31 Dokumen	31 Dokumen	100
				2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.335.544.000,00	9.300.509.000,00	99,62	535 Orang	535 Orang	100
				3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	291.950.550,00	209.534.950,00	71,77	31 Dokumen	31 Dokumen	100
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.713.797.300,00	1.040.551.538,00	60,72	70 Orang	70 Orang	100
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.713.797.300,00	1.040.551.538,00	60,72	70 Orang	70 Orang	100
				II	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
				1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.081.000,00	54.988.000,00	63,88	50 Sarana	27 Sarana	55

					Sub Kegiatan :							
				1	Penyediaan Dan Pengelolaan Data Perizinan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.081.000,00	54.988.000,00	63,88	50 Sarana	27 Sarana	55	
				2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.335.000,00	96.385.000,00	82,85	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
					Sub Kegiatan :							
				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.335.000,00	96.385.000,00	82,85	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
				3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.116.000,00	24.166.000,00	96,22	30 Dokumen	30 Dokumen	100	
					Sub Kegiatan :							
				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.116.000,00	24.166.000,00	96,22	30 Dokumen	30 Dokumen	100	
				4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	151.057.950,00	117.151.950,00	77,55	30 Sampel	30 Sampel	100	
					Sub Kegiatan :							
				1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151.057.950,00	117.151.950,00	77,55	30 Sampel	30 Sampel	100	
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
				1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	216.181.500,00	202.531.500,00	93,69	100%	100%		
					Sub Kegiatan :							

				1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	216.181.500,00	202.531.500,00	93,69	100%	100%	100
				2	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	100 %	100%	100%
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	100 %	100%	100%
				3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.006.285.800	1.097.372.250	54,70	18 Dokumen	17 Dokumen	88,94
					Sub Kegiatan :						
				1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.006.285.800	1.097.372.250	54,70	18 Dokumen	17 Dokumen	88,94
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG			I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
				1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM	19.812.497.301,00	8.002.640.419,00	40,39	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	612.058.000,00	604.465.000,00	98,76			
				2	Pengembangan Rumah Sakit	10.662.740.200,00	0,00	0,00	1 Gedung	1 Gedung	100
				3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	459.424.000,00	409.815.000,00	89,20	2 unit	2 unit	100
				4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.159.797.001,00	6.489.441.081,00	90,64	100 unit	100 unit	100
				5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	249.560.000,00	210.370.800,00	84,30	830 unit	830 unit	100
				6	Pengadaan Obat, Vaksin	668.918.100,00	288.548.538,00	43,14	1 paket	1 paket	23%
				2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.720.000,00	349.210.000,00	99,85	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	349.720.000,00	349.210.000,00	99,85	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						

				1	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	13.738.581.864,00	12.444.595.288,00	90,58	1 sub kegiatan	1 sub kegiatan	
					Sub Kegiatan :						
				1	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	13.738.581.864,00	12.444.595.288,00	90,58	241 Orang/ 48 Bulan	241 Orang/ 48 Bulan	100
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
				I.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	210,504,312,331.	166,993,442,512.0	79.33	4 Kegiatan / 13 Sub Kegiatan	4 Kegiatan / 13 Sub Kegiatan	100 %
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan	1,805,742,000.00	1,770,951,570.00	98.07	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1,556,429,000.00	1,547,083,000.00	99.40	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				3	Pembangunan Jalan	51,982,999,198.00	43,436,618,955.00	83.56	10 Km	30,1 Km	100
				4	Rekonstruksi Jalan	41,407,370,000.00	16,494,349,000.00	39.83	5 Km	7,608 Km	100
				5	Rehabilitasi Jalan						
				6	Pemeliharaan Berkala Jalan	510,840,000.00	510,173,350.00	99.87	1 Km	0,43	43
				7	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,722,123,000.00	1,615,867,150.00	93.83	100 Km	25,286 Km	25,29
				8	Pembangunan Jembatan	105,745,676,925.00	97,186,740,424.00	91.91	30 m	635 m	100
				9	Rehabilitasi Jembatan	1,532,240,000.00	1,518,323,857.00	99.09	20 m	275 m	100
				10	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4,240,892,208.	2,913,335,206.0	68.70	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				II.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr)	2,307,014,300.	1,817,114,048.	78.76			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2,307,014,300.	1,817,114,048.	78.76	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				III.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	475,143,800.	362,606,300.	76.32			
					Sub Kegiatan :						
				1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	475,143,800.	362,606,300.	76.32	2 Dokumen	2 Dokumen	100

				IV.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	222,014,200.	121,939,200.	54.92			
					Sub Kegiatan :						
				1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	222,014,200.	121,939,200.	54.92	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					49,997,535,239	49,645,120,318	99.30	8 Kegiatan /15 sub Kegiatan	8 Kegiatan /15 sub Kegiatan	100 %
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		I.	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	281,853,300.00	265,132,850.00	94.07			
					Sub Kegiatan :						
				1	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	167,199,650.00	166,944,050.00	99.85	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	69.713.650	51.754.650	74,24	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				3	Pendataan Dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	44,940,000.00	44,940,000.00	100.00	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				II.	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	583,300,100.00	524,104,179.00	89.85			
					Sub Kegiatan :						
				1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	219,094,700.00	174,621,029.00	79.70	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	364,205,400.00	349,483,150.00	95.96	50 Laporan	50 Laporan	100
				III.	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	308,499,950.00	302,959,889.00	98.20			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Dan/Atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	278,797,950.00	273,419,889.00	98.07	2 Dokumen	2 Dokumen	100

				2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	29,702,000.00	29,540,000.00	99.45	50 Laporan	50 Laporan	100
				IV.	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	187,925,000.00	177,877,000.00	94.65			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang Pkp	187,925,000.00	177,877,000.00	94.65	3 Dokumen	3 Dokumen	100
				V	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	167,631,800.00	167,267,300.00	99.78			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (Ded) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	167,631,800.00	167,267,300.00	99.78	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				VI	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	20,806,552,100.00	20,617,476,200.00	99.09			
					Sub Kegiatan :						
				1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20,806,552,100.00	20,617,476,200.00	99.09	623 Unit	615 Unit	98,72
				VII.	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	27,459,205,889.00	27,402,474,500.00	99.79			
					Sub Kegiatan :						
				1	Perencanaan Penyediaan Psu Perumahan	163,617,000.00	163,407,650.00	99.87	2 Dokumen	2 Dokumen	100
				2	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	26,821,907,089.00	26,783,118,750.00	99.86	50 Lokasi	50 Lokasi	100
				3	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	32,201,000.00	20,138,200.00	62.54	50 Laporan	50 Laporan	100
				4	Verifikasi Dan Penyerahan Psu Permukiman Dari Pengembang	441,480,800.00	435,809,900.00	98.72	20 Laporan	20 Laporan	100

					VIII.	Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil	202,567,100.00	187,828,400.00	92.72			
						Sub Kegiatan :						
					1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil	202,567,100.00	187,828,400.00	92.72	4 Laporan	4 Laporan	100
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						57,152,467,204	56,470,157,746	98.81	14 Kegiatan/27 Sub Kegiatan	14 Kegiatan/27 Sub Kegiatan	100 %
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					1,657,539,550.00	1,634,442,267.00	98.61			
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
					I.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1,657,539,500	1.634.442.267	98.61	1 Kgiatan /4 Sub Kegiatan	1 Kgiatan /4 Sub Kegiatan	100 %
					1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	737,449,000	734,673,640	99,62	15 Kasus	15 Kasus	100%
					2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	646,231,000	631,385,500	97,70	17 Kasus	17 Kasus	100%
					3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84,977,400	80,704,840	94,97	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	188,882,150	187,678,287	99,36	87 Orang	87 Orang	100%
					5	Penyediaan Layanan dalam Rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	-	-	-			

6	PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.807.587.430	5.868.452.789	86,20	7 Kegiatan / 19 Sub kegiatan	7 Kegiatan / 19 Sub kegiatan	
	DINAS SOSIAL					6.807.587.430	5.868.452.789	86,20			
			I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		3.226.619.450	3.161.857.689	97,99			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	561.473.500	544.571.176	96,99	57 Orang PSM	57 Orang PSM	100
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	253.246.500	245.525.953	96,95	21 Orang TKSK	21 Orang TKSK	100
				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.024.073.700	992.291.810	96,90	115 Orang PKH	105 Orang PKH	91,30
				4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.387.825.750	1.379.468.750	99,40	4 Lembaga Sosial	4 Lembaga Sosial	100
			II	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial		1.112.158.900,00	1.044.443.308,00	93,91			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1.	Penyediaan Pemakaman	20.000.000,00	19.628.028,00	98,14	27 Orang PPKS	27 Orang PPKS	100
				2.	Penyediaan Sandang	20.000.000,00	17.472.000,00	87,36	18 Orang PPKS	18 Orang PPKS	100
				3.	Penyediaan Alat Bantu	320.669.000,00	299.435.280,00	93,38	23 Orang Disabilitas	23 Orang Disabilitas	100
				4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	321.092.500,00	307.635.700,00	95,81	200 Orang Anak Sekolah	200 Orang Anak Sekolah	100
				5.	Pemberian Layanan Kedaruratan	430.397.400,00	400.272.300,00	93,00	100 Orang PPKS	120 Orang PPKS	120
			III	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial		312.327.900	277.882.600	88,97			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	312.327.900	277.882.600	88,97	21 Orang WRSE	21 Orang WRSE	100
			IV	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		682.453.580	647.684.120	94,91			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							

				1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96.291.800	89.081.200	92,51	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100
				2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	348.195.980	340.063.120	97,66	2 Kube	2 Kube	100
				3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	237.965.800	218.539.800	91,84	36 Orang	36 Orang	100
			V	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota		125.205.000	99.560.400	79,52			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Penyediaan Makanan	10.000.000	-	0,00			
				2	Penyediaan Sandang	10.000.000	-	0,00			
				3	Pelayanan Dukungan Psikososial	105.205.000	99.560.400	94,63	100 KK	94 KK	94
			VI	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		664.905.000	637.024.672	95,81			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	664.905.000	637.024.672	95,81	72 Orang	72 Orang	100
			VII	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		683.917.600	647.742.426	94,71			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	219.005.000	218.428.950	99,74	1 Makam	1 Makam	100
				2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	464.912.600	429.313.476	92,34	1 Makam	1 Makam	100

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
						Rp.	Rp.		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5		8	9		10	11	12
7	URUSAN TENAGA KERJA								7 Kegiatan / 15 Sub Kegiatan	7 Kegiatan / 15 Sub Kegiatan	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				1.266.845.400	1.245.744.852	98,33			
				I	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	322.554.650	304.271.800	94,33			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	322.554.650	304.271.800	94,33	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				II	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	233.199.000	226.573.720	97,16			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	233.199.000	226.573.720	97,16	40 Orang	40 Orang	100
				III	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	106.773.950	89.711.782	84,02			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Pelayanan Antar Kerja	16.917.600	13.377.600	79,08	15 Orang	15 orang	100
				2.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	4.732.000	1.110.000	23,46	7 unit	7 unit	89
				3.	Perluasan Kesempatan Kerja	85.124.350	75.224.182	88,37	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100
				IV	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	18.389.800	12.155.800	66,10			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	100
				V	Pelindungan Pmi (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	21.295.000	12.755.000	59,90			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	21.295.000	12.755.000	59,90	5 Orang	5 Orang	60,03

				VI	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.656.600	288.284.750	94,63			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	101.579.800	100.765.400	99,20	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100
				2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	46.982.000	46.577.300	99,14	15 perjanjian	15 perjanjian	100
				3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	156.094.800	140.942.050	90,29	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				VII	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	582.531.050	311.992.000	53,56			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.245.700	83.406.000	95,60	10 Perkara / 1 Dokumen	10 Perkara / 1 Dokumen	100
				2.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.219.750	91.944.000	94,57	50 Kasus	50 Kasus	100
				3.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	76.187.800	74.875.000	98,28	100 Serikat	100 Serikat	100
				4.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	33.476.900	32.353.000	96,64	5 Lembaga	5 Lembaga	100
				5.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	288.400.900	29.414.000	10,20	1400 Orang	1400 Orang	100
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								6 Program /13 Kegiatan / 17 Sub Kegiatan	3 Program /13 Kegiatan / 17 Sub Kegiatan	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.385.890.116	6.173.648.259	96,68			
				A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	533.922.200	513.311.220	96,14			

					Kabupaten/Kota				Kasus	Kasus	
				C	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.067.812.416	3.899.860.293	95,87			
					KEGIATAN MELIPUTI :						
				VI	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.767.300	114.613.850	99,00			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	115.767.300	114.613.850	99,00	18 Orang	18 Orang	100
				VII	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.952.045.116	3.785.246.443	95,78			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.930.200	79.072.200	96,51	225 orang	225 orang	100
				2.	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.870.114.916	3.706.174.243	95,76	9 organisasi	9 organisasi	100
				D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.451.450	50.800.750	91,61			
					KEGIATAN MELIPUTI :						
				VIII	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.451.450	50.800.750	91,61			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	55.451.450	50.800.750	91,61	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	614.496.100	609.120.688	99,13			
				IX	Pelebagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.890.000	32.724.380	99,50			
					KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32.890.000	32.724.380	99,50	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

				X	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	581.606.100	576.396.308	99,10			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	454.256.100	449.373.808	98,93	12 Forum Anak	12 Forum Anak	100
				2	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.350.000	127.022.500	99,74	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				E	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	928.251.850	918.976.108	99,00			
					KEGIATAN MELIPUTI :						
				XI	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.500.000	147.979.000	98,98			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	149.500.000	147.979.000	98,98	30 Desa	30 Desa	100
				XII	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.326.850	433.636.764	99,84			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	346.840.000	346.840.000	100,00	56 Orang	135 Orang	241
				2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	87.486.850	86.796.764	99,21	10 Desa	10 Desa	100
				XIII	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	344.425.000	337.360.344	97,95			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	344.425.000	337.360.344	97,95	70 Orang	70 Orang	100
9	KETAHANAN PANGAN					4,258,254,076	3,729,366,515	87.58	6 Kegiatan/9 Sub Kegiatan	6 Kegiatan/9 Sub Kegiatan	100%

		DINAS KETAHANAN PANGAN		I	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.657.490.744	1.599.627.900	96,51			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.657.490.744	1.599.627.900	96,51	57 Kelompok Wanita Tani (KWT); 36 KWT Penerima Bantuan Benih Sayuran, Ayam serta Perlengkapannya; 21 KWT Lokus Stunting dan 8 Kelompok Penerima Handtraktor)	57 Kelompok Wanita Tani (KWT); 36 KWT Penerima Bantuan Benih Sayuran, Ayam serta Perlengkapannya; 21 KWT Lokus Stunting dan 8 Kelompok Penerima Handtraktor)	100%
				II	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	435.007.150	387.436.900	89,06			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	219.210.300	191.057.200	87,16	Terpantaunya Harga Pangan Pokok di 21 Kecamatan	Terpantaunya Harga Pangan Pokok di 21 Kecamatan	100%
				2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	215.796.850	196.379.700	91,00	Gerakan Pangan Murah 180 Paket dan Terpantaunya Stok & Pasokan Barang	Gerakan Pangan Murah 180 Paket dan Terpantaunya Stok & Pasokan Barang	100%
				III	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	79.755.000	56.590.000	70,95			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	28.524.000	27.774.000	97,37	Pemantauan dan perencanaan Lumbung Pangan di 21 Kecamatan	Pemantauan dan perencanaan Lumbung Pangan di 21 Kecamatan	100%
				2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51.231.000	28.816.000	56,25	30000 Kg, Ongkos	30000 Kg Ongkos	100%

									Bongkar dan Transportasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Bongkar dan Transportasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		
					IV	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	775.009.320	768.485.350	99,16			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	227.270.700	227.210.700	99,97	Buku Pola Pangan Harapan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Buku Pola Pangan Harapan dan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Provinsi	100%
					2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	547.738.620	541.274.650	98,82	15 Kelompok Wanita Tani (6 KWT Inflasi, 4 KWT HATINYA PKK, 2 KWT Pekarangan Produktif dan 3 KWT Persediaan Bibit Pendukung Ocu Mapan)	15 Kelompok Wanita Tani (6 KWT Inflasi, 4 KWT HATINYA PKK, 2 KWT Pekarangan Produktif dan 3 KWT Persediaan Bibit Pendukung Ocu Mapan)	100%
					V	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	71.887.950	71.437.950	99,37			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	71.887.950	71.437.950	99,37	Peta Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Kampar	Peta Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Kampar	100%
					VI	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	567.461.700	564.951.600	99,56			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	567.461.700	564.951.600	99,56	11 Sample Uji Pangan Segar dan Sosialisasi Keamanan Pangan	11 Sample Uji Pangan Segar dan Sosialisasi Keamanan Pangan	100%
10	URUSAN PERTANAHAN						1.808.096.100	1.661.682.238	91,90	3 Kegiatan/3	3 Kegiatan/3	100%

									Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		I	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.335.451.000	1.230.932.930	92,17			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.335.451.000	1.230.932.930	92,17	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	100%
				II	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	322.423.400	310.033.900	96,16			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	322.423.400	310.033.900	96,16	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	100%
				III	Penerbitan Izin Membuka Tanah	150.221.700	120.715.408	80,36			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	150.221.700	120.715.408	80,36	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	100%
11		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				22.357.842.715	21.723.271.185	97,16	9 Kegiatan/10 Sub Kegiatan	9 Kegiatan/10 Sub Kegiatan	100%
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	340.947.000	335.076.000	98,28			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	340.947.000	335.076.000	98,28	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				II	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	232.669.500	230.269.500	98,97			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	232.669.500	230.269.500	98,97	1 Tahun	1 Tahun	100%
				III	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.000.000	404.580.000	97,72			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	414.000.000	404.580.000	97,72	1 Tahun	1 Tahun	100%

					IV	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.903.714.664	1.872.579.464	98,36			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.903.714.664	1.872.579.464	98,36	1 Tahun	1 Tahun	100%
					V	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86.803.000	82.753.000	95,33			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86.803.000	82.753.000	95,33	10 Kegiatan/Usaha	10 Kegiatan/Usaha	100%
					VI	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	349.252.000	347.909.000	99,62			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	349.252.000	347.909.000	99,62	100 Orang	100 Orang	100%
					VII	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.282.000	37.282.000	100,00			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37.282.000	37.282.000	100,00	1 Tahun	1 Tahun	100%
					VII I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	52.580.000	48.585.000	92,40			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	52.580.000	48.585.000	92,40	1 Tahun	1 Tahun	100%
					IX	Pengelolaan Sampah	2.563.408.572	2.548.031.972	99,40			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.444.742.472	1.444.630.872	99,99	1 Tahun	1 Tahun	100%

				2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1.118.666.100	1.103.401.100	98,64	1 Tahun	1 Tahun	100%
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11,495,000	11,409,750	99.26	11,495,000	11,409,750	99.26
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	11,495,000	11,409,750	99.26	11,495,000	11,409,750	99.26
					Sub Kegiatan :						
				1	penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	11,495,000	11,409,750	99.26	11,495,000	11,409,750	99.26
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2,578,421,500	2,533,042,499	98.24			
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	179,277,000	177,249,760	98.87			
					Sub Kegiatan :						
				1	pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	179,277,000	177,249,760	98.87	100	100	100
					Fasilitasi kerja sama antar desa	107,405,550	89,429,300	83.26			
					sub kegiatan :						
				1	fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	51,096,900	50,227,900	98.30	100	100	100
				2	fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	56,308,650	39,201,400	69.62	100	100	100
					Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	3,599,136,500	3,487,246,156	96.89			
					sub kegiatan :						
				1	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	153,960,000	135,960,000	88.31	100	100	100
				2	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	165,813,800	143,051,080	86.27	100	100	100
				3	fasilitasi pengelolaan keuangan desa	2,817,953,000	2,776,649,476	98.53	100	100	100
				4	pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	47,140,700	46,840,700	99.36	100	100	100
				5	pembinaan dan pemberdayaan bum desa dan lembaga kerja sama antar desa	142,521,000	137,639,500	96.57	100	100	100
				6	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	17,084,000	16,857,500	98.67	100	100	100
				7	fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	59,120,000	58,640,000	99.19	100	100	100
				8	fasilitasi penyusunan profil desa	26,023,000	25,773,500	99.04	100	100	100

				9	fasilitasi pengelolaan aset desa	87,729,000	67,051,900	76.43	100	100	100
				10	pembinaan peningkatan kapasitas anggota bpd	45,823,000	44,695,500	97.54	100	100	100
				11	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	35,969,000	34,087,000	94.77	100	100	100
					Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	339,204,200	312,640,000	92.17			
					sub kegiatan :						
				1	identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	10,638,700	6,772,950	63.66	100	100	100
				2	fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (rt, rw, pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	47,173,700	31,646,700	67.09	100	100	100
				3	peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (rt, rw, pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	79,760,000	78,295,000	98.16	100	100	100
				4	fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	161,894,900	156,542,250	96.69	100	100	100
				5	fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	39,736,900	39,383,100	99.11	100	100	100
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9,428,970,050	7,864,343,840	83.41			
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	110,577,350	110,362,350	99.81			
					Sub Kegiatan :						
				1	penyediaan dan pengolahan data kependudukan	110,577,350	110,362,350	99.81	21 kecamatan	21 kecamatan	100
					Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	931,105,150	898,421,120	96.49			
					Sub Kegiatan :						

					1	advokasi program kkbpk kepada stakeholders dan mitra kerja	38,103,100	29,781,585	78.16			
					2	promosi dan kie program kkbpk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	131,264,250	127,429,800	97.08			
					3	pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan kkbpk	747,750,000	727,231,285	97.26	21 kecamatan	21 kecamatan	100
					4	pengendalian program kkbpk	13,987,800	13,978,450	99.93			
						pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb (pkb/plkb)	1,348,478,000	1,194,159,900	88.56			
						sub kegiatan :						
					1	penyediaan sarana pendukung operasional pkb/plkb	416,478,000	317,368,900	76.20			
					2	penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (imp)	932,000,000	876,791,000	94.08	250 Desa	248 Desa	99.2
						pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota	1,853,975,000	1,565,299,155	84.43			
						sub kegiatan :						
					1	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jaringannya	122,100,000	96,421,400	78.97			
					2	peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp)	172,600,050	165,791,750	96.06			
					3	penyediaan sarana penunjang pelayanan kb	102,707,800	95,688,000	93.17			
					4	peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	78,185,800	78,144,010	99.95	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
					5	dukungan operasional pelayanan kb bergerak	1,325,684,000	1,079,284,000	81.41	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
					6	promosi dan konseling kb pasca persalinan dan pasca keguguran	52,697,350	49,969,995	94.82	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
						Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	605,318,000	605,228,000	99.99			
						Sub Kegiatan :						
					1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb	7,318,000	7,318,000	100.00	1 organisasi	1 organisasi	100
					2	Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Kkbpk Di Kampung Kb	598,000,000	597,910,000	99.98	38 kampung kb	38 kampung kb	100
						Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui	4,215,822,500	3,136,526,660	74.40			

					pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						
					sub kegiatan :						
				1	orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)	106,955,000	105,511,000	98.65	10 kelompok	10 kelompok1	100
				2	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)	3,898,900,000	2,821,251,500	72.36			
				3	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	209,967,500	209,764,160	99.90	10 kelompok	10 kelompok1	100
					Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	363,694,050	354,346,655	97.43			
					sub kegiatan :						
				1	promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	363,694,050	354,346,655	97.43			
15	URUSAN PERHUBUNGAN					2,578,421,500	2,533,042,499	98.24			
		DINAS PERHUBUNGAN			Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	35,860,000	35,860,000	100.00			
					sub kegiatan :						
				1	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	35,860,000	35,860,000	100.00	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Pengujian berkala kendaraan bermotor	107,880,000	99,510,000	92.24			
					sub kegiatan :						
				1	penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	10,500,000	10,500,000	100.00	1 Unit	1 Unit	100%
				2	penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	33,025,000	31,125,000	94.25	3.000 Dokumen	900 Dokumen	30%
				3	pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	64,355,000	57,885,000	89.95	9 Unit	9 Unit	100%
					Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1,211,976,500	1,208,929,500	99.75			

					sub kegiatan :							
				1	penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	837,446,500.00	834,599,500.00	99.66	12 Laporan	12 Laporan	100%	
				2	forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	374,530,000.00	374,330,000.00	99.95	12 Laporan	12 Laporan	100%	
					Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	23,880,000.00	22,170,000.00	92.84				
					Sub Kegiatan :							
				1	koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	18,630,000.00	16,920,000.00	90.82	12 Laporan	10 Laporan	83,33%	
				2	pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	12 Laporan	10 Laporan	83,33%	
					Audit dan inspeksi keselamatan lalaj di jalan	44,725,000.00	44,725,000.00	100.00				
					sub kegiatan :							
				1	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	44,725,000	44,725,000	100.00	12 Laporan	12 Laporan	100%	
					Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	668,100,000	37,704,999	95.45				
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		I		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,764,191,250	7,712,666,062	99.34	12 Program , Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan	12 Program , Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan		
		DINASKOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN			SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
				1	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	345,090,000	341,242,000	98.88	100	100	1.64	
				2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5,523,684,000	5,508,674,237	99.73	100	100	26.19	
				3	Pelayanan Informasi Publik	547,046,250	529,973,500	96.88	100	100	2.59	
				4	Manajemen Komunikasi Krisis	243,016,000	242,279,125	99.70	100	100	1.15	
				5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	10,680,000	7,380,000	69.10	100	100	0.05	
				6	Penyediaan/Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,094,675,000	1,083,117,200	98.94	100	100	5.19	
			II		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,185,007,560	3,123,167,700	98.06				
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							

				1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	194,870,000	192,890,000	98.98	100	100	0.92
				2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,990,137,560	2,930,277,700	98.00	100	100	14.18
				III	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	485,234,950	484,404,380	99.83			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	154,720,000	154,300,500	99.73	100	100	0.73
				2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	42,249,950	42,221,380.00	99.93	100	100	0.20
				3	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	288,265,000	287,882,500	99.87	100	100	1.37
					KEGIATANNYAMELIPUTI:						
17	URUSAN PERDAGANGAN					2,310,568,177	2,229,380,000	96.48			
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			IX	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	237,333,850	234,389,650	98.76	130 Koperasi	115 Koperasi	88.46%
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77,188,000	74,243,800	96.19	30 Koperasi	15 Koperasi	50%
				2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	160,145,850	160,145,850	100	100 Koperasi	100 Koperasi	100%
				X	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,751,050	36,751,050	100	50 Koperasi	32 Koperasi	64%
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	36,751,050	36,751,050	100	50 Koperasi	32 Koperasi	64%

			XI	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1,639,515,627	1,616,087,650	98.57			
				KEGIATANNYAMELIPUTI:						
			1	Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	190,707,877.00	190,574,800.00	99.93	200 UMK	200 UMK	100%
			2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	596,791,150.00	587,801,150.00	98.49	250 UMK	250 UMK	100%
			3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	421,382,550.00	420,798,550.00	99.86	72 UMK	72 UMK	100%
			4	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Usaha Mikro Dan Kewirausahaan	430,634,050.00	416,913,150.00	96.81	36 Kop 60 UMK	36 Kop 60 UMK	100%
			XII	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	396,967,650.00	342,151,650.00	86.19			
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi	396,967,650.00	342,151,650.00	86.19	- 1 Pameran Tk. Nasional - 1 Pameran Tk. Prov - 1 Pameran Tk. Kabupaten - 9 Bazar UMKM	- 1 Pameran - 2 Pameran - 1 Pameran 12 Bazar	100% 200% 100% 133%
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		IV	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA	167,642,000	147,055,200	87.72	100	147,055,200	87.72
				SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:						
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU		1	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	167,642,000	147,055,200	87.72	100	147,055,200	87.72
			V	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,245,000	39,828,550	98.97	100	39,828,550	98.97
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						

					1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,245,000	39,828,550	98.97	100	39,828,550	98.97
				VI	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		727,768,700	679,013,142	93.30	100	679,013,142	93.30
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	270,800,000	255,556,777	94.37	100	255,556,777	94.37
					2	Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	137,847,200	126,887,655	92.05	100	126,887,655	92.05
					3	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	319,121,500	296,568,710	92.93	100	296,568,710	92.93
				VII	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		758,366,000	586,478,080	77.33		586,478,080	77.33
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	372,366,000	276,630,180	74.29	100	276,630,180	74.29
					2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312,050,050	275,478,900	88.28	100	275,478,900	88.28
					3	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	73,949,950	34,369,000	46.48	100	34,369,000	46.48
				VIII	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		219,711,000	198,156,238	90.19	100	198,156,238	90.19
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	219,711,000	198,156,238	90.19	100	198,156,238	90.19

19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.630.478.790,00	9.225.184.270,00	95,79	2 Program , Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan	2 Program , Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan	
	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		I	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	581.810.250,00	568.464.950,00	97,71			
				Kegiatannya Meliputi :						
				Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,	581.810.250,00	568.464.950,00	97,71	90 Peserta	90 Peserta	100%
				Sub Kegiatannya Meliputi :						
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	581.810.250,00	568.464.950,00	97,71	90 Peserta	90 Peserta	100%
			II	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	8.430.723.590	8.044.207.520	95,42	3 Event	3 Event	100%
				Kegiatannya Meliputi :						
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	426.051.000,00	416.417.250,00	97,74	3 Event	3 Event	100%
				Sub Kegiatannya Meliputi :						
				1. Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	426.051.000,00	416.417.250,00	97,74	3 Event	3 Event	100%
				Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang	3.265.402.640,00	2.905.782.820,00	88,99	6 Paket	14 Paket	100%
				Sub Kegiatannya Meliputi :						
				1. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	3.265.402.640,00	2.905.782.820,00	88,99	6 Paket	14 Paket	100%
				Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	29.654.400,00	29.325.000,00	98,89	22 Cabor	22 Cabor	100%
				Sub Kegiatannya Meliputi :						
				1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	29.654.400,00	29.325.000,00	98,89	22 Cabor	22 Cabor	100%
				Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	4.709.615.550,00	4.692.682.450,00	99,64	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	100%
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						

				1.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4.495.835.550,00	4.489.512.450,00	99,86	5 Event	5 Event	100%
				2.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	213.780.000,00	203.170.000,00	95,04	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	617.944.950,00	612.511.800,00	99,12	2 Laporan	2 Laporan	100 %
					Sub Kegiatannya Meliputi :						
				1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	617.944.950,00	612.511.800,00	99,12	2 Laporan	2 Laporan	100 %
20	STATISTIK					126.397.000,00	125.174.300,00	99,03	1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan	1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan	100%
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			1	Program penyelenggaraan statistik	126.397.000,00	125.174.300,00	99,03	ada	ada	100%
					Kegiatan :						
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	126.397.000,00	125.174.300,00	99,03	ada	ada	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	126.397.000,00	125.174.300,00	99,03	ada	ada	100%
21	PERSANDIAN				Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	237.724.700,00	218.123.100,00	91,75	1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan	1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan	100%
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				KEGIATAN :						
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	237.724.700,00	218.123.100,00	91,75	12 Bulan	12 Bulan	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	143.414.000,00	139.389.300,00	97,19	12 Bulan	12 Bulan	100%
				2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	94.310.700,00	78.733.800,00	83,48	12 Bulan	12 Bulan	100%
22	KEBUDAYAAN								2 Program 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	2 Program 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	100%

	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			Program program pengembangan kebudayaan	3.986.961.850,00	3.811.459.750,00	95,60	2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	100%
				Kegiatan :						
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	112.584.150,00	94.877.150,00	84,27	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau	112.584.150,00	94.877.150,00	84,27	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab./Kota	3.874.377.700,00	3.716.582.600,00	95,93	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	3.874.377.700,00	3.716.582.600,00	95,93	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				Program pengembangan kesenian tradisional	1.034.474.750,00	790.850.250,00	76,45	1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan	100%
				Kegiatan :						
				Pembinaan Kesenian yang Masrakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota	1.034.474.750,00	790.850.250,00	76,45	24 Event	24 Event	100%
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.034.474.750,00	790.850.250,00	76,45	24 Event	24 Event	100%
23		DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP			1.681.398.800	1.612.475.202	95,90			
	PERPUSTAKAAN		I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.565.630.950	1.511.146.252	96,52			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	690.429.900	689.765.900	99,90			
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	255.215.200	255.215.200	100,00	3 layanan	3 layanan	100,00
			2	Pengembangan Bahan Pustaka	154.094.700	153.488.700	99,61	5000 eksemplar	5000 eksemplar	100,00
			3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	281.120.000	281.062.000	99,98	6000 eksemplar	6000 eksemplar	100,00
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	875.201.050	821.380.352	93,85			
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada	262.445.000	248.376.140	94,64	100 lokus	100 lokus	100,00

					Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						
			2		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	265.114.000	243.584.499	91,88	3 orang	3 orang	100,00
			3		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	237.280.050	235.645.713	99,31	21 perpustakaan	21 perpustakaan	100,00
			II		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	115.767.850	101.328.950	87,53			
					Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	115.767.850	101.328.950	87,53			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	115.767.850	101.328.950	87,53	115 orang	115 orang	100,00
	KEARSIPAN					450.974.990	440.495.997	97,68			
			I		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	153.264.090	151.437.470	98,81			
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	119.795.090	117.968.470	98,48			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1		Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	119.795.090	117.968.470	98,48	180 berkas	180 berkas	100,00
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	33.469.000	33.469.000	100,00			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	33.469.000	33.469.000	100,00	200 arsip	200 arsip	100,00
			II		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	297.710.900	289.058.527	97,09			
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	41.341.300	40.996.300	99,17			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	41.341.300	40.996.300	99,17	50 berkas	50 berkas	100,00
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	115.371.100	112.759.100	97,74			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	115.371.100	112.759.100	97,74	70 arsip	70 arsip	100,00
					Penyelamatan Arsip Perangkat	70.593.400	68.793.847	97,45			

					Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.593.400	68.793.847	97,45	1000 arsip	1000 arsip	100,00
					Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	70.405.100	66.509.280	94,47			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	70.405.100	66.509.280	94,47	300 arsip	300 arsip	100,00

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
					Rp.	Rp.		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8	9		10	11	12
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		DINAS PERIKANAN			10.784.020.484	9.818.587.573	91,05			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.752.428.000	2.678.432.250	97,31	2.600 ton	100%	100%
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	42.975.000	37.885.000	88,16	1 laporan	1 laporan	100
				2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.709.453.000	2.640.547.250	97,46	65 kelompok	65 kelompok	100
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	70.648.000	41.378.000	58,57	2.600 ton	100%	100
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	70.648.000	41.378.000	58,57	20 kelompok	20 kelompok	100
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.352.251.000	4.011.199.850	92,16	66.900		
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	3.972.005.800	3.767.046.554	94,84	128 kelompok	128 kelompok	100
				2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	276.724.200	158.199.396	57,17	15 Kelompok	15 Kelompok	100
				3 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	103.521.000	85.953.900	83,03	10 Kelompok	10 Kelompok	100
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.722.749.200	1.558.442.066	90,46	66.900 ton	100%	100
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	99.352.200	73.643.596	74,12			

				2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	929.207.000	916.159.550	98,60	21 Unit	21 Unit	100,00
				3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	699.415.000	643.862.800	92,06	21 Unit	21 Unit	100,00
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	878.860.000	822.036.280	93,53			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	878.860.000	822.036.280	93,53	1000 Ha	1000 Ha	100,00
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	178.261.000	153.204.700	85,94			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	178.261.000	153.204.700	85,94	2 Laporan	2 Laporan	100,00
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.631.911.700	1.566.430.200	95,99			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.158.472.700	1.134.523.500	97,93	271 Unit	271 Unit	100,00
				2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	473.439.000	431.906.700	91,23	1820 Unit	1820 Unit	100,00
28	URUSAN PERDAGANGAN										
		DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		I	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan						
					Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	59.720.000	59.719.775	99,99			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	59.720.000	59.719.775	99,99	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	100,00
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26.267.000	21.697.000	82,60			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26.267.000	21.697.000	82,60	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
					Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.190.300	112.620.300	99,50			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	113.190.300	112.620.300	99,50	5 Pasar	5 Pasar	100,00
				II	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						

					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	585.645.439	67.563.310	11,54			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	585.645.439	67.563.310	11,54	1 Paket	1 Paket	100,00
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	54.922.400	54.271.500	98,81			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.587.400	32.586.500	99,99	35 PKL	35 PKL	100,00
				2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	22.335.000	21.685.000	97,09			
				III	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.196.300	138.479.797	96,71			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	143.196.300	138.479.797	96,71	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	575.649.600	175.649.600	30,51			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	58.908.500	58.908.500	100,00	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100,00
				2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	516.741.100	116.741.100	22,59	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100,00
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.783.000	50.783.000	100,00			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50.783.000	50.783.000	100,00	7 Distributor	7 Distributor	100,00
				VI	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen						
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	358.021.700	328.180.272	91,66			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	247.932.800	222.142.172	89,60	654 UTTP	654 UTTP	100,00
				2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	110.088.900	106.038.100	96,32	40 Penyuluh	40 Penyuluh	100,00
				V	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri						
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	76.234.000	75.284.000	98,75			

Tabel 3.1.4

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

30	SEKRETARIAT DAERAH				31.989.729.790	29.585.674.143,26	92,48	11 Kegiatan/ 34 Sub Kegiatan	11 Kegiatan/ 34 Sub Kegiatan	92,48	
	SEKRETARIAT DAERAH										
			I	Penataan Organisasi	1.313.188.250,00	1.134.263.871,00	86,37				
				SUB KEGIATAN :							
				1	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	557.147.900,00	504.607.205,00	90,57	100	90,57	90,57
				2	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	211.930.050,00	187.522.345,00	88,48	100	88,48	88,48
				3	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	126.980.850,00	104.348.300,00	82,18	100	82,18	82,18
				4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	300.934.100,00	250.963.101,00	83,39	100	83,39	83,39
				5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	116.195.350,00	86.822.920,00	74,72	100	74,72	74,72
			II	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.094.449.790,00	6.602.265.879,00	93,06				
				SUB KEGIATAN :							
				1	Fasilitasi Keprotokolan	5.198.209.490,00	4.711.165.579,00	90,63	100	90,63	90,63
				2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	785.540.300,00	785.290.300,00	99,97	100	99,97	99,97
				3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.110.700.000,00	1.105.810.000,00	99,56	100	99,56	99,56
			III	Administrasi Tata Pemerintahan	2.514.064.050,00	1.940.467.679,00	77,18				
				SUB KEGIATAN :							
				1	Penataan Administrasi Pemerintahan	362.805.000,00	334.448.708,00	92,18	100	92,18	92,18
				2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.298.376.350,00	1.050.732.219,00	80,93	100	80,93	80,93
				3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	852.882.700,00	555.286.752,00	65,11	100	65,11	65,11
			IV	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.285.498.500	14.437.126.856	94,45				
				SUB KEGIATAN :							
				1	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	10.354.324.150	9.708.916.962	93,77	100	93,77	93,77

					2	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	3.375.430.900	3.311.622.900	98,11	100	98,11	98,11
					3	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	1.345.738.650	1.253.051.534	93,11	100	93,11	93,11
					4	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	210.004.800	163.535.460	77,87	100	77,87	77,87
					V	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	707.312.050	574.964.596	81,29			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	272.539.900	223.943.309	82,17	100	82,17	82,17
					2	Fasilitasi Bantuan Hukum	253.092.250	197.115.564	77,88	100	77,88	77,88
					3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	181.679.900	153.905.723	84,71	100	84,71	84,71
					VI	Fasilitasi Kerjasama Daerah	801.447.800	727.791.662	90,81			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	725.431.500	660.285.862	91,02	100	91,02	91,02
					2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	22.911.300	19.613.300	85,61	100	85,61	85,61
					3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	53.105.000	47.892.500	90,18	100	90,18	90,18
					VII	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	813.404.200	783.271.260	96,30			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	357.467.000	329.817.240	92,27	100	92,27	92,27
					2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	300.018.500	298.817.440	99,60	100	99,60	99,60
					3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	155.918.700	154.636.580	99,18	100	99,18	99,18
					VIII	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	611.533.400	585.723.477	95,78			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	316.433.600	310.855.929	98,24	100	98,24	98,24
					2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	129.119.600	122.332.800	94,74	100	94,74	94,74
					3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	165.980.200	152.534.748	91,90	100	91,90	91,90
					IX	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.868.983.500	1.831.171.355	97,98			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	622.010.800	603.156.955	96,97	100	96,97	96,97
					2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	921.036.000	903.482.100	98,09	100	98,09	98,09
					3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	325.936.700	324.532.300	99,57	100	99,57	99,57

				X	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	695.052.250	688.358.008	99,04			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	466.266.000	463.022.720	99,30	100	99,30	99,30
				2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	97.712.250	96.465.369	98,72	100	98,72	98,72
				3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	131.074.000	128.869.919	98,32	100	98,32	98,32
				XII	Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	284.796.000	280.269.500	98,41			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas daerah	284.796.000	280.269.500	98,41	100	98,41	98,41
31	URUSAN SEKRETARIAT DPRD					50.036.446.012	46.840.828.674	93,61	7 kegiatan / 25 sub kegiatan	7 kegiatan / 25 sub kegiatan	93,61
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										
				I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.088.167.643	2.336.671.713	75,67	6 Perda	6 Perda	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	863.284.593	855.786.131	99,13	3 dokumen	3 dokumen	100
				2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.030.139.424	1.287.926.482	63,44	6 dokumen	6 dokumen	100
				3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	194.743.6260	192.959.100	99,08	3 dokumen	3 dokumen	100
				II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.314.639.310	1.252.259.682	95,26	6 Dokumen	6 Dokumen	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pembahasan kua dan ppas	291.748.510	291.748.350	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100
				2	Pembahasan perubahan kua dan perubahan ppas	204.454.764	204.426.286	99,99	1 dokumen	1 dokumen	100
				3	Pembahasan APBD	424.624.000	380.564.000	89,62	1 dokumen	1 dokumen	100
				4	Pembahasan APBD perubahan	139.811.944	128.371.937	91,82	1 dokumen	1 dokumen	100
				5	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	254.000.092	247.149.109	97,30	1 dokumen	1 dokumen	100
				III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.517.321.169	9.034.081.744	94,92	12 bulan	12 bulan	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	2.107.081.404	2.026.065.868	96,16	12 laporan	12 laporan	100

					2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.256.830.821	3.212.589.235	98,64	12 laporan	12 laporan	100
					3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.126.866.312	2.083.529.521	97,96	12 laporan	12 laporan	100
					4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.824.491.192	1.509.846.674	82,75	12 laporan	12 laporan	100
					5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	202.051.440	202.050.446	100,00	1 laporan	1 laporan	100
				IV	Peningkatan Kapasitas DPRD		10.110.662.200	9.588.063.465	94,83	12 bulan	12 bulan	95,00
					SUB KEGIATAN :							
					1	Pendalaman Tugas DPRD	1.729.883.000	1.527.671.857	88,31	3 dokumen	3 dokumen	100
					2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5.154.614.200	5.117.226.608	99,27	12 dokumen	12 dokumen	100
					3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	733.200.000	451.700.000	61,61	20 orang	15 orang	75,00
					4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	384.000.000	100,00	8 orang	8 orang	100
					5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.108.965.000	2.107.465.000	99,93	12 dokumen	12 dokumen	100
				V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		4.745.681.775	4.375.055.000	92,19	5 dokumen	5 dokumen	100
					SUB KEGIATAN :							
					1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	61.747.375	21.950.000	35,55	6 laporan	6 laporan	100
					2	Penyusunan pokok-pokok pikiran dprd	24.595.000	-	0,00	1 dokumen	1 dokumen	100
					3	Pelaksanaan reses	4.659.339.400	4.353.105.000	93,43	3 dokumen	3 dokumen	100
				VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		77.831.476	8.920.000	11,46	12 bulan	1 bulan	20,00
					SUB KEGIATAN :							
					1	Pengawasan Kode Etik DPRD	77.831.476	8.920.000	11,46	6 laporan	1 laporan	20,00
				VII	Fasilitasi Tugas DPRD		21.182.142.439	20.245.777.070	95,58	12 bulan	12 bulan	100
					SUB KEGIATAN :							
					1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.617.662.640	17.048.416.624	96,77	12 dokumen	12 dokumen	100
					2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.068.023.645	1.048.881.833	98,21	12 dokumen	12 dokumen	100
					3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.496.456.154	2.148.478.613	86,06	12 dokumen	12 dokumen	100
32	URUSAN PERENCANAAN					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8,480,421,250	8,226,811,853	97,01	10 Kegiatan / 37 Sub Kegiatan	10 Kegiatan / 37 Sub Kegiatan	100
				I	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan		2.102.347.800	2.063.435.446	98,15	100%	100%	100
					SUB KEGIATAN :							

					1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	515.914.800	514.456.540	99,72	1 dokumen	1 dokumen	100	
					2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	383.167.500	365.909.500	95,50	21 berita acara	21 berita acara	100	
					3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Skpd/Lintas Skpd	40.307.700	40.239.000	99,83	4 berita acara	4 berita acara	100	
					4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	355.687.500	339.364.500	95,41	1 berita acara	1 berita acara	100	
					5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	146.130.500	143.230.500	98,02	21 berita acara	21 berita acara	100	
					6	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	661.139.800	660.235.406	99,86	1 dokumen	1 dokumen	100	
				II	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		984.394.700	930.810.005	94,56				
					SUB KEGIATAN :								
					1	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	984.394.700	930.810.005	94,56	3 Masukan	3 Masukan	100	
				III	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		567.029.650	565.628.850	99,75				
					SUB KEGIATAN :								
					1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	263.559.350	262.191.250	99,48	4 Laporan	4 Laporan	100	
					2	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	303.470.300	303.437.600	99,99	1 Laporan	1 Laporan	100	
				IV	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia		776.933.450	753.316.904	96,96				
					SUB KEGIATAN :								
					1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	29.462.000	29.089.000	98,73	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
					2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.419.000	28.916.000	98,29	7 PD/th	7 PD/th	100	
					3	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.480.500	15.120.500	97,67	1 Laporan	1 Laporan	100	
					4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	114.057.000	113.167.400	99,22	1 Laporan	1 Laporan	100	
					5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	90.735.000	90.593.000	99,84	1 Dokumen	1 Dokumen	100	

					6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	92.855.950	88.857.750	95,69	9 PD/th	9 PD/th	100	
					7	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.605.000	33.155.000	88,17	9 PD/th	9 PD/th	100	
					8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	367.319.000	354.418.254	96,49	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
				V	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)		717.612.850	693.690.420	96,67				
					SUB KEGIATAN :								
					1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	158.259.600	154.857.006	97,85	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
					2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	166.182.600	157.585.600	94,83	6 PD/th	6 PD/th	100	
					3	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.427.700	66.290.900	95,48	6 PD/th	6 PD/th	100	
					4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	66.490.350	61.820.550	92,98	1 Laporan	1 Laporan	100	
					5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	81.335.600	80.913.824	99,48	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
					6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	34.680.750	34.037.950	98,15	6 PD/th	6 PD/th	100	
					7	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	111.289.750	108.929.350	97,88	6 PD/th	6 PD/th	100	
					8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	29.946.500	29.255.240	97,69	1 Laporan	1 Laporan	100	
				VI	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan		1.087.224.650	1.073.616.920	98,75				
					SUB KEGIATAN :								
					1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	174.926.000	172.038.674	98,35	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
					2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.260.000	19.021.000	98,76	4 pd/th	4 pd/th	100	
					3	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	52.408.850	52.181.750	99,57	4 pd/th	4 pd/th	100	

					SUB KEGIATAN :								
				1	Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	49.072.000	32.498.000	66,23	12 bulan	12 bulan	66,23		
				II	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	722.212.250	672.819.484	93,16					
					SUB KEGIATAN :								
				1	Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan PPAS	63.183.000	59.477.380	94,14	2 dokumen	2 dokumen	94,14		
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan PPAS	44.244.750	44.202.750	99,91	2 dokumen	2 dokumen	99,91		
				3	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	262.657.750	250.902.750	95,52	80 buah	80 buah	95,52		
				4	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	221.056.750	213.739.500	96,69	80 buah	80 buah	96,69		
				5	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	131.070.000	104.497.104	79,73	52 OPD	52 OPD	79,73		
				III	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	791.397.300	622.901.047	78,71					
					SUB KEGIATAN :								
				1	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	98.570.000	64.634.000	65,57	12 bulan	12 bulan	65,57		
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	149.659.400	124.737.800	83,35	12 bulan	12 bulan	83,35		
				3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	543.167.900	433.529.247	79,81	12 bulan	12 bulan	79,81		
				IV	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	846.979.000	525.576.200	62,05					
					SUB KEGIATAN :								
				1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	95.265.000	62.073.499	65,16	20 laporan	20 laporan	65,16		
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	751.714.000,00	463.502.701,00	61,66	80 buah	80 buah	61,66		
				V	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	395.247.340.892	393.844.433.373	99,65					
					SUB KEGIATAN :								

					1	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	376.985.855.080	376.969.468.451	100,00	242 desa	242 desa	100
					2	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	1.448.219.800	66.645.582	4,60	12 bulan	12 bulan	4,60
					3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.813.266.012	16.808.319.340	99,97	242 desa	242 desa	99,97
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.391.424.500	1.147.242.320	82,45			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pengamanan Barang Milik Daerah	529.989.000	397.416.000	74,99	12 bulan	12 bulan	74,99
					2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	611.317.500	545.665.500	89,26	52 OPD	52 OPD	89,26
					3	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	250.118.000	204.160.820	81,63	52 OPD	52 OPD	81,63
		BADAN PENDAPATAN DAERAH					4.315.554.400	3.485.891.007	80.78	1 Kegiatan/ 15 Sub Kegiatan	1 Kegiatan/ 15 Sub Kegiatan	4.315.554.400
				I		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.315.554.400	3.485.891.007	80.78			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	83,013,000	47,707,000	57.47	100	57.47	57.47
					2	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1,066,069,500	805,585,657	75.57	100	75.57	75.57
					3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	412,136,300	370,909,300	90.00	100	90.00	90.00
					4	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	485,578,000	474,090,000	97.63	100	97.63	97.63
					5	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	111,299,250	54,794,250	49.23	100	49.23	49.23
					6	Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69,423,250	57,063,250	82.20	100	82.20	82.20
					7	Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	586,304,700	343,718,000	58.62	100	58.62	58.62
					8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	435,858,000	410,037,000	94.08	100	94.08	94.08
					9	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	131,232,600	131,227,650	100.00	100	100.00	100.00
					10	Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	77,183,800	54,154,300	70.16	100	70.16	70.16
					11	Penagihan Pajak Daerah	176,818,600	131,588,600	74.42	100	74.42	74.42
					12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	95,254,000	34,364,000	36.08	100	36.08	36.08
					13	Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	170,390,200	163,685,200	96.06	100	96.06	96.06
					14	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	221,545,000	221,545,000	100.00	100	100.00	100.00

					15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	193,448,200	185,421,800	95.85	100	95.85	95.85
34	KEPEGAWAIAN											
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA					4,378,471,700	3,604,803,147	82.33	6 Kegiatan / 17 Sub Kegiatan	6 Kegiatan / 17 Sub Kegiatan	100
				I	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn		1,030,632,100	862,949,660	83.73			
					SUB KEGIATAN :							
					1	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan Pns Dan pppk	490,510,100	372,275,869	75.90	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	147,177,300	113,917,341	77.40	350 Dokumen	435 Dokumen	124,29
					3	Fasilitasi Lembaga Profesi Asn	33,195,700	33,194,500	100.00	1 Lembaga	1 Lembaga	100
					4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	46,992,850	44,652,850	95.02	2 Dokumen	2 Dokumen	100
					5	Pengelolaan Data Kepegawaian	149,650,450	141,880,000	94.81	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					6	Evaluasi Data, Informasi Dan Sistem Informasi Kepegawaian	163,105,700	157,029,100	96.27	1 Laporan	1 Laporan	100
				II	Mutasi Dan Promosi Asn		1,350,048,850	900,100,112	66.67			
					SUB KEGIATAN :							
					1	Pengelolaan Mutasi Asn	168,356,000	130,258,599	77.37	500 Dokumen	483 Dokumen	96,60
					2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn	424,042,850	282,006,350	66.50	2000 Orang	1338 Orang	66,90
					3	Pengelolaan Promosi Asn	757,650,000	487,835,163	64.39	760 Dokumen	51 Dokumen	6,71
				III	Pengembangan Kompetensi Asn		575,908,000	496,011,559	86.13			
					SUB KEGIATAN :							
					1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Asn	575,908,000	496,011,559	86.13	5 Orang	5 Orang	100
				IV	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur		595,081,100	564,397,091	94.84			
					SUB KEGIATAN :							
					1	Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	68,048,000	58,223,520	85.56	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					2	Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	352,261,650	338,482,741	96.09	1 Laporan	1 Laporan	100
					3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	69,325,000	63,519,780	91.63	275 Orang	151 Orang	54,91
					4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Asn	43,703,550	43,598,150	99.76	1 Laporan	1 Laporan	100
					5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	61,742,900	60,572,900	98.11	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				V	Pengembangan Kompetensi Teknis		164,245,000	150,064,500	91.37			

					SUB KEGIATAN :							
				1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	164,245,000	150,064,500	91.37	100%	100%	100	
				VI	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	662,556,650	631,280,225	95.28				
					SUB KEGIATAN :							
				1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Dan Prajabatan	662,556,650	631,280,225	95.28	44 Orang	44 Orang	100	
35	INSPEKTORAT											
		INSPEKTORAT				4,786,400,000	4,030,640,000	84.21	4 Kegiatan / 13 Sub Kegiatan	4 Kegiatan / 13 Sub Kegiatan	100	
				I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,402,560,000	2,853,520,000	83.86				
					SUB KEGIATAN :							
				1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	262,350,000	187,400,000	71.43	100	71.43	71.43	
				2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	900,450,000	816,310,000	90.66	100	90.66	90.66	
				3	Reviu Laporan Kinerja	95,535,000	60,285,000	63.10	100	63.10	63.10	
				4	Reviu Laporan Keuangan	748,075,000	533,725,000	71.35	100	71.35	71.35	
				5	Pengawasan Desa	964,800,000	945,300,000	97.98	100	97.98	97.98	
				6	Kerjasama Pengawasan Internal	18,050,000	14,350,000	79.50	100	79.50	79.50	
				7	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip	413,300,000	296,150,000	71.65	100	71.65	71.65	
				II	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	708,740,000	615,180,000	86.80				
					SUB KEGIATAN :							
				1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	708,740,000	615,180,000	86.80	100	86.80	86.80	
				III	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	1,850,000	740,000	40.00				
					SUB KEGIATAN :							
				1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	1,850,000	740,000	40.00	100	40.00	40.00	
				IV	Pendampingan Dan Asistensi	673,250,000	561,200,000	83.36				

					SUB KEGIATAN :						
				1	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	85,700,000	85,700,000	100.00	100	100.00	100.00
				2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	118,950,000	105,200,000	88.44	100	88.44	88.44
				3	Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	369,674,000	291,424,000	78.83	100	78.83	78.83
				4	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	98,926,000	78,876,000	79.73	100	79.73	79.73

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.3.1 Rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 04/KPTS/DPRD/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

A. PANSUS I BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (VISI MISI)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ disusun sebagai laporan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017 – 2022.

Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan visi Bupati Kampar adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Relegius, Beradat, Berbudaya Dan Sejahtera**”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) misi yaitu :

- 1) Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional
- 2) Mengembangkan pertanian yang moderen dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 3) Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- 5) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
- 6) Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang relegius, beradat dan berbudaya

LKPJ merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan tolok ukur kinerja yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD. LKPj digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintah Daerah.

Apabila merujuk kaedah tersebut diatas , Kami menilai laporan yng disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi narasi yang digunakan maupun data dan informasi yang disajikan. LKPj terkesan kurang inovatif dan belum mampu menyajikan materi yang aktraktif dan dengan cepat dapat di pahami. Laporan yang baik hendaknya tersusun secara sistematis, simpel, utuh dan lengkap serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Laporan juga menggambarkan kapasitas sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. Untuk itu Kami minta perhatian Saudara Bupati agar dimasa yang akan datang lebih memperhatikan wujud dari LKPJ ini baik secara kontekstual, tekstual maupun tampilannya. Dengan dukungan teknologi informasi dewasa ini inovasi dan kreatifitas sangat terbuka luas dalam menyiapkan suatu dokumen yang bermutu.

2. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam urusan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Darah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman diubah dengan Undang- undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraa Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang mendelegasikan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang serta urusan pendukung.

Dengan melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap Laporan LKPJ yang disampaikan, maka beberapa penilaian, masukan dan rekomendasi dari Pansus I terhadap Kinerja berbagai urusan dimaksud sebagai berikut :

1) URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedang pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasar asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, dan pemerintah pusat melaksanakan urusan pemerintahan absolut. urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten /kota.

Secara umum Pansus I menilai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu menjadi perhatian kita semua dalam memasuki tahun politik ini. Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kondusifitas dalam sosial masyarakat sehingga PEMILU yang akan berlangsung dapat berjalan optimal, agar tidak terbentuknya divergensi dikalangan masyarakat yang dapat mengakibatkan perpecahan. Mengapa ini penting, Karena ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial masyarakat merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) huruf e dan f.

2) URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pendidikan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. urusan ini menempati posisi yang strategis karena menyangkut kualitas sumber daya manusia, kemajuan daerah dan daya saing Daerah. Sumber daya manusia dalam rencana strategis pembangunan kabupaten kampar termakhtub dalam misi I yaitu Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan. Adapun strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca.

Bila dilihat dari perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2021 (halaman 39) antara lain persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi rata-rata 55 %, Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Pra sejahtera yang sekolah lulus sampai SMP sebesar 28 %. Demikian juga dengan persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi baik sebesar 62 % dan SMP 65 %. Bila kita perhatikan dana yang dialokasikan untuk program OPD ini mencapai Rp. 766.289.334. 090,- dimana khusus

untuk program pendidikan jumlah dana yang disediakan mencapai Rp.756.733.112.158 dan Rp.625. 251.998. 706 bersumber dari APBD Kabupaten Kampar.

Akan tetapi dari laporan LKPJ yang disampaikan masih ditemui permasalahan yang terkait dengan aparatur yang profesional yang masih kurang, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta system manajemen pendidikan dan pengawasan pendidikan yang lemah. Fakta ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, dimana alokasi dana dan program yang diluncurkan tidak menimbulkan dampak terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan. Keadaan ini menunjukkan adanya *something wrong* dalam perencanaan atau pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Kondisi ini juga dimungkin solusi penyelesaian masalah tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga permasalahan ini menjadi masalah klasik serta selalu muncul setiap tahunnya.

Berkenan dengan hal tersebut Pansus I merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menerapkan sistem manajemen pendidikan yang modern yaitu manajemen yang berbasis teknologi informasi dengan didukung data yang valid dan akurat. Hari ini dunia sudah masuk ke era Revolusi Industri 4.0. Dunia tidak lagi berbicara **Universce** tetapi sudah memasuki **Metaverce**.

Penggunaan **Internet of things** sudah menjadi keniscayaan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dunia pendidikan. Jika hari ini kita masih berkuat dengan sistem pendidikan konvensional, maka jangan terkejut pada saatnya nanti generasi kita akan tergilgila dalam persaingan yang semakin kompetitif dan ketat. Sudah saatnya dunia pendidikan kita melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang maju dan modern baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa/ siswi.

Selain itu, sarana yang memadai serta lingkungan sekolah yang bersih dan aman merupakan faktor utama kelancaran Transfer Knowledge dari guru terhadap para siswa/ siswi. Pansus I melihat kurangnya perhatian terhadap ruang kelas yang ada membuat proses belajar mengajar tidak berjalan optimal. Dibeberapa sekolah, terutama daerah-daerah pinggiran

Kabupaten Kampar masih banyak terdapat ruang kelas yang tidak memadai, seperti bangunan kelas yang seperti berumur ratusan tahun, karena tidak adanya renovasi serta perawatan rutin dan berkala. Bahkan ada juga sekolah yang kekurangan kelas, sehingga waktu proses belajar mengajar dibagi dalam beberapa tahap.

Selain itu, kebersihan lingkungan sekolah, terutama MCK. Hampir seluruh sekolah di Kabupaten Kampar tidak memiliki MCK sesuai standar kebersihan dan kesehatan. Ini perlu diperhatikan, sebab lingkungan yang buruk dan tidak sehat secara psikis akan mengganggu proses belajar, karena terganggunya konsentrasi, bahkan dapat menimbulkan penyakit dari bakteri-bakteri sekitar. Pada umumnya lingkungan yang bersih dan sehat dapat menghadirkan kenyamanan disekitarnya dan perasaan yang harmoni.

3) URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan termasuk kedalam Misi I Pemerintah Kabupaten Kampar dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Strategi yang diterapkan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta membangun pola hidup sehat. Kata kunci dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah mutu pelayanan kesehatan.

Mutu pelayanan kesehatan sangat melekat dengan faktor-faktor subjektivitas individu yang berkepentingan dalam pelayanan kesehatan, seperti pasien, masyarakat dan organisasi masyarakat, profesi layanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk pandangan yang berbeda dalam definisi mutu pelayanan kesehatan. Namun, dibalik ini semua yang menjadi monitoring anggota Dewan terutama Pansus I saat ini ialah kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terjadi pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar beberapa hari yang lalu. Bagaimana caranya kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat- pejabat terkait yang berorientasi terhadap profit pribadi/kelompok. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus bekerja maksimal dalam pemberantasan segala macam bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat dibawahnya.

Pelayanan kesehatan masyarakat, merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. badi tugas pokok dinas kesehatan adalah kepuasan masyarakat bukan profit oriented. Apalagi secara lugas UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pass 1 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Disini jelas pelayanan kesehatan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia, sangat miris jika pejabat yang ditugaskan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, malah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma dan sumpah jabatannya. Penjabat Bupati Kampar diharapkan dapat merumuskan strategi monitoring terhadap seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Kampar agar hal yang serupa tidak terjadi lagi.

B. PANSUS II BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan, tuntutan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan. Belanja Daerah disusun dengan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan belanja daerah harus tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi, misi daerah serta perubahan lingkungan eksternal.

1) KEUANGAN

Keuangan yang dimaksud dalam laporan ini adalah laporan terkait pendapatan Daerah yaitu Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang memuat tentang Kebijakan umum Perubahan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Kebijakan umum perubahan baik perubahan pendapatan maupun perubahan belanja harus diarahkan dalam upaya pencapaian visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Kampar yang tertuang dalam RPMPD dari RPJMD serta dokumen-dokumen turunannya yang di formulasi kedalam arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Perubahan pendapatan dan belanja tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian nasional dan daerah tidak terlepas dari perubahan ekonomi global yang memberi dampak kepada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dinamika ini menuntut penyelenggara pemerintah harus memiliki sensitifitas yang tinggi serta kemampuan membaca perubahan dan kecendrungan atau tren ekonomi. Hari ini birokrat tidak lagi bekerja monoton dan terperangkap dalam rutinitas anggaran dan realisasi tetapi juga harus mampu membaca dan siap melakukan perubahan dan penyesuaian yang tertuang dalam inovasi-inovasi yang dilakukan.

Kekakuan birokrasi kita dan kurangnya inovasi yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah ditunjukkan oleh belrt m terukurnya manfaat benefit) dan dampak (*impact*) dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan. Pada saat rapat pembahasan LKPj dengan kepala OPD jelas terungkap bahwa sekalipun realisasi keuangan mencapai rata-rata 96 persen lebih tetapi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah tidak signifikan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 year-on- year sebesar 5,31 persen, Provinsi Riau sebesar 4,55 persen dan Kabupaten Kampar 3,02 persen (angka estimasi} . Angka ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan pembangunan belum mampu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentunya kita menyadari bahwa variable pertumbuhan ekonomi tidak saja dari investasi pemerintah, yang lebih penting juga investasi masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri. Demikian juga dengan manfaat dari kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan kaedah manajemen pembangunan sektor publik, keberhasilan kegiatan pembangunan tidak hanya sebatas pada input—out put dan outcome tetapi tinjauannya harus sampai kepada benefit dan impact. Sejauh ini kita belum mendapatkan laporan dari eksekutif terkait benefit dan impact pelaksanaan pembangunan baik secara sectoral maupun kawasan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah capaian terhadap pelayanan yang di terima masyarakat atas kinerja OPD yang berfungsi melaksanakan pelayanan publik.

Sedangkan benefit merupakan ukuran seberapa besar kepuasan masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan . Demikian juga Impact mengukur sejauh mana kegiatan pembangunan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sejauh ini kita belum dapat mengetahui sejauh mana

manfaat yang dapat di rasakan masyarakat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hal ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama terutama Saudara Bupati sebagai nahkoda kapal yang bernama Kabupaten Kampar.

1.1. Pendapatan

Dalam LKPj tahun 2022 kita disajikan tentang kondisi dan kebijakan keuangan Daerah. Pada sisi pendapatan disampaikan Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah yaitu dengan menetapkan 2 (dua) arah kebijakan dimana pada tahun 2021 dengan 3 (tiga) arah kebijakan. Kebijakan tersebut yaitu;

- 1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan 9 (sembilan) kebijakan.
- 2) Memaksimalkan perolehan Pendapatan transfer dengan melakukan 7 (tujuh) kebijakan Hasil yang dicapai adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.445.354. 484,00 atau 2.78% dari total PAD Tahun 2022 sebesar Rp.260. 22ö.610.592,7 1 bila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp.267.671 .96a.076,34. Pendapatan transfer mencapai Rp.1 .764.922.667. 21 5,00 atau 95,37 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.850.583.1 0'7.653,00 dimana jumlah yang tidak tercapai sebesar Rp. 85.660. 440.438,00 akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang realisasinya mencapai Rp.1.660.0245. 230.2 | 1,00.

Demikian juga dengan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 2.427.503.585.552,71 atau 97,34% dimana lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yakni sebesar Rp.2.480. 892.607. 820,76 atau berkurang sebesar Rp. 53.289.022.268.05. Jika angka ketidaktercapaian tersebut kita jumlahkan menjadi sebesar Rp. 138.949.462. 706,05 angka yang cukup besar untuk membiayai beberapa program atau kegiatan.

Berdasarkan data tersebut diatas Kami Pansus II mengayomi Saudara Bupati Kampar terkhusus aparaturnya yang terkait langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah ini sudah bekerja optimal namun seandainya potensi yang masih ada bias kita maksimalkan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan daerah kita.

1.2. Belanja Daerah

Penetapan belanja Daerah ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.2.480. ö92.185. 573,96 atau 95,78 % dari Anggaran sebesar Rp. 2.589.837.6 1 0.263,00, .dengan demikian pada tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp.53.088.600. 021,25. Keadaan ini dapat kita maklumi karena kondisi negara dan daerah kita masih dalam tahap pemulihan dari Pandemi Covid 19 menuju endemic. Akan tetapi sebagaimana kami sampaikan diatas jika sumber

pendapatan dapat kita maksimalkan maka defisit ini dapat kita atasi atau tidak kita temukan..

1.3. PAJAK

Pajak daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) .

Adapun retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu . Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelaksanaan Daerah dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan , retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan /vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Dari laporan yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2022 tercatat realisasi

dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.142.366.052.600,00 atau 94,1d % dan realisasi dari Pendapatan Retribusi Daerah hanya Rp.Rp. 8. 91 7. 742. I S2,31 atan 66,62 % dari target yang di tetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita karena secara kasat mata, kita melihat objek retribusi cukup potensi terutama retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah khususnya jasa parkir dan lain-lain. Berkenan hal ini, Pansus II meminta perhatian Saudara Bupati untuk melakukan Raji ufang strategi dan penetapan terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaku kan forcasting pendapatan daerah dari Pajak dan Retribusi.

Demikian juga sudah sampai sejauh mana penggunaan sistematn aplikasi berbasis komputerisasi dalam tata kelola pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya.

2) INFRASTRUKTUR

Sebelum kami lebih lanjut meriyampaikan laporan mengenai infrastruktur. Kami mengajak kita semua urtuk melihat dan mencermati kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi “*middle income trap*” dapat tercapai. Permasalahannya sebagaimana yang kita ketahui bahwa stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% dari Pendapatan Domestik Bm to (PDB). dan jauh di bawah rata-rata global sebesar 'r0% PDB. hadi, untuk mencapai target pembangunan infrastru ktur tersebut, pemerintahan berupaya mengü usung kombinasi strategi pembangunan dan proyek-proyek prioritas.

Sesuai dengan kebijakan strategis Pembangunan Daerah maka perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian perioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Riau.

Bertitik tolak dari hal tersebut beberapa aspek ekonomi yang kita miliki dan dapat diandalkan antara lain adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih. Demikian juga dengan infrastruktur pedesaan telah ikut berkontribusi dalam mendorong kelancaran barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar dan telah mampu mengefisiensikan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga berpengaruh lebih lanjut terhadap laju inflasi.

Konsep ini Pansus I sampaikan pada sidang yang terhormat ini, bahwa sebagai bagian dari NKRI , kita harus mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur global. Sekarang ini kita berada pada era globalisasi yang yang ditandai dengan era digital. Era digital membutuhkan kolaborasi dan sindikasi dalam melaksanakan pembangunan taman infrastruktur. Apabila kita tidak

meraih peluang ini tidak mustahil daerah kita akan menjadi daerah marginal dimasa depan.

Pembangunan infrastruktur ke depan juga akan memberikan penekanan pada pengarus utamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gerider,tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta sosial budaya. Dari titik ini kami Pansus II ingin memberikan tekanan bagaimana performance dari investasi masyarakat atau swasta dalam pembangunan di Kabupaten Kampar. Kita sangat menyadari bahwa Dana Pemerintah tentu saja tidak akan mampu dan cukup untuk mendanai pembangunan daerah. Berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi suatu keniscayaan.

Dari sisi ini Kami belum mendapat laporan yang utuh seberapa besar kontribusi di DUDI pembangunan di Kabupaten Kampar khususna pembangunan infrastruktur sehingga penyediaan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Pembangunan infrastruktur menjadi Misi ketiga dalam pembangunan Kabupaten Kampar yaitu “ Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional dengan 6 (enam) sasaran strategis dengan 17 program kerja dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 3 (tiga) sasaran dan 11(sebelas) program dengan jumlah anggaran Rp. 162.543.242.846 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan 3 (tiga)) sasaran dan 6 (enam) program dan jumlah dana Rp. 983.171.622.

Bila dianalisa lebih dalam, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar terkesan kurang terintegrasi dengan Pembangunan infrastruktur dari pemerintah dan pemerintah Provinsi Riau . Demikian juga juga dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh OPD lain dan Infrastruktur yang dibangun melalui dana desa. Sebagaimana disampaikan terdahulu, pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dilaksanakan kemanfaatannya serta daya ungkit terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terukur.

Mengukur benefit dan inpact menjadi sangat penting karena dari informasi dan data ini kita dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya serta menem ukan hambatan dan tantangan yang bisa diselesaikan baik dengan pendekatan berkolaborasi, sindikasi atau model sinergi lainnya.

Selanjutnya kami sampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja OPD yang menjadi objek mitra Pansus II sebagai berikut

1) *BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH*

Sebagaimana laporan yang disampaikan Realisasi anggaran pada OPD ini mencapai 96% . Akan tetapi terdapat satu progma yang tingkat realisasi hanya 78, 61 % yaitu pelayanan informasi Rawan Bencana dengan sub Kegiatan Penyusunan Resiko Bencana Kabupaten. Kegiatan ini cukup urgen mengingat kegiaiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen penanggulangan bencana. Pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana melalui upaya perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural) .

Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Berdasarkan hal tersebut Pansus memandang kegiatan ini menjadi cukup strategis untuk mengatasi potensi bencana.

Apabila Kajian resiko bencana ini belum kita miliki Pemerintah akan terkesan kurang antisipatif dalam Penanggulangan Bencana Alam. untuk itu Pimpinan OPD segera berkoordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi sehingga kegiatan tersebut dapat direali sasikan.

2) *DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA*

Pada tahun Anggaran 2023 OPD ini berhasil merealisasikan anggran sebesar 88,43 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.110.499.775. Yang menjadi pertanyaan bagi Pansus adalah pembangunan Kawasan Industri Kampar yang tidak dilaksanakan. Bagaimana keputusan terakhir terkait rencana ini, apakah tidak akan dilaksanakan atau diganti dengan program strategis lainnya. Hal ini perlu di informasikan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terutama pihak-pihak yang berkepentingan dengari rencana ini. Seandainya kegiatan ini di *cancelled* pihak eksekutif tentu harus punya kajian *feasibility study* baik secara ekonomis maupun secara bisnis.

3) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kabupaten Kampar sampai saat ini belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai mana yang dimiliki oleh Kabupaten dan Kota lain. Keberadaan MPP sangat penting dan strategis untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama masyarakat yang bergerak disektor Dunia Usaha dan Dunia Industri. MPP menjadi front terdepan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi etalase untuk menawarkan potensi daerah bagi investor. Kelemahan kita dalam pelayanan publik ditengarai menjadi salah satu variabel yang menyebabkan tingkat investasi di daerah kita bergerak sangat lamban. Kami mendapat laporan pada pertengahan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kampar akan melaunching pelayanan publik tersebut namun kita belum mendapat informasi performance pelayanan publik yang akan di launching tersebutnya seperti apa.

4) DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 menjalankan anggaran sebesar Rp. 9.276.780. 461 dengan realisasi sebesar Rp. 9.175.422.620 atau 98,91 %. Dengan 11Kegiatan dan 15 sub kegiatan. Khusus pada sub sektor perkebunan kegiatan lebih kepada pembinaan, dan pengawasan penerapan izin Usaha Pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa.

Berdasarkan beberapa informasi yang kami himpun pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. ditugaskan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia. Penyaluran dana sawit didasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) .

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal untuk Kabupaten Kampar program ini kurang bergema, dan kurang tersosialisasi kepada masyarakat terutama petani sawit. Hal ini patut kita pertanyakan dalam forum yang terhormat ini, karena Kami Pansus II memandang program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena komoditas kelapa sawit sudah menjadi komoditas yang diusahakan oleh sebahagian besar masyarakat Kampar baik melalui kemitraan dengan Perkebunan Besar Swasta (PBS), kelompok maupun secara perorangan dengan skala yang bervariasi. Untuk itu kami memerlukan penjelasan dari Saudara Bupati Kampar bagaimana pelaksanaan program ini di daerah Kita.

Pada sub sektor Peternakan, dari hasil analisa yang dilakukan ditemukan bahwa kinerja sub sektor ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dikemukakan oleh Kepala OPD nya adalah kendala birokrasi akibat dari penyatuan sub sektor Perkebunan dengan Sub Sektor Peternakan dalam satu organisasi. Penyebab lain adalah banyaknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh pejabat dengan status PLT dan PLH. Untuk dimintai perhatian Saudara Bupati untuk melakukan kajian ulang terkait pemisahan dua sub sektor ini melalui dilakukan analisa efektifitas dan produktifitas serta regulasi yang mengaturnya. Demikian juga urgensi keberadaan UPTD baik secara fungsi, tugas dan kewenangan serta penetapan dan penempatan pejabat yang mengendalikannya.

5) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTUM

Dari sisi serapan dana OPD ini tergolong baik dengan persentase setiap tahapannya mencapai 94,36 % dari total anggaran sebesar Rp. 7.184.259.548. Yang menjadi tantangan kita ke depan adalah animo masyarakat berusaha di bidang tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan terdapat yang menurun walaupun banyak stimulus yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sub sektor ini untuk itu kita perlu melakukan pendekatan yang lebih masif dan terstruktur untuk memotivasi masyarakat mengembangkan usaha tanaman pangan dan hortikultura yang merupakan komoditi pangan utama masyarakat kita.

6) DINAS PERIKANAN

Pada Tahun Anggaran 2024 OPD ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.481.252.410 dengan realisasi sebesar Rp. 9.264.671.899 atau 88,39 %. Pada sektor perikanan antusiasme masyarakat berusaha sangat tinggi. Keadaan ini dapat kita lihat dari maraknya usaha perikanan darat atau usaha kolam air tawar dan keramba yang diusahakan oleh petani ikan baik dengan cara kemitraan maupun mandiri. Dari data yang kami peroleh secara random, permasalahan utama adalah dari saprodi yaitu pakan ikan. Pakan yang merupakan industri hulu dari bisnis ini dipegang oleh pengusaha dengan jaringan yang kuat sehingga harga pakan selalu berfluktuasi dan memberatkan petani ikan. Untuk kebutuhan jangka panjang perlu dirumuskan rencana strategis mengatasi penyediaan pakan ikan dengan melibatkan BUMD atau Pengusaha tempatan. Dengan demikian kita berharap pakan ikan dapat disuplai secara optimal dengan harga yang terjangkau

Di sisi lain, pada tahun 2023 Dinas Perikanan banyak mendapatkan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi yang merupakan hasil dari pokok pikiran wakil rakyat. Kita sangat mengapresiasi kegiatan ini. Akan tetapi dari hasil pembahasan, ditemukan bahwa dinas terkait mengalami kendala dalam pelaksanaannya baik dari segi teknis, maupun dari segi sosial. Pansus menengarai kondisi ini terjadi akibat lemahnya koordinasi dan kurangnya sharing informasi. Untuk itu diharapkan hendaknya permasalahan ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

7) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas lingkungan hidup deru pakan dinas dengan kinerja yang bisa dilihat dan diuktr setiap hari. Sedikit saja kelalaian yang mereka lakukan akan berdampak langsung kepada masyarakat terutama terhadap Kebersihan Kota dan lingkungan pemukina. Pansus II memberikan apreasi yang tinggi terhadap kinerja OPD ini dengan merujuk kepada lingkungan dan kebersihan kota Bangkinang yang terjaga dan terpelihara kendati menurut laporan yang disampaikan sudah banyak armada dan infrastruktur kebersihan yang perlu di upgrade.

Pansus ingin mengingatkan dari sisi estetika hendaknya Dinas Lingkungan Hidup lebih meperhatikan kanopi dari tanaman yang menaungi ruas-ruas jalan di Kota Bangkinang sehingga lebih menyajikan suasana yang harmoni dan nyaman serta aman bagi pengguna jalan. Apabila kita kaitkan dengan pemanasan global, lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup ini kita juga harus menggunakan pendekatan global.

8) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKINAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan fungsi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi variabel penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kawasan pemukiman seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat menjadikan OPD harus bekerja lebih keras untuk memberikan daya dukung bagi pembangunan kawatan pemukiman.

Secara teknis operasional tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah Keputusan penetapan Kawasan yang relatif lamban sehingga berpengaruh kepada penyusunan Program Perumahan dan Pemukinanyang akan dilaksanakan sekalipun Peraturan Daerah terkait Fasum dan Fasos sudah kita tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tah un 2019 Tentang Penyerahan Prasararta, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang. Keadaan ini tentuva bisa diatasi dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya,yang menjadi permasalahan klasik dan terjadi berulang sebagaimana juga terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) adalah pelaksanaan pekerjaan yang terkonsentrasi pada triwulan ketiga dan keempat sehingga terjadi penumpukan proses pengerjaan dan pencairan dana di akhir tahun. Keadaan ini juga menyebabkan terjadinya tunda bayar. Kondisi ini tentunya tidak kita inginkan dan bisa dselesaikan dengan menyiapkan rencana pelaksanaan yang matang dan timeline yang terukur. Bagi rekan- rekan eksekutif di OPD hal ini tidaklah sesuatu yang sulit.

9) DINAS PERHUBUNGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 pada Dinas Perhubungan berjalan dengan baik dengan realisasi mencapai 35.441.643.285 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp. 36.649.142.382. Secara teknis pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala yang berarti. Permasalahan yang terkait dengan Perhubungan adalah Rambu lalu lintas pada ruas jalan nasional. Untuk kondisi Kabupaten Kampar pemukiman penduduk dan kawasan komersial umumnya terdapat di sepanjang ruas jalan nasional tersebut dengan tingkat kepadatan yang terus meningkat.

Keberadaan rambu lalu lintas baik berupa rambu konvensional maupun rambu elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Terkait rambu lalu lintas ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

Regulasi ini memberikan insentif pengadaan rambu lalu lintas pada ruas jalan nasional tidak boleh dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kampar. Solusi dari permasalahan ini adalah memperkuat OPD terkait untuk meringkatkan komunikasi dan sinkronisasi dengan kementerian perhubungan sehingga kebutuhan terhadap rambu lalu lintas secara bertahap dapat dipenuhi. Untuk mencapai hal tersebut Dinas Perhubungan tentu memerlukan dukungan kongkrit baik secara birokrasi, politik dan anggaran.

10) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pekerjaan umum dan tata Ruang, untuk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 155.177.004.724 dengan realisasi 137.643.971.654 atau sebesar 97,65%. Dari sisi kinerja realisasi fisik dan serapan dana, Kami Pansus II memberikan apresiasi yang tinggi. Akan tetapi yang menjadi tanda tanya adalah sejauh mana pembangunan infrastruktur tersebut memberikan benefit dan impact terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya memberikan daya ungkit terhadap upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kampar. Parameter benefit dan impact ini hendaklah menjadi perhatian kita bersama sehingga sumber daya yang telah dialokasikan kepada sektor ini betul-betul bernilai guna dan berdaya guna baik secara fisik maupun fungsi. Bappeda Kabupaten Kampar sebaiknya menginisiasi untuk melakukan evaluasi dan mengkaji benefit dan impact program dan kegiatan terutama program/kegiatan strategis sebagai referensi menyusun rencana dan kebijakan dimasa datang.

11) DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan dengan 5 program dan 5 kegiatan yang terdiri dari 7 sub kegiatan. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 4.397.114.684 dengan tingkat realisasi mencapai Rp. 4.333.634.856 atau 94,01%. Bertitik tolak dari pembahasan yang berkembang serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, permasalahan yang kompleks adalah permasalahan pada koperasi. Koperasi yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kampar mempunyai karakteristik yang spesifik baik yang disebabkan oleh jenis usaha yang dikelola, budaya yang melatarbelakangi maupun kepentingan banyak pihak.

Penyelesaian permasalahan koperasi di Kabupaten Kampar memerlukan pendekatan khusus case by case. UMKM Kabupaten Kampar sebagaimana UMKM di daerah lain mempunyai prospek yang baik terutama pasca pandemic Covid 19. Sejarah membuktikan bisnis yang tetap bertahan pada saat krisis keuangan dan moneter serta kejadian pandemi adalah UMKM. UMKM mempunyai spektrum yang luas baik dari jenis usaha, pelaku maupun model bisnis yang dikembangkan. Generasi muda hendaknya kita dorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Fakta membuktikan bahwa negara atau daerah yang mempunyai wirausahawan yang tinggi adalah negara atau daerah yang maju. Sudah masanya kewirausahaan terutama pada generasi milenial mendapat perhatian yang besar dari kita bersama.

12) BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sejauh ini kinerja Badan Pendapatan Daerah bank dari sisi serapan dana, prestasi dalam menghimpun pendapatan serta pengu naan aplikasi berbasis sistem dalam melayani masyarakat untuk membayar pajak dan kewajiban lainriya. Namun demuikian OPD kita harapkan disamping terus mengedukast dan mempromsikan masyarakat agar taat pajak, juga melakukan insiatif menggali potensi pajak dan penerimaan yang sah lainnya melalui terobosan dan inovasi tiada henti. Dengan demikian Bapenda tidak terframik sebagai OPD Tax collector tetapi juga sebagai /nnnciaf kontributor bagi pendapatan daerah.

Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Pansus 11 merekomendasikan sebagai berikut :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap upaya dan rencana aksi untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengukuran terhadap bene/t dan inpoct terutama pada proyek atau kegiatan yang mempunyai skala besar dan berdampak luas
- c. Pemerintah Daerah agar menyusun Rencana Induk Pembangunan In frastruktur Kabu paten Kampar yang akan dijadikan refrensi utama Para Pih ak yang terkait.
- d. Meningkatkan lkoordinasi dan kom unikasi serta sinergitas dalam membangun infrastruktur dan kegiatan lainnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau sehingga kegiatan yang tidak bisa dianggarkan melalui APBD liabupaten Kampar dapat dilaksanakan dengan dana APBN maupun APBD Provisi Riau
- e. Menyiapkan Institusi terutama institusi pelayanan publik untuk mendorong terwujudnya investasi di Kabupaten Kampar baik oleh Dunia Usaha maupun Dunia Industri sehingga masyarakat Kabupaten Kampar memperoleh *Trickle-Down effect* dari aktifitas tersebut.

- f. Meningkatkan pembinaan terhadap ASN dan fungsi-fungsi organisasi seperti kemungkinan dilakukan pemisahan Dinas Perkebunan , Peternakan dan Kesehatan Hewan serta penetapan dan penempatan pejabat untuk UPTD sehingga dihasilkan kinerja yang lebih tinggi, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- g. Menyiapkan rencana yang matang dan holistik serta menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan prosedur pencairan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan proses pencairan dana di akhir tahun berjalan

3.3.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Bupati Kampar

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tanggapan tentang kegiatan penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)

Berdasarkan koordinasi kami bersama Bappeda Kabupaten Kampar di sepakati kegiatan penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) di anggarkan pada tahun 2023. Kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan yang bekerjasama dengan tenaga ahli Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2023.

2. DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Berdasarkan pernyataan dan pertanyaan diatas, kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kampar, menyatakan bahwa untuk pembuatan/penetapan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan diperlukan kajian yang lebih spesifik dan terinci serta memerlukan waktu yang cukup lama oleh tim Konsultan Perencanaan agar wilayah tersebut memang masuk dalam penetapan kawasan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun demikian kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kampar, berupaya agar Pembuatan/penetapan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Selanjutnya untuk permasalahan pelaksanaan pekerjaan yang terkonsentrasi

pada triwulan ketiga dan keempat sehingga terjadi penumpukan proses pengerjaan dan pencairan dana di akhir tahun, serta terjadinya tunda bayar, kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kampar, sampai dengan saat ini belum pernah terjadi hal yang demikian.

Dari Pernyataan diatas, kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kampar menyatakan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada OPD kami telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, ini dibuktikan dengan hal bahwa penyusunan program dan kegiatan pada OPD kami telah melalui asistensi oleh Tim Verifikasi (Koordinator Bidang Infrastruktur BAPPEDA)

3. DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dimana pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) memiliki kewenangan dalam hal penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional, pemerintah provinsi (Dinas Perhubungan Provinsi) memiliki kewenangan dalam hal penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten (Dinas Perhubungan) memiliki kewenangan dalam hal penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menyediakan perlengkapan jalan di Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi adalah melaksanakan koordinasi ke instansi terkait dan menyampaikan usulan penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional. langkah ini juga telah mendapatkan feedback dari BPTD Kelas II Riau selaku

perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan RI, yaitu adanya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kampar.

Berikut merupakan data kegiatan yang telah terealisasi pada tahun 2023 melalui BPTD Kelas II Riau di Kabupaten Kampar :

NO	PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	Ruas 019 Bts. Kab. Kampar - Bts. Kota Bangkinang	4	Unit
		Ruas 019 11k Jl. Moh. Yamin (Bangkinang)	2	Unit
		Ruas 020 Bts. Kita Bangkinang - Rantau Berangin	2	Unit
		Ruas 021 Rantau Berangin - Bts. Prov. Sumbar	2	Unit
2	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal	Ruas 022 Marpoyan - Bts. Kuansing (Bts. Kab. Kampar - Bts. Inhu)	40	Unit
3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron	Ruas 022 Marpoyan - Bts. Kuansing (Bts. Kab. Kampar - Bts. Inhu)	20	Unit
4	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Ruas 022 Marpoyan - Bts. Kuansing (Bts. Kab. Kampar - Bts. Inhu)	200	M'
5	Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya (Solar Cell)	Ruas 019 Bts. Kab. Kampar - Bts. Kota Bangkinang	30	Unit
		Ruas 020 Bts. Kita Bangkinang - Rantau Berangin	20	Unit
		Ruas 021 Rantau Berangin - Bts. Prov. Sumbar	20	Unit
6	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (APJ Tenaga Surya)	Musholla Al Hidayah Pasar Kampar (Kampar)	1	Unit
		Musholla As Sakinah Pasar Kampar (Kampar)	1	Unit
		Sawah Baru Dusun Cemara (Kampar)	2	Unit
		Sungai Tarap Masjid Al Ikhsan (Kampar)	2	Unit
		Hay Falah International Islamic Boarding School (Kampar)	5	Unit

Dan berikut merupakan rencana kegiatan BPTD Kelas II Riau di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 :

No.	Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal		
a	Ruas 019 Bts. Kab. Kampar - Bts. Kota Bangkinang	44	unit
b	Ruas 022 Marpoyan - Batas Kuansing	70	unit
2	Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cell		
a	Ruas 022 Marpoyan - Batas Kuansing	25	unit
3	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light		
a	Ruas 022 Marpoyan - Batas Kuansing	8	unit
4	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (APJ Solar Cell)		
a	Jalan Kabupaten Kampar	5	unit
5	Pembangunan Halte Sungai		
a	Halte Sungai Desa Simalinyang	1	unit

Namun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar masih tetap harus meningkatkan intensitas koordinasi melalui instansi terkait, agar usulan-usulan kegiatan yang telah diberikan dapat terealisasi tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan baik itu jenis maupun volume perlengkapan jalannya. Disamping hal tersebut Dinas Perhubungan juga meminta dukungan yang kongkrit baik itu birokrasi, politis dan anggaran dari DPRD Kabupaten Kampar, agar dalam penyiapan usulan kegiatan untuk ruas jalan nasional dapat berjalan dengan lancar dan matang, mengingat banyaknya *readiness criteria* (Administrasi dan Teknis) yang ditetapkan oleh Kementerian dalam pengusulan kegiatan melalui APBN.

4. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Pansus 11 merekomendasikan sebagai berikut :

- Melakukan kaji ulang terhadap upaya dan rencana aksi untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berupaya meningkatkan realisasi penerimaan PAD melalui upaya penggalian potensi sumber-sumber penerimaan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penilaian individual PBB-P2, serta validasi objek pajak sesuai kondisi riil di lapangan.

- Pemerintah Daerah hendaknya melakukan pengukuran terhadap bene/t dan inpoct terutama pada proyek atau kegiatan yang mempunyai skala besar dan berdampak luas.

Bapenda Kampar telah melakukan kegiatan penilaian individual PBB-P2 terhadap objek khusus dengan skala menengah dan besar.

- Pemerintah Daerah agar menyusun Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kampar yang akan dijadikan refrensi utama Para Pihak yang terkait.
- Meningkatkan lkoordinasi dan komunikasi serta sinergitas dalam membangun infrastruktur dan kegiatan lainnya dengan pemerintah pusat

dan pemerintah provinsi Riau sehingga kegiatan yang tidak bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kampar dapat dilaksanakan dengan dana APBN maupun APBD Provinsi Riau

- Menyiapkan Institusi terutama institusi pelayanan publik untuk mendorong terwujudnya investasi di Kabupaten Kampar baik oleh Dunia Usaha maupun Dunia Industri sehingga masyarakat Kabupaten Kampar memperoleh Trickle- Down effect dari aktifitas tersebut.
- Meningkatkan pembinaan terhadap ASN dan fungsi-fungsi organisasi seperti kemungkinan dilakukan pemisahan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta penetapan dan penempatan pejabat untuk UPTD sehingga dihasilkan kinerja yang lebih tinggi, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- Menyiapkan rencana yang matang dan holistik serta menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan prosedur pencairan anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan proses pencairan dana di akhir tahun berjalan ..
- Strategi dan penetapan terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - Penyusunan data potensi berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
 - Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Validasi piutang PBB-P2 serta validasi objek dan subjek BPHTB.
 - Validasi data ID Pelanggan PLN, khusus daerah perbatasan antara Kab. Kampar dengan Kab/Kota lainnya (Grey Area).
 - Meningkatkan pengawasan dan pelayanan pajak/retribusi daerah.
 - Pengkajian tarif pajak dan retribusi daerah, serta disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Menyusun Peraturan Bupati tentang Standarisasi Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Perhitungan dalam Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kampar, sehingga akan meningkatkan penerimaan BPHTB.
 - Menyusun Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Perhitungan dalam Penetapan PBB-P2, sehingga akan meningkatkan penerimaan PBB-P2.
 - Melakukan penilaian individual PBB-P2 terhadap objek khusus dengan skala menengah dan besar, untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.
 - Menyampaikan informasi dengan mengundang seluruh PPAT yang ada di wilayah Kab. Kampar terkait penyesuaian harga/nilai objek pajak.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
 - Meningkatkan Koordinasi dengan OPD teknis dalam rangka peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD).
 - Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak/retribusi.
- Penggunaan sistem informasi berbasis komputerisasi dalam tata kelola pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya :
 - Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) untuk pengelolaan : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) untuk pengelolaan pemungutan PBB-P2.
 - Pemutakhiran data yang berkaitan dengan penerimaan daerah melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dengan melakukan kegiatan : Pendaftaran, Pendataan dan

Penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, melalui :
 - QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
 - Bank Riau Kepri / Teller.
 - E- Commerce (BukaLapak, TokoPedia, Indomaret, Alfamart, Traveloka).
 - E-Channel (ATM Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri Mobile, Agen laku Pandai).
 - Fintech (Ovo, Link Aja, I Saku, Gopay).
- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) secara Online, untuk pelayanan pajak daerah dan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, dilakukan melalui kegiatan Zoom Meeting secara daring (Vidcom) yaitu :
 - Focus Group Discussion (FGD) / Pendidikan dan pelatihan terhadap pengelolaan penerimaan daerah.
 - Melakukan koordinasi/konsultasi ke Pemerintah Pusat/ Provinsi /Kab/Kota, baik secara daring maupun langsung dalam rangka peningkatan pengelolaan penerimaan daerah.

5. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada dasarnya menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan pemerintahan, yaitu bidang urusan perdagangan dan bidang urusan koperasi.

5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan serta 7 (tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.4.397.114.684,- adalah untuk menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan pemerintahan, yaitu bidang urusan perdagangan dan bidang urusan koperasi.

Berkenaan dengan permasalahan dibidang koperasi sampai saat ini masih banyak ditemukan.

Koperasi yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kampar mempunyai karakteristik yang spesifik baik dari aspek jenis usaha yang dikelola maupun aspek tata kelola manajemen perkoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku. Penanganan permasalahan koperasi yang ada di kabupaten kampar, kami sependapat penyelesaiannya menggunakan pendekatan khusus yaitu case by case.

Kemudian berkenaan dengan UMKM di Kabupaten Kampar memiliki prospek yang baik pasca pandemi Covid-19, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan dari aspek bantuan pembiayaan, pembinaan manajemen dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM.

6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PROGRES MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN KAMPAR

Beberapa Hal Perkembangan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Kampar:

1. Usulan Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) melalui surat Bupati Ke MenpanRB Tanggal 20 Juni 2023
2. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kampar Tahun 2023 Pada Tanggal 21 Juni 2023.
3. Persetujuan Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Sesuai Surat Nomor : B/848/PP.99/2023 Tanggal 25 Juni 2023.
4. Forum Konsultasi Publik (FKP) di Balai Bupati Kampar pada tanggal 21 Juni 2023
5. Mulai Pembangunan Juni 2023

6. Penyampaian Kajian Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) ke Menpan RB tanggal 10 Juli 2023
7. Penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) tanggal 10 Juli 2023
8. Tanggal 9 November 2023 pelaksanaan Soft Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kampar sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kampar:
 - Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Kepolisian Resor Kampar, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.
 - Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru Unit Induk Distribusi Riau Dan Kepulauan Riau, Perumdam Tirta Kampar, Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Bangkinang, Bank Mandiri Bangkinang Kantor Cabang Kabupaten Kampar, Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Cabang Pekanbaru Panam.
9. Tanggal 8 Desember 2023 Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Kampar Bertempat Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau

10. Instansi/OPD Yang akan melaksanakan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kampar

1	Kepolisian Resor Kampar
2	Kejaksaan Negeri Kampar
3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Samsat)
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
6	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
7	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekanbaru Unit Induk Distribusi Riau.
8	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar (PERUMDAM Tirta Kampar)
9	Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Bangkinang
10	Bank Mandiri Bangkinang Kantor Cabang Kabupaten Kampar
11	Bank Syariah Indonesia KCP Bangkinang
12	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru
13	Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kampar
14	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar
17	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
18	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar
24	Dinas Sosial Kabupaten Kampar
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar

11. Kondisi Mall Pelayanan Publik (MPP) saat ini:

- 1) Pembangunan Gedung MPP Sudah Mencapai Diatas 100 %.
- 2) Tenant/Gerai pelayanan yang tersedia sebanyak 16 tempat (Gedung Baru) dan 6 Tempat (Gedung Lama) dengan rencana pelayanan sebanyak ± 300 Jenis layanan.

- 3) Telah dibuat produk hukum pelaksanaan MPP dengan Keputusan Bupati Kampar, diantaranya: Tim Pengelolaan MPP, Tata Tertib Pelaksanaan MPP, Penetapan Proses Bisnis Pelayanan MPP, Penetapan Maklumat Pelayanan MPP, Penetapan SOP Penyelenggaraan MPP dan Penetapan Standar Pelayanan MPP
- 4) Perbup Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam proses di Bagian Hukum
- 5) Kegiatan dalam proses pelaksanaan Anggaran APBD 2024;
 - Pengadaan Sarana, Prasarana Umum Dan Fasilitas Pendukung Lainnya
 - Pemasangan dan Penambahan Interior Gerai
 - Penyiapan Sistem Informasi Pelayanan Yang Terintegrasi
- 6) Pengajuan *MOU* PKS Untuk Seluruh Tenant dalam Proses dan selesai Akhir di Akhir Maret 2024.
- 7) Ujicoba Layanan pada bulan Mei 2024
- 8) Peresmian/Grand Opening MPP di Rencanakan Triwulan II Juni 2024

12. Komitmen Pemerintah Daerah

Pengintegrasian Pelayanan Publik Yang Diberikan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Serta Swasta Secara Terpadu Melalui Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kampar.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam pembangunan nasional difokuskan kepada pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, Peningkatan SDM berkualitas, Revolusi mental, Pembangunan Infrastruktur Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim dan menjaga Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam pembangunan Provinsi Riau difokuskan kepada pembangunan Peningkatan SDM berkualitas, Peningkatan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga, Peningkatan pengarusutamaan gender. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, Pembangunan konektivitas, Peningkatan cakupan pelayanan air minum, Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, Penanganan kawasan kumuh permukiman, Peningkatan akses ketenagalistrikan, Peningkatan pengaturan air dan penanggulangan abrasi/banjir, Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, Peningkatan daya saing sektor unggulan, Peningkatan daya tarik investasi, Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa, Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, Peningkatan kewirausahaan pemuda, Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan, Melayu Riau, Peningkatan pengelolaan destinasi wisata, Peningkatan promosi pariwisata, Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi.

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam pembangunan Kabupaten Kampar berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2024 antara lain: Pengimplementasian dan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tentang global, Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan

pelayanan masyarakat, Pengembangan ekonomi rakyat yang berbasis pedesaan pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, tenaga kerja dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional Pengimplementasian dan Pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan, Perwujudan sumberdaya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan ke depan, dan taat pada aturan dan norma yang berlaku dengan dukungan sistem pendidikan untuk menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu dengan melalui beberapa upaya. - Mengendalikan dan mengembangkan benda-benda sejarah, permuseuman dan kepurbakalaan, melestarikan nilai-nilai seni budaya tradisional yang Islami, menjadi nilai-nilai seni budaya tradisi yang islami. - Mengembangkan nilai budaya lokal khususnya budaya Kampar untuk memperkuat dan memperkaya khasanah budaya daerah dan budaya nasional, serta menangkal penetrasi budaya asing yang negatif melalui revitalisasi dan peningkatan upaya mengapresiasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. - Memasyarakatkan budaya Kampar melalui pendidikan di sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, pengelenggaraan acara seni dan budaya; dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. - Memasyarakatkan nilai-nilai mulia budaya Kampar dan menjadikan budaya Kampar sebagai ruh motivasi dalam melaksanakan pembangunan ;

		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kemajuan kebudayaan Melayu - Mendorong kerukunan umat berdampingan antara masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi.
2	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman - Menghargai terciptanya asimilasi kultur serta semangat heterogenitas dan prulalitas sebagai daya dukung pembentukan karakter bangsa.
3	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dengan merencanakan dan melaksanakan program dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel. - Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (good governance and clean government) sesuai dengan STOK yang berlaku. - Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas kompetensi, dan profesionalisme, termasuk pemantapan sistem pengangkatan, penempatan, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemberian penghargaan dan sanksi, dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang secara proporsional. - Memperkuat kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga legislative dan yudikatif dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan public dan penegak hukum. - Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah bagi pembangunan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta. - Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan sesuai dengan standar yang berlaku. - Mewujudkan aparatur yang berkemampuan tinggi dan memiliki integritas untuk menghindarkan terjadinya KKN; <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam</p>

		<p>pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, penegakan hukum dan kehidupan politik secara demokratis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggali dan mengembangkan potensi daerah guna menunjang perekonomian daerah perlu ditumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimum, terutama dalam hal perijinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum, dan pelayanan kepentingan masyarakat akan hak-hak sipilnya; - Mewujudkan regulasi dan sarana informasi tahapan pembangunan yang mudah diakses, sehingga public mengetahui tahapan pencapaian pembangunan sebagai perwujudan transparansi melalui e-government. - Mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh aparat pemerintah secara adil dan terbuka - Melaksanakan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pemantapan struktur kelembagaan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diamanatkan kebijakan pembangunan daerah; perumusan dan melaksanakan kebijakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas; penyediaan prasarana dan sarana fisik dan sosial; serta peningkatan kinerja pelayanan untuk menunjang produktifitas nasyarakat - Menyediakan akses yang tinggi bagi publik untuk memperoleh pelayanan umum dari lembaga dan aparat pemerintah. - Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang tepat dan cepat bagi seluruh masyarakat. - Menjamin kebebasan media sebagai sarana penyebarluasan informasi dalam rangka pencerdasan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta sarana pembangunan nilai-nilai demokrasi. - Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi sumber keuangan pendanaan

		daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi
5	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dengan upaya: - Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan - Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan - Melaksanakan pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk agar mampu mendukung kehidupan bermasyarakat yang berbudaya. - Membangun kerjasama antar daerah, dalam perumusan kebijakan redistribusi penduduk melalui transmigrasi lokal dan migrasi masuk ke Kabupaten Kampar.
	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan melalui upaya pemenuhan standart pelayanan minimum terhadap pemenuhan standart kompetensi lulusan, standart isi, standart proses, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan, standart pembiayaan, dan standart penilaian pendidikan. - Memberikan jaminan Pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata bagi masyarakat
	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui upaya memberikan kesepahaman bersama diantara simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial - Melibatkan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.. - Melaksanakan tanggungjawab aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. - Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan

		<p>ketertiban umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan sistem tanggap darurat jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum - Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, memiliki budaya politik yang sehat dan santun. - Menghargai terciptanya asimilasi kultural, semangat heterogenitas dan pluralitas yang memiliki daya dukung terhadap pembentukan karakter bangsa (nation building). - Melaksanakan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) serta kehidupan demokratis guna terwujudnya masyarakat yang mandiri. - Menciptakan demokrasi, meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan guna mewujudkan transparansi public. - Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi masyarakat; dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aspirasi masyarakat. - Menjamin kebebasan dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. - Mewujudkan supremasi hukum di lingkungan masyarakat
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran dengan memajukan dan memotivasi program pembinaan keagamaan pada seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata - Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat.
	Peningkatan pemanfaatan sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama untuk membantu memajukan pendidikan

	<p>dan prasarana agama</p>	<p>agama selain di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama serta membentuk sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menyelenggarakan tugas pemerintah, sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berakhlak luhur, memiliki integritas, jujur, dan menghindari KKN. - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan - Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
	<p>Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) - Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) - Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan - Meningkatkan produksi dan produktivitas tersebut melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu serta meningkatkan pra dan pasca panen. - Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang. - Meningkatkan usaha agrobisnis peternakan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal bidang peternakan guna tersedianya produk ternak

		<p>secara kontinyu baik kuantitas maupun kualitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan secara profesional dan terintegrasi dengan kegiatan off-farm serta kegiatan lainnya.
	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah - Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan energy (biofuel) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi pasar regional melalui diversifikasi, produktifitas dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.
	Peningkatan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata dengan: - Membangun objek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan menciptakan iklim investasi melalui pembenahan kebijakan, regulasi dan perizinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum, dan kepastian hukum - Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah,
	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan - Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan,

		<p>dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan dan pariwisata.</p>
	<p>Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa - Meningkatkan pendapatan masyarakat dari produksi barang dan jasa - Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara pemerintah Daerah, Swasta, UKM, Koperes dan Perbankan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan;
	<p>Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata untuk: - Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Kampar melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan termasuk agropolitan yang berfungsi mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui kegiatan dan agrobisnis serta pusat perikanan. - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana untuk mendukung perkembangan pusat sub-wilayah, dan agropolitan diwilayah perdesaan yang sesuai dengan standar penyediaan prasarana dan sarana - Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang diterapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar. - Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berskala kecil dan menengah pada kawasan pedesaan dan relative tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana sosial lainnya di pusat-pusat kecamatan dan sentra ekonomi. - Memperkuat fungsi TRTW Kabupaten Kampar dan rencana yang lebih rinci sebagai acuan pemanfaatan ruang serta membangun system pengendalian alih fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kawasan budidaya dan pelestariannya. - Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah; regulasi perizinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan. - Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar
	Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sisitem permukiman secara terpadu dengan Prasarana kelengkapan dasar Iistik, air bersih, sanitasi dengan lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman untuk mendukung Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu dengan tatanan transportasi yang terorganisasi secara tersistem dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, penyebrangan, laut dan udara yan terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang yang terus berkembang secara dinamis yang terpadu dengan mewujudkan keterpaduan intramoda dan antarmoda dalam jaringan prasarana dan pelayanan

	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber-sumber perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam migas di Kabupaten Kampar sebagai sumber pendanaan perekonomian perlu dilengkapi dengan pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan guna menunjang kesinambungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang
	Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan dengan: - Mengendalikan kerusakan lingkungan yang terwujud sebagai bencana banjir yang terjadi secara berkala, melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk memulihkan fungsi sebagai penampung air hujan, peresapan air, penyimpan air, dan pengaliran air. - Mengendalikan pencemaran dan sedimentasi pada badan air oleh kegiatan domestic, pertanian, perkebunan, industri dan kehutanan. - Mengembangkan kemampuan penyelenggaraan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologis Kabupaten Kampar - Mencegah terjadinya kebakaran hutan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar dan wilayah sekitarnya dan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga. - Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengelolaan lingkungan, peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan diwujudkan dalam penetapan standar kualitas; melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan; pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan; penegakan hukum bagi pelanggaran; dan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

ah kebijakan pemba

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Selanjutnya pertimbangan lain dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ini merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD, yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Adapun saran dan masukan dari DPRD yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. Bidang Pendidikan

- a. Menyediakan ruang kelas belajar yang layak di seluruh sekolah Kabupaten Kampar, dengan prioritas utama dilakukan pada desa tertinggal untuk pemerataan pembangunan pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;
- c. Mengembangkan pendidikan yang mengarah pada isu-isu global;
- d. Menyediakan sistem pendidikan dan pelaksanaan pendidikan pasca Covid-19;
- e. Penempatan guru-guru terutama pada desa-desa tertinggal dan/atau daerah yang jauh dari perkotaan di Kabupaten Kampar.

2. Bidang Kesehatan

- a. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
- b. Meningkatkan pelayanan RSUD Bangkinang;
- c. Meningkatkan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Mengurangkan jumlah bayi terkena gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/ Balita dan mengurangkan angka stunting;
- e. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit menular.

3. Bidang Infrastruktur

- a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di desa tertinggal di Kabupaten Kampar;
- b. Meningkatkan penataan kota terutama pembangunan dan pemeliharaan

rung terbuka hijau di Kabupaten Kampar;

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
- d. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (sektor pertanian, industri dan lainnya).

4. *Bidang Sosial*

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan;
- b. Mengurangkan angka penyandang masalah kesejahteraan social;
- c. Meningkatkan kesempatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

5. *Bidang Ekonomi*

- a. Mengkoordinasikan seluruh stakeholder untuk peningkatan pembangunan ekonomi;
- b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM;
- c. Membangun infrastruktur pertanian;
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah, melauai optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan BUMD.

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat atau yang memberikan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.

- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.
- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menggambarkan bahwa Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi dan ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan APBD I dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

4.1.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak menerima Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Riau maupun dari Pemerintah.

4.1.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam percepatan pembangunan hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa berupa Belanja bantuan Keuangan yang untuk penggunaan sebagai berikut :

1. Dana Desa

- 1) Dana Desa pasal 3 PP Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dalam APBN, memanfaatkan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana desa secara Nasional dalam APBN setiap Tahun.
- 2) Tujuan pengalokasian Dana Desa (DD)
Tujuan Pengalokasian Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas Penggunaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan Sosial dan Penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%.
 - b. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3%.
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
 - d. Program sektor prioritas lainnya.
- 3) Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, dimana *Alokasi Dana Desa (ADD)* di Kabupaten Kampar berjumlah **Rp. 142.682.598.580,-** (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan*

Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar **Rp. 231.513.488.000,-** (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang telah disalurkan **100%** dialokasikan untuk 242 Desa se Kabupaten Kampar.

Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang kemudian di ganti ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pagu Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (Lima puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (Sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (Sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimaksudkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. Peningkatan Kualitas Hidup
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan pelayanan publik

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 dan keputusan 4 menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, imigrasi, menteri keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) menerangkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan Kepada Desa yang berasal dari Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota (pasal 72 ayat 4 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), dimana berdasarkan Undang- undang Nomor tersebut pasal 72 ayat 4 “ Desa memperoleh jabatan ADD”. ADD yang diberikan ke Desa merupakan hak Desa yang dapat digunakan oleh Desa unuk memperkuat pembangunan, Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Tujuan diberikannya ADD ini adalah untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Desa, memperkuat otonomi desa dalam membiayai jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Urusan Sosial Kemasyarakatan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi di Desa. Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, telah membagikan anggaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada 242 Desa dengan jumlah total berjumlah **Rp. 142.682.598.580,-** (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Perhitungan Alokasi Dana Desa per Desa di hitung dengan rumusan 60 % dibagi merata dan 40 % dari Anggaran Dana Desa di hitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Manfaat ADD bagi Desa adalah :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja tak terduga.

Dalam memanfaatkan dan menggunakan ADD ini, Pemerintah Desa menggunakan rumus 60% untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 40% dari ADD di gunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga.

Dalam APBDesa setiap tahunnya dilakukan perhitungan 30% Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 70% dari APBDes digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga. Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pegelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber

kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggung jawaban Kepala Desa.

Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepada Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Kaur Desa baik melalui pelatihan dan Konsultasi yang diharapkan ke depannya segala kegiatan masih dapat terlaksana, meskipun dengan anggaran dan ruang gerak yang terbatas baik dari Dinas terkait maupun dari Pemerintahan Desa beserta jajarannya, sehingga monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara rutin dan berkala tetap terlaksana. Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdaya guna dan efektif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa

3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 23 Maret 2023, Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, DBH Pajak Daerah dengan jumlah **Rp. 15.414.321.124,-** (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Dua Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), dan sudah disalurkan 100%, sedangkan DBH Retribusi dengan jumlah sebesar **Rp. 1.398.945.000,-** (*Satu milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

4. BKK Kabupaten Interpretasi

Anggaran BKK Interpretasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang telah disalurkan ke 9 (Sembilan) Desa dan terlaksana sebanyak 100% yang artinya anggaran BKK Kabupaten Interpretasi telah disalurkan keseluruhannya dan terlaksana tanpa ada kendala yang berarti.

5. BKK Kabupaten Ambulance

Anggaran BKK Ambulance Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 420.000.000,-** (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) yang telah disalurkan sebesar **100%** ke 242 Desa yang tersebar di Kabupaten Kampar, khusus untuk Desa Ludai dan Desa Dua Sepakat, mereka meminta masing-masing dua unit yang berbeda yakni Ambulance Air dan Mobil Ambulance biasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tiap tahun telah melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/jasa khususnya pengadaan Mobil Ambulance Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk selalu memberikan pemahaman agar aparat desa atau kelurahan semakin memahami proses pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan kendaraan kesehatan atau mobil Ambulance Desa sesuai aturan yang berlaku. Untuk Spesifikasi kendaraan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bagian Administrasi Pembangunan, dan PBJ. Hal ini kita lakukan agar desa-desa yang menganggarkan pengadaan Mobil Ambulance, harus sesuai dengan aturan pengadaan barang yang berlaku yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh Ambulance, seperti Brangkar, Oksigen, Infus, lampu sirene, lampu penerangan dan fasilitas lainnya sesuai SOP.

Daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi diharapkan memanfaatkan Ambulance sesuai dengan fungsinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk transportasi layanan kesehatan

masyarakat dan untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi ini dengan selalu berkordinasi dengan tenaga kesehatan dan Puskesmas terdekat.

6. BKK Provinsi Riau yang bersumber dari APBD

Anggaran BKK Provinsi Riau Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 41.343.000.000,-** (*Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang telah disalurkan sebesar **100%** kepada 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua), yang di dibagi berdasarkan Juknis yang disampaikan.

REALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

No	SUMBER DANA	PAGU	JML Desa	REALISASI PENYALURAN		SISA BLM SALUR	
				JUMLAH	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DANA DESA	231.513.488.000	242	231.513.488.000	100%	-	0%
2	ALOKASI DANA DESA	142.682.598.580	242	142.682.598.580	100%	-	0%
3	DBH PAJAK DAERAH	15.414.321.124	242	15.414.321.124	100%	-	0%
4	DBH RETRIBUSI DAERAH	1.398.945.000	242	1.398.945.000	100%	-	0%
5	BKK KABUPATEN INTERPRETASI	1.800.000.000	9	1.800.000.000	100%	-	0%
6	BKK KABUPATEN AMBULANCE	420.000.000	4	420.000.000	100%	-	0%
7	BKK PROVINSI	41.343.000.000	242	41.343.000.000	100%	-	0%
JUMLAH PAGU 2023		434.572.352.704		434.572.352.704	100%	-	0%

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi adalah Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu memenuhi ADD sebesar 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemeintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggungjawaban Kepala Desa.

Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepala Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Bendaharawan Desa melaluin pelatihan dan Konsultastif, setra melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan desa secara rutin dan berkala. Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdayaguna dan efektif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa.

Pada tahun 2023 Kabupaten Kampar memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Menerima penghargaan terbaik Peringkat 1 Kategori Kinerja Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa terbaik tahun 2022 pada Tanggal 16 Januari 2023.
2. Menerima Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang langsung diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023;
3. Award 2023 Atas Komitmennya Untuk Ikut Menjaga Kemerdekaan Pers di Riau dan Membantu Memelihara Iklim Industri Pers Yang Sehat Dan Profesional Pada Tanggal 28 Februari 2023;
4. Menerima penghargaan terbaik II kinerja Lelang Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 28 februari 2023;
5. Mendapatkan Penghargaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Award 2023 atas komitmennya untuk ikut menjaga kemerdekaan Pers di Riau dan membantu memelihara iklim industri pers yang sehat dan profesional pada tanggal 28 Februari 2023.
6. Menerima Piagam penghargaan terbaik pertama kategori kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Riau yang diserahkan oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si pada tanggal 3 April 2023;
7. Menerima 3 Penghargaan Dalam Pemulihan Dan Penertiban Aset Tahun 2022 Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dari 27 Perumahan, Kategori Pemulihan Dan Penerbitan Aset Tahun 2022 Berupa Rumah Dinas, Dan Kategori Survei Penilaian Integritas (SPI) Indek SPI Pada Tanggal 24 Mei 2023.

8. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 yang Merupakan WTP yang ke-7, pada tanggal 14 juni 2023.
9. Menerima Penghargaan Pemenang Lomba Juara I SDGs Desa Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Untuk Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Pada Tanggal 27 Juli 2023;
10. Menerima Penghargaan Dari Gubernur Riau Atas Prestasi Penurunan Stunting Yang Signifikan Sebesar 11,2% Dari Sebelumnya 25,7% Menjadi 14,5% Pada Tanggal 31 Juli 2023.
11. Meraih Menerima Penghargaan Lencana Wira Bangun Desa Atau Upaya Dan Kerja Keras Dalam Memajukan Dan Memandirikan Desa Tahun 2023 Dari Gubernur Riau Pada Tanggal 9 Agustus 2023.
12. Menerima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Dari Mendagri Dalam Lomba Desa Tingkat Nasional Untuk Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Pada Tanggal 15 Agustus 2023;
13. Meraih dua penghargaan yaitu juara satu Video Edukasi Qris se Provinsi Riau dan juara terfavorit edukasi Qris se Provinsi Riau pada tanggal 20 Agustus 2023;
14. Meraih Piagam Penghargaan UHC Dengan Persentase 97,70% yang diserahkan Oleh Gubernur Riau Dan Dirut BPJS, Pada Tanggal 16 Oktober 2023;
15. Hasil Penilaian Desa Antikorupsi, KPK RI Umumkan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII koto Kampar Kabupaten Kampar, Raih Nilai 94 dengan Kategori Istimewa Pada Tanggal 19 Oktober 2023;
16. Menerima Penghargaan Kategori Kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP) & Klinik LKPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2023, Juara ke III tanggal 31 Oktober 2023;
17. Meraih Penghargaan Pertama dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI atas Komitmen Bangun dan Majukan Desa Pada Tanggal 02 November 2023;

18. Meraih Juara I Apresiasi Bunda Paud Nasional Tahun 2023 Kategori Kabupaten Non Tertinggal, drg. Yusi Katakan Persembahan Terbaik Untuk Para Pendidik Paud Dan SD Kelas Awal Di Kabupaten Kampar Pada Tanggal 08 November 2023;
19. Berhasil meraih Piagam penghargaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kategori Madya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau tanggal 1 Desember 2023;
20. Memperoleh predikat sebagai Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2023 dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai Kabupaten/Kota peduli HAM pada tanggal 18 Desember 2023;
21. Menerima Penghargaan pada malam Puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Riau Award 2023 Kategori Informatif dengan nilai 91,65 pada tanggal 21 Desember 2023;
22. Berhasil meraih penghargaan Madya dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023, yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
23. Menerima Penghargaan Kategori Baik Dalam Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) pada tanggal 27 Februari 2024;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang mencakup Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Tugas Pembantuan dan Penugasan. Dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan tersebut, pada laporan ini dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi masalah. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya, disamping masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kampar yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga

kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Berbagai keberhasilan pembangunan daerah memotivasi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk semakin meningkatkan kinerja pembangunan. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih ada berbagai kelemahan yang perlu menjadi perhatian dan penyelesaian untuk tahun kedepan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk diperbaiki di masa selanjutnya.

Beberapa langkah penting dan strategi yang akan ditempuh agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat berdasarkan prioritas, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-

hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayagunakan.

5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
7. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
8. Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara maksimal dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya, namun demikian melalui Laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam tahun 2023 termasuk didalamnya beberapa keberhasilan dan kelemahannya yang dihadapi. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar dan *stakeholder's* lainnya dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan di masa men datang, terima kasih. Insya Allah kita semua dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kampar yaitu “***Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025***”